

**PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KOMISI
PEMILIHAN UMUM, PARTAI POLITIK, LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT, DAN MEDIA MASSA)
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT**

(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MELINDA CUCUT WULANDARI

145030101111043



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

MOTTO

“Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasoroke, Sekti Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Banda”

“Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara”.

“Ajining Diri Dumunung Aneng Lathi, Ajining Raga Ana ing Busana”.

(PITUTOR LELUHUR JOWO)

“Common Sense Will Tell Us, That The POWER Which Hath Endeavoured To SUBDUE Us, Is Off All Others, The Nost Improrer To DEFEND Us.”

(THOMAS PAINE)

“Success is Liking Yourself, Liking What You Do, And Liking How You Do it.”

(MAYA ANGELOU)

“We Cannot Become What We Want by Remaining What We are.”

(MAX DEPEREE)

“Be Yourself, not Your Idea of What You Think Somebody else’s Idea of Yourself should be.”

(HENRY DAVID THOREAU)

“Forever Is Composed Of Now”

(EMILY DICKINSON)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemangku Kepentingan (Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)

Disusun Oleh : Melinda Cucut Wulandari

NIM : 145030101111043

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 02 Juli 2018

Komisi Pembimbing


Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D

NIP. 19740627 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juli 2018

Waktu : 08.00 - 09.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Melinda Cucut Wulandari

Judul : Peran Pemangku Kepentingan (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang 2018)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Fadillah Putra, S.Sos., M.Si.,
MPAff., Ph.D
NIP. 19740627 2003112 1 001

Penguji I



Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP
NIP. 19570313 198601 2 001

Penguji II



I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP, Ph.D
NIP. 2011078312041000

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **"Peran Pemangku Kepentingan (Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 02 Juli 2018



Melinda Cucut Wulandari

NIM: 145030101111043

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **“Peran Pemangku Kepentingan (Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 02 Juli 2018



Melinda Cucut Wulandari

NIM: 145030101111043

RINGKASAN

Melinda Cucut Wulandari, 2018. **“Peran Pemangku Kepentingan (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”**. Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D., Universitas Brawijaya, hal

Para Pemangku Kepentingan (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa) memiliki peran untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik bagi suatu bangsa. Salah satu peran penting guna merealisasikan negara yang demokratis ialah meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Para pemangku kepentingan dapat menjalankan perannya tersebut sesuai dengan wewenang dan kemampuan kapasitas yang dimilikinya.

Tujuan daripada penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan peran dari masing-masing lembaga untuk mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam perpolitikan negara. Sehingga yang menjadi fokus dari penelitian ini ialah (1) Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat; (2) Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat; (3) Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat; (4) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat; dan (5) Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dari cresswell yaitu; (1) Menentukan tempat/individu; (2) Memperoleh Akses dan Membangun; (3) Sampling Purposeful; (4) Mengumpulkan Data; (5) Merekam informasi; (6) Memecahkan persoalan; (7) Menyimpan data. Analisis data yang digunakan ialah menggunakan *process tracing*. Process Tracing merupakan metode penelitian kasus tunggal yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dalam suatu kasus tentang ada atau tidak adanya mekanisme sebab-akibat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peran Bakesbangpol ialah; (1) fasilitas persiapan pelaksanaan pilkada; (2) fasilitas pelaksanaan pilkada; (3) koordinasi Pelaksanaan Pilkada. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ialah memberikan sosialisasi dengan memperhatikan beberapa hal yaitu; (1) sasaran sosialisasi; (2) materi sosialisasi; (3) metode sosialisasi. Peran Partai Politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat diantaranya ialah; (1) sosialisasi kader; (2) optimalisasi organisasi sayap partai; (3) pendidikan politik; (4) kampanye partai. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ialah; (1) pendidikan politik kaum muda; (2) Dakwah berunsur politik kebangsaan; (3) sosialisasi agenda Pemilu. Peran Media Massa dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat ialah; (1) menyampaikan informasi terkait Pilkada Kota Malang 2018; (2) mengenalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2018; (3) himbauan agar masyarakat memberikan hak suaranya; (4) pendidikan politik oleh narasumber.

Saran yang dapat diberikan adalah terkait pada keseriusan setiap lembaga dalam menyelenggarakan sosialisasi serta pendidikan bagi politik masyarakat. Berbagai metode baru dapat dicoba guna menyebarluaskan informasi secara merata. Sasaran yang menjadi sosialisasi juga perlu diperhatikan karena, setiap sasaran memerlukan cara yang berbeda-beda. Setiap pemangku kepentingan dapat saling bekerja sama untuk memaksimalkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2018.

Kata Kunci: Peran, Lembaga, Partisipasi Politik,



SUMMARY

Melinda Cucut Wulandari, 2018. **"Role of Stakeholders (National Unity and Political Entity, Election Commission, Political Party, Non Governmental Organization and Mass Media) in Increasing Political Participation of Society"**. Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D., Brawijaya University

Stakeholders (National Unity and Political Entities, Election Commission, Political Parties, Non-Governmental Organizations and Pers) have a role to create a better democracy for a nation. One of the important roles for the realization of a democratic state is to increase the political participation of the people. Stakeholders can perform their role according to their authority and capacity.

The purpose of this study is to describe the role of each institution to influence the public to participate in the politics of the state. So the focus of this research is (1) The Role of National Unity and Political Body in Increasing Political Participation of Society; (2) The role of the General Election Commission (KPU) in Increasing the Political Participation of the Community; (3) The Role of Political Parties in Increasing Public Political Participation; (4) The Role of Non-Governmental Organizations in Increasing Public Political Participation; and (5) The Role of Pers in Increasing Public Political Participation.

This research is descriptive research using qualitative approach method. Data collection techniques used are methods of creswell namely; (1) Determining the place / individual; (2) Obtaining Access and Building; (3) Purposeful Sampling; (4) Collecting Data; (5) Record information; (6) Solve the problem; (7) Storing data. Data analysis that used by using tracing process. Tracing Process is a single case study method that can be used to make a conclusion in a case about the presence or absence of a causal mechanism.

Based on research that has been done the role of Bakesbangpol is; (1) pilkada preparation facility; (2) pilkada implementation facility; (3) coordination of Pilkada Implementation. The role of the KPU in increasing the political participation of the community is to provide socialization by taking into account several matters, namely; (1) target of socialization; (2) socialization materials; (3) methods of socialization. The role of Political Parties in increasing the political participation of the community are: (1) socialization of cadres; (2) optimization of party wing organization; (3) political education; (4) party campaign. The role of NGOs conducted by Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in increasing the political participation of the community is; (1) the political education of young people; (2) Da'wah national political element; (3) socialization of election agenda. The role of Pers in increasing the political participation of the community is; (1) to convey information related to the elections of Malang City 2018; (2) to introduce

candidate pair of Mayor and Deputy Mayor of Malang 2018; (3) appeal to the public to give their voting rights; (4) political education by resource persons.

Suggestions that can be given are related to the seriousness of each institution in organizing socialization and education for community politics. New methods can be tried to disseminate information equally. The targets that become socialization also need to be considered because, each goal requires a different way. Each stakeholder can work with each other to maximize the political participation of the community in the Malang City Elections 2018.

Keywords: Role, Institution, Political Participation.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Saya

Terimakasih Segala Jerih Payah Dan Pengorbanannya

dan

Kepada Almamater Tercinta Universitas Brawijaya Terimakasih Telah

Menjadi Bagian Dari Pengalaman Hidup Saya Yang Berharga



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Petani (Studi Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, MAP, MMG selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Fadilla Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D selaku Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan baik secara teoritis, teknis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen, serta staff Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala dan seluruh pegawai Bakesbangpol Kota Malang, KPUD Kota Malang, Partai Demokrat, Golkar, & PKB, LPP RRI, MHTv, Koran Malang Post, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah atas ijin penelitian serta memberikan keramahan yang ditujukan selama penulis melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta, terimakasih banyak Bapak Priyonoto dan Ibu Misanah atas doa dan kasih sayangnya yang tulus sampai saat ini, yang senantiasa mengiringi penulis selama menuntut ilmu.
8. Kakakku tersayang, Anang Wahyu W, beserta Istri Nuril H., S.Pd yang bersedia memberikan dukungan sehingga skripsi ini selesai.

9. Awak-awak LPM Dianns yang telah menuntun, membuka pikiran dan pandangan saya tentang menjadi Mahasiswa yang sebenarnya serta memberikan pengalaman tak terlupakan selama menjadi Mahasiswa. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang sejatinya.
10. Sahabatku “SAILORMOON”, Kirana, Ervita, Naili, Aurora, Irfan Efendi, Osvaldo, Room Chaidir, Tety, Nofa, Novi, Winda yang selalu ada setiap penulis membutuhkan bantuan dan memberikan dukungan, motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Serta terimakasih banyak karena telah menemani selama masa-masa kuliah di Malang.
11. Para penghuni Kos Senggani 6A Indah, Mbak Bunga, Tika, Rita, Caca yang selalu sedia merawat penulis saat sakit, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman terbaik Alhadi Hidayat yang telah menemani penulis melakukan penelitian serta selalu ada untuk membantu dan memberi semangat kepada penulis.
13. Teman-teman Administrasi Publik 2014 yang telah memberikan pengalaman dan kenangan selama menuntut ilmu di Universitas Brawijaya. Serta semua pihak yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 03 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MAJELIS PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori Pendekatan Behaviorism dan New Institutionalism	14
1. Behavioralis	14
2. New Institutionalism	18
3. Perbandingan Behaviorism dengan New Institutionalism	20
B. Sistem Politik.....	23
1. Pengertian Sistem Politik	23
2. Partisipasi Politik	24
C. Teori Peran.....	28

D. Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.....	29
1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29
2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	31
3. Peran Partai Politik	32
4. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	36
5. Peran Media Massa	38
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	46
1. Lokasi Penelitian.....	46
2. Situs Penelitian.....	46
D. Sumber Data	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Instrumen Penelitian.....	52
G. Metode Analisis Data	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
1. Gambaran Umum Kota Malang	58
a. Letak Geografis Kota Malang	58
b. Kondisi Demografis	60
c. Visi dan Misi Kota Malang	62
2. Gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.....	65
a. Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	65
b. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.....	65
c. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	66
d. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.....	66
e. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	69

f. Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	70
3. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang	71
a. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang	71
b. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	72
c. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	72
d. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	73
e. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	75
f. Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	75
4. Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	77
a. Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	77
b. Visi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	78
c. Misi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	78
d. Makna Lambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	79
e. Struktur Partai Kesatuan Bangsa (PKB)	81
5. Gambaran Umum Partai Demokrat	82
a. Profil Partai Demokrat	82
b. Visi Partai Demokrat	82
c. Misi Partai Demokrat	82
6. Gambaran Umum Partai Golongan Karya (Golkar)	84
a. Profil Partai Golongan Karya (Golkar)	84
b. Visi Partai Golongan Karya (Golkar)	85
c. Misi Partai Golongan Karya (Golkar)	85
d. Platform Partai Golongan Karya (Golkar)	85
7. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama Kota Malang	87
a. Profil Nahdlatul Ulama Kota Malang	87
b. Tujuan Nahdlatul Ulama Kota Malang	88
c. Usaha Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Malang	89
d. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Malang	89
e. Sumber Daya Manusia Nadlatul Ulama (NU) Kota Malang	90
8. Gambaran Umum Organisasi Muhammadiyah Kota Malang	93
a. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)	93

b. Visi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)	94
c. Misi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)	95
d. Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang	95
9. Gambaran Umum Radio Republik Indonesia (Radio) Kota Malang	97
a. Profil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang	97
b. Visi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang	97
c. Misi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang	98
d. Tugas Pokok Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang	99
e. Peran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang	100
f. Struktur Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang	103
10. Gambaran Umum PT. Media Utama Televisi (MHTV) Kota Malang	105
a. Profil PT. Media Utama Televisi (MHTV) Kota Malang	105
b. Visi PT. Media Utama Televisi (MHTV) Kota Malang	105
c. Misi PT. Media Utama Televisi (MHTV) Kota Malang	106
11. Gambaran Umum Koran Malang Post	106
a. Sejarah Malang Post	106
b. Visi Malang Post	107
c. Misi Malang Post	107
d. Struktur Organisasi Malang Post	108
B. Penyajian Data	110
1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.	110
2. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.	116
3. Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.	121
4. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (NU dan Muhammadiyah)	130

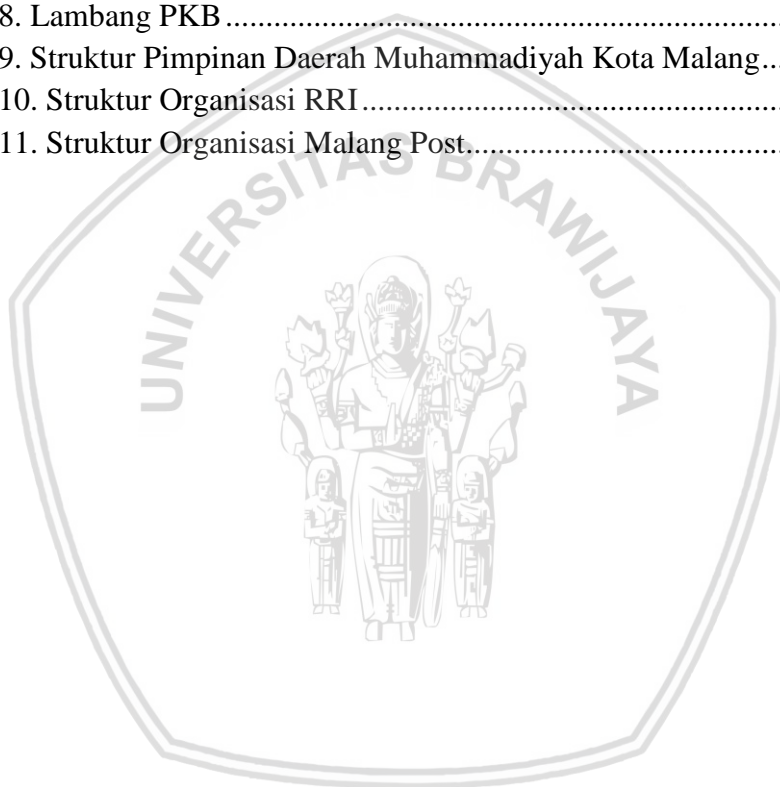
5. Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.	135
C. Analisis Data dan Pembahasan	142
1. Pandangan Teori Pendekatan <i>New Institutionlism</i> terhadap Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Partisi Politik Masyarakat.	143
2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.	147
3. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.	154
4. Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	162
5. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.	170
6. Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	173
7. Analisis Pengaruh Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	178
PENUTUP	185
A. Kesimpulan	185
B. Saran	188
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN	196

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Behavioralism dan New Institutionalism	20
Tabel 2. Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan.....	60
Tabel 3. Jumlah Penduduk Penganut Agama di Kota Malang	61
Tabel 4. Nama Pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	70
Tabel 5. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	70
Tabel 6. Bidang Integrasi Bangsa	71
Tabel 7. Bidang Kewaspadaan Daerah	71
Tabel 8. Kepala Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	75
Tabel 9. Kepala Sub Bagian Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.....	76
Tabel 10. Daftar Nama Staff Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	76
Tabel 11. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang Masa Khidmat 2016-2021	90
Tabel 12. Daftar Nama Organisasi Sayap Partai.....	124
Tabel 13. Jadwal Rencana Pelaksanaan: Program “Nuansa Demokrasi” Pilwali Kota Malang. Setiap Selasa, Pukul: 10.00-10.55 WIB	137
Tabel 14. Jadwal Rencana Pelaksanaan: Program “Kampanye Dialogis” Pilwali Kota Malang, Setiap Kamis pukul 10.05-10.55 WIB	139
Tabel 15. Perolehan Suara.....	179
Tabel 17. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang 2013.....	181

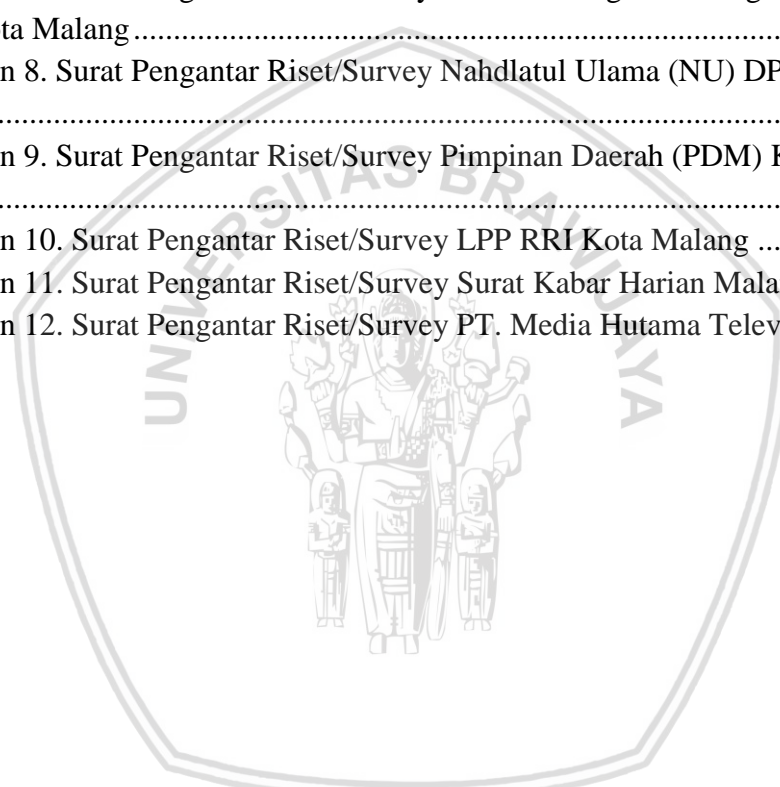
DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Piramida Partisipasi Politik Masyarakat	27
Gambar 2. Aktivitas-aktivitas Pengumpulan Data.....	51
Gambar 3. Process Tracing Menggunakan Mekanisme Kausalitas	55
Gambar 4. Ruang Lingkup Causal Mechanism	56
Gambar 5. Peta Kota Malang	59
Gambar 6. Struktur Organisasi Bakesbangpol Kota Malang	69
Gambar 7. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	75
Gambar 8. Lambang PKB	79
Gambar 9. Struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.....	96
Gambar 10. Struktur Organisasi RRI.....	104
Gambar 11. Struktur Organisasi Malang Post.....	109



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pilkada Kota Malang 2018 per tanggal 29 Juni 2018	196
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari Bakesbangpol Kota Malang	198
Lampiran 3. Surat Pengantar Riset/Survey Ke Bangkesbangpol Malang.....	199
Lampiran 4. Surat Pengantar Riset/Survey KPUD Kota Malang	200
Lampiran 5. Surat Pengantar Riset/Survey Partai Demokrat DPC Kota Malang	201
Lampiran 6. Surat Pengantar Riset/Survey Partai Golkar DPC Kota Malang	202
Lampiran 7. Surat Pengantar Riset/Survey Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Kota Malang	203
Lampiran 8. Surat Pengantar Riset/Survey Nahdlatul Ulama (NU) DPC Kota Malang.....	204
Lampiran 9. Surat Pengantar Riset/Survey Pimpinan Daerah (PDM) Kota Malang	205
Lampiran 10. Surat Pengantar Riset/Survey LPP RRI Kota Malang	206
Lampiran 11. Surat Pengantar Riset/Survey Surat Kabar Harian Malang Post..	207
Lampiran 12. Surat Pengantar Riset/Survey PT. Media Utama Televisi.....	208



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan fenomena yang dapat memengaruhi sistem politik negara demokratis. Negara demokratis akan menjadi fana apabila partisipasi politik tidak berjalan. Hal tersebut dikarenakan partisipasi politik memiliki hubungan dengan masyarakat yang memiliki kuasa penuh atas negara. Seperti semboyan negara demokrasi yang mana dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, maka partisipasi politik menjadi tonggak utama berdirinya negara demokrasi itu sendiri. Menurut Mirriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik (2010; 367) mengartikan partisipasi politik kegiatan individu atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, anatara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Tindakan masyarakat dalam kegiatan politiknya merupakan tanggungjawab mereka terhadap kebijakan pemerintah, salah satu bentuk refleksi nyatanya adalah partisipasi politik. Fenomena tersebut sesuai dengan konsep partisipasi politik, dimana tingkah laku dan aktivitas individu warga negara yang mampu mempengaruhi keputusan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pengaruh warga negara atau rakyat itu sendiri dapat memberi dampak akan tindakan pemerintah yang dapat mewujudkan perubahan dalam sistem politik. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan salah satu kekuatan politik yang nyata bagi negara demokrasi.

Partisipasi politik di Indonesia sebagai indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi yaitu Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi politik rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum.

Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yaitu UU No. 15 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia., tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang

demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pemilu dapat menghasilkan pemimpin serta wakil rakyat yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri melainkan perlu adanya peran dari pemangku kepentingan lain sebagai bentuk berjalannya demokrasi. Setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan masing-masing dalam sistem politik. Dengan demikian dapat dilihat peran apa yang dijalankan oleh masing-masing pemangku kepentingan untuk mempengaruhi masyarakat agar turut dalam partisipasi politik. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil sampling pemangku kepentingan. Menurut Ted palys dalam Zamzam (2015; 24) mengatakan pemangku kepentingan sampling adalah strategi yang mana peneliti dituntut untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam suatu kebijakan, baik itu membuat, memberi, menjalankan suatu kebijakan. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KPU, Bakesbangpol, LSM, Partai Politik, dan Media Massa yang berada di Kota Malang.

Pemangku kepentingan yang pertama ialah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Tugas pokok yaitu UU No. 02 Pasal 1 Ayat 4 tahun 2011 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pendidikan politik untuk membuat warga negara Indonesia untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan pemahaman mengenai pemilihan umum. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada.), Bakesbangpol Kota Malang melakukan sosial regulasi. Selain sosialisasi ini, Bakesbangpol juga akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di kota Malang. Hal tersebut sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah.

Kedua yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat. Peran KPU dalam sosialisasi politik ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 2017 Pasal 12J tentang Pemilihan Umum yakni “mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”. Untuk menjalankan tugas sosialisasi tersebut secara struktural KPU ada pada semua tingkatan wilayah, karena di setiap wilayah di bentuk kepanjangan tangan dari KPU. Pada wilayah Provinsi terdapat KPUD Provinsi, di wilayah Kabupaten/ Kota terdapat KPUD Kabupaten/ Kota, di tingkat wilayah Kecamatan dibentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa/ Kelurahan terdapat PPS (Panitia

Pemungutan Suara.. KPU Kota Malang sendiri melakukan perannya Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. KPU Kota Malang gencar menjalankan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara menggandeng media elektronik, media cetak, pemanfaatan jaringan sosial media, dan KPU Kota Malang juga mengoptimalkan peran Relawan Demokrasi (Relasi) dalam setiap kegiatan sosialisasi yang terbagi dalam 5 kelompok sasaran yaitu segmen pemilih pemula, perempuan, agama, pinggiran dan disabilitas. Ragam model kreatifitas sosialisasi dengan Relasi tidak hanya terbatas pada konsep sosialisasi tatap muka (dialogis/seminar/FGD. Tetapi juga memanfaatkan jaringan dan moment.

Ketiga peran Partai Politik yang tertera dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwan tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a.. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang b.. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c.. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang berperan serta dalam kegiatan politik. Kegiatan politik tentu mempunyai keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat

menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilih para wakil rakyat melalui pemilu legislatif baik legislatif tingkat pusat maupun pada tingkat daerah serta pemilu kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah. Pada PILKADA Kota Malang Tahun 2013 lalu terdapat 6 partai yang mengusung calon masing-masing yaitu PDIP, GOLKAR, PAN, DEMOKRAT, PKS, HANURA, PKPB, GERINDRA, PKB, Dll. Dimana, dari berbagai partai dimenangkan oleh pasangan dari Partai PKB dan Gerindra yang berkoalisi. Oleh sebab itu, partai juga berperan penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, karena suara mereka dibutuhkan oleh partai untuk memenangkan calon yang diusungnya. Menutup mata dari kepentingan tersebut, aktivitas dari partai sangatlah efektif dalam hal mengumpulkan jumlah suara, oleh sebab itu perlu dilihat aktivitas apa yang dilakukan oleh partai untuk menarik perhatian masyarakat terhadap calon yang diusung oleh partainya.

Keempat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga non pemerintahan yang berorientasi pada kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, guna membantu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Menurut Budi Setyono dalam Friska Mahardika (2012: 13) LSM merupakan lembaga/organisasi non-pemerintahan yang berbasis pada gerakan moral (moral force). yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Sedangkan Menurut Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat;

“Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.”

Kelima, peran Media Massa yang menjadi tombak tersebarnya informasi kepada khalayak ramai. Media massa yang juga dikatakan sebagai Pers diartikan dalam pengertian Pers menurut Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia. Gazali (2004: 54) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara politik dengan media, sebab media tidak hanya mampu menyampaikan berbagai informasi yang harus diketahui oleh khalayak saja, namun media massa juga mampu mempengaruhi sikap, opini, dan keyakinan individu mengenai proses-proses politik, kekuasaan, dan legitimasi melalui berbagai pemberitaan yang disampaikannya. Peran media massa baik sebagai sumber informasi maupun sebagai sarana partisipasi politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Thomas (2009: 112) dan Yuniati (2002: 85) dalam Diah dan Samsuri (2015: 19) menyatakan hal yang sama bahwa media massa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam

pembentukan kognisi seseorang. Media memberikan informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi. Persepsi ini menjadi patokan dari sebuah tindakan seperti misalnya tindakan pengungkapan opini maupun kritikan ataupun persepsi sebagai respon aktif terhadap berbagai permasalahan publik.

Tabel. 1 Data Pemilu dan Pilkada Kota Malang

PEMILUKADA, PILEG, & PILPRES					
TINGKAT PARTISIPASI					
NO	TAHUN	KEGIATAN	TINGKAT PARTISIPASI		
			PILKDADA	PILEG	PILPRES
1	2004	PILEG & PILPRES		75.64	74.29
2	2008	PILKADA	70.48		
	2009	PILEG & PILPRES		65.74	73.84
3	2013	PILKADA	64.89		
	2014	PILEG & PILPRES		68	72.93

PEMILIH					
NO	TAHUN	KEGIATAN	JUMLAH PEMILIH		
			PILKDADA	PILEG	PILPRES
1	2004	PILEG & PILPRES		593,172	586,243
2	2008	PILKADA	560,652		
	2009	PILEG & PILPRES		572,777	590,032
3	2013	PILKADA	614,928		
	2014	PILEG & PILPRES		621,573	630,023

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Peranan dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sangatlah diharapkan, melihat jumlah partisipan di Kota Malang tidak mencapai target nasional. Berdasarkan target nasional yang diumumkan oleh KPU Pusat bahwa jumlah partisipasi masyarakat ditargetkan untuk mencapai 70% jumlah partisipan. Berdasarkan data KPU Kota Malang mencermati tiga pemilu terakhir, antara tingkat partisipasi Pemilihan Presiden (2004 : 74,29%, 2009: 73,84 % dan 2014 : 72,93%) dengan partisipasi Pileg (2004 : 75,64 %, 2009 : 65,74 % dan 2014

: 68 %), sedangkan untuk partisipasi Pilkada justru mencapai tingkat partisipasi yang lebih rendah yaitu (2008: 70,48% dan 2013: 64.89%). Untuk Pemilihan Presiden partisipasi mengalami penurunan, begitu pula dengan Pileg dan Pilkada.. Dengan demikian perlu adanya upaya-upaya dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mempengaruhi masyarakat agar menggunakan hak suaranya serta menyadarkan masyarakat akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Pada studi politik, terdapat pendekatan *behavioralism* dan *new institutionalism*. Kedua pendekatan tersebut memiliki sudut pandangnya masing-masing terhadap aspek penelitiannya dalam politik. Pendekatan behaviorisme menurut David Easton dalam SP. Varma (2007; 71) mengatakan behaviorisme menekankan bahwa data yang diakui adalah yang validitasnya didasarkan atas observasi, yang diperoleh melalui paca indra atau peralatan mekanis. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa Behaviorisme merupakan suatu teori politik yang menilai fenomena dengan menekan pada pendekatan ilmiah secara realitis. Sedangkan pendekatan *new institutionalism* pada pendekatan ini institusi dalam keterlibatannya pada politik dijelaskan secara lebi khusus sebagai aturan main dalam masyarakat atau alat yang membatasi manusia dalam berinteraksi. Senada dengan hal tersebut Hall dan Taylor (1996:6) dalam Fajar (2016: 140) merumuskan secara umum institusi sebagai prosedur-prosedur, rutinitas, norma-norma dan beragam konvensi yang telah mengakar dalam struktur keorganisasian proses pemerintahan dan politik ekonomi.

Berdasarkan pemaparan diatas, mempertanyakan sejauhmana peran para pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

perpolitikan khususnya pada Pemilu sangatlah perlu. Hal tersebut untuk melihat peran pemangku kepentingan sebagai *ceck and balance* dari berjalannya negara yang demokratis. Dimana pada Pemilu terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan salah satu wujud dari sistem Pemilu yang diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floating mass* (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. Pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Peran Pemangku Kepentingan (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dan Media Massa. dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemangku kepentingan (Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa) dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat agar meningkat pada pemilihan Kepala Daerah Kota Malang tahun 2018

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan pengaruh yang ditimbulkan dari peran pemangku kepentingan (Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa. dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah Kota Malang tahun 2018.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi wacana keilmuan politik khususnya pada peran Pemangku kepentingan (Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa. dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masu
- b. kan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran (Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa. dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
- c. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang peran (Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik,

Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa. dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

- d. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan akademisi dan para aktor yang terlibat dalam (Komisi Pemilihan Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa. untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis, maka penulis dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yaitu peran Pemangku kepentingan (Bakesbangpol, KPU, Partai Politik, LSM, dan Media Massa. dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan paparan dan uraian teori sebagai landasan yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam penelitian ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah

didapat oleh peneliti di lapangan. Teori yang dipakai dalam kajian pustaka diantaranya ialah: Teori Pendekatan *Behavioralism* dan *New Institutionalism*, Sistem Politik, Teori Peran, Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Peran Komisi Pemilihan Umum, Peran Partai Politik, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat, Peran Media Massa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, lokasi dan subject penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai lokasi dan situs penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian dan menyajikan data-data hasil penelitian. Serta menyajikan data umum yang merupakan gambaran obyek penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian yaitu terkait peran pemangku kepentingan (Bakesbangol Kota Malang, KPUD Kota Malang, Partai Politik, LSM, dan Media Massa) Studi pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari bab pembahasan yang ada serta keseluruhan dari rangkaian penelitian skripsi yang telah dilakukan disertai saran-saran yang direkomendasikan dengan harapan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pendekatan Behavioralism dan New Institutionalism

1. Behavioralis

Dalam *studi* ilmu politik, terdapat teori pendekatan behavioralism yang lahir dari adanya kritik terhadap pendekatan tradisionalisme. rangkaian kritik dan respon dari kaum behavioralisme sebagai akibat dari ketidakmampuan kaum tradisionalisme dalam menangkap realitas yang berkembang dalam suatu masyarakat serta sifat deskriptif dalam penelitian. Behavioralis mampu menggeser pendekatan tradisional karena terdapat dua persoalan mendasar yang tengah dihadapi. Muhtar Haboddin (2016; 20) mengatakan Greisez Kweit dan Robert W Kweit dalam bukunya Konsep dan Metode Analisis Politik menyebutkan yaitu selama periode Perang Dunia ke II telah mulai ada reaksi terhadap aspek-aspek legal pemerintahan dan kekuatan pragmatisme yang berpengaruh kuat dalam ilmu politik. Pada masa itu ada beberapa kekuatan intelektual yang cenderung mendorong ilmu politik menjauh dari studi yang semata-mata legalistik-normatif maupun dari teori murni normatif dan deduktif yang menjadi pusat perhatian disiplin pada abad ke-19. Kemudian, pragmatisme yang menitikberatkan bahwa ide-ide dan tindakan-tindakan hanya dapat di evaluasi melalui hasilnya, bukan melalui logikanya, konsistensinya dan seterusnya.

Melihat dari fenomena diatas, pendekatan tradisional dapat dianggap hampa, terlalu formalistis dan statis karena tidak memberikan penekanan yang memadai

kepada peneliti-peneliti tentang proses suatu konsep yang sejak itu telah diserap ke dalam ilmu politik yang bersifat behavioral. Disisi lain kaum behavioralis mulai membuat metode-metode yang bersifat kuantitatif. Hal ini membuat mereka mampu menguraikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara lebih lengkap, serta memecahkannya dengan penafsiran secara lebih akurat. Tetapi juga, diarahkan menciptakan teori eksplanasi dan prediksi, yaitu teori yang bisa menjelaskan dan meramalkan. Pendekatan behavioral juga secara terang-terangan menyerukan suatu pendekatan yang lebih empirik yang sistematis, termasuk perluasan skema-skema yang bersifat klasifikasi, konseptualisasi pada beragam tingkat abstraksi, penyusunan hipotesis dan pengujian hipotesis melalui data empirik.

Pandangan behavioralist ialah masalah pokok ilmu politik harus di batasi pada fenomena yang diamati dan diukur secara independen (Haboddin, 2016: 23). Ini mengasumsikan bahwa lembaga-lembaga politik yang mendasari sebagian besar mencerminkan kekuatan social dan bahwa studi politik harus dimulai dengan masyarakat, budaya, dan opini public. Untuk tujuan ini, behavioralis menggunakan metodologi ilmu-ilmu social (terutama psikologi) untuk membangun hubungan statistik antara variable independen (dianggap penyebab. dan variable dependen (di perkirakan efek).

Behavioralism dalam ilmu politik berusaha untuk membuang intuisi, atau setidaknya untuk mendukung dengan pengamatan empiris, berbeda dengan seorang tradisionalis, mereka selalu berusaha untuk mendukung intuisi dengan alasan mereka sendiri. Behavioris mengkritik tradisionalis karena tidak ilmiah, karena tradisionalis tidak menggunakan metode statistik. Mereka juga percaya bahwa etika

dan pertimbangan nilai tidak memiliki tempat dalam penelitian, karena mereka bersifat subjektif dan etnosentris yaitu, mereka muncul dari budaya tertentu, dan karena itu tidak universal. Behaviorism dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk menerapkan metode-metode ilmu-ilmu alam pada perilaku manusia, serta sebagai penekanan pada kuantifikasi. Menurut Muhtar Haboddin (2016; 22):

“Behaviorism pada perkembangannya, dipahami sebagai suatu pendekatan yang menggunakan konsep revolusi untuk membantu menjelaskan semua referensi yang berbau data subjektif, suasana hati, gerakan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan, emosi maupun ide-ide dari penelitian yang dipandang ilmiah, serta persuasi atau protes untuk menggambarkan apa yang ditunjukkan riset perilaku politik.”

Dengan kata lain, tujuan riset behaviorisme adalah untuk menjelaskan tingkah laku politik individu maupun kelompok yang sesuai seperti pada tampaknya dan akibat dari proses yang dikerjakan. Perlu pula ditambahkan bahwa behaviorisme tidak hanya menyangkut tindakan-tindakan politik yang diobservasi tetapi juga persepsi, motivasi, dan komponen tingkah laku lainnya yang menunjukkan identitas politik, tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan seseorang atau sekelompok orang serta sistem-sistem kepercayaan.

David Easton dalam SP. Varma (2007; 73-80) basis keyakinan atau kredo pada sarjana ilmu politik yang menganut paradigma behaviorisme digolongkan sebagai berikut:

1. *Keteraturan*, sarjana politik percaya jika perilaku politik manusia dapat diamati secara teratur karena perilaku tersebut menunjukkan kesamaan. Dengan demikian generalisasi ataupun teori-teori dapat mempunyai makna atau nilai eksplanatif dan prediktif

2. *Verifikasi*, kesahihan generalisasi atau sebuah teori haruslah secara prinsipil dapat diuji, tentu saja yang berkaitan dengan perilaku yang relevan dengan generalisasi atau teori yang bersangkutan.
3. *Techniques*, artinya cara untuk memperoleh dan menginterpretasi data tidaklah dilakukan dengan begitu saja. Data harus diamati dengan seksama dengan melibatkan metode dan teknik yang cermat, terutama dalam pengamatan, pencatatan, dan analisis perilaku.
4. *Kuantifikasi*, ketepatan dalam mencatat dan mempresentasikan data mengharuskan adanya pengukuran dan kuantifikasi dengan cara yang sangat obyektif
5. *Nilai-Nilai*, sistem nilai dan eksplanasi yang empirik haruslah dapat dipisahkan. Oleh karena itu netralitas dalam mengadakan eksplanasi sangat diperhatikan.
6. *Sistematik*, penelitian haruslah dilaksanakan secara sistematis. Artinya haruslah ada hubungan yang jelas dan erat antara teori dan riset, karena riset yang tidak diarahkan oleh teori dapat bersifat trivial (sepele., sebaliknya teori yang tidak didukung oleh data akan tidak ada artinya.
7. *Ilmu Murni*, penggunaan ilmu pengetahuan merupakan bagian dari usaha ilmiah. Akan tetapi pemahaman dan eksplanasi dari perilaku politik hendaklah mengawali atau sebagai basis bagi usaha untuk menyelesaikan masalah yang taktis dalam kehidupan masyarakat.
8. *Integrasi*, karena ilmu sosial berhubungan dengan keseluruhan kehidupan manusia, penelitian politik dapat tidak memperhatikan temuan-temuan dari disiplin ilmu.

Delapan dasar kerja dan keyakinan memperkaya pendekatan ini sehingga, dalam usahanya mengumpulkan data berjalan maju dengan pesat. Para ilmuwan behavioralis begitu antusias mempelajari banyak aspek yang semula tidak tertangkap dalam pengamatan mereka. Bahkan analisisnya pun bergeser dari lembaga ke manusia atau pelaku (aktor), dari struktur ke proses. Para penganut

pendekatan ini tidak hanya mempelajari lembaga-lembaga, tetapi juga manusia-manusia dalam lembaga itu, bagaimana mereka menjalankan tugasnya, dan bagaimana mereka memandang perilaku mereka sendiri. Dalam rangka itu pula, muncul penelitian mengenai rekrutmen politik, kepemimpinan, masalah perwakilan, dan lain sebagainya.

2. New Institutionalism

Akar ilmu politik adalah pada studi tentang lembaga, kelembagaan negara, birokrasi, dan kebijakan publik, yang seluruhnya dilihat dalam kerangka kelembagaan. Tetapi pada periode pasca Perang Dunia II, disiplin ilmu politik, terutama di Amerika Serikat, telah mengkritik studi tentang lembaga-lembaga tersebut dengan berkembangnya dua pendekatan yang lebih didasarkan pada asumsi individualistik yaitu, behaviorisme dan pilihan rasional. Kedua pendekatan ini mengasumsikan bahwa individu bertindak secara otonom sebagai individu, baik berdasarkan karakteristik sosio-psikologis atau perhitungan rasional untung rugi oleh individu. Institusionalisme Baru (new institutionalism) merupakan penyimpangan dari Institusionalisme Lama. Institusionalisme Lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu Institusionalisme Baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Institusionalisme Baru (new institutionalism) sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioris yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintahan sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh

para aktor serta pilihannya. Tahun 1980-an, perhatian terhadap lembaga formal dan non-formal pada sektor publik dan bagaimana peran penting struktur, mulai tumbuh kembali. Penjelasan kelembagaan digunakan dalam studi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, dan juga memperhatikan perilaku pada tingkat individu. Bergesernya pemahaman tersebut karena banyak fakta menunjukkan bahwa alasan tindakan politik individu justru muncul karena perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang ada di masyarakatnya. Individu justru dipengaruhi oleh institusi formal maupun informal yang tanpa sadar memberikan preferensi dalam melakukan suatu tindakan.

Kondisi diatas mendorong digunakannya pendekatan institutionalis baru (new institutionalism). Dalam hal ini institusi didefinisikan secara spesifik sebagai aturan main dalam masyarakat atau alat yang membatasi manusia dalam berinteraksi (North 1990:1). Sedangkan secara umum Hall dan Taylor dalam Ramadhan dan Wahyudi (2016: 140) merumuskan institusi sebagai prosedur-prosedur, rutinitas, norma-norma dan beragam konvensi yang telah mengakar dalam struktur keorganisasian proses pemerintahan dan politik ekonomi Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, institusi tidak hanya sebatas pada kelembagaan organisasi yang bersifat struktural saja tapi memiliki makna lebih mendalam yang menyentuh aspek aturan main maupun peraturan yang dimiliki oleh suatu lembaga sehingga bisa bertahan dalam waktu yang lama dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dalam upaya mempengaruhi masyarakatnya. Lebih jauh lagi, Hall dan Taylor dalam Ramadhan dan Wahyudi (2016: 140) menegaskan bahwa titik sentral dari analisis institusi adalah menjawab pertanyaan “Bagaimanakah institusi

mempengaruhi perilaku dari individu?” Pada akhirnya melalui tindakan-tindakan individu, institusi dapat melihat manfaat politis dari aturan main maupun peraturan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakatnya.

3. Perbandingan Behavioralism dengan New Institutionalism

Dua teori pendekatan studi politik diatas memiliki arahnya masing-masing sebagai object penelitian. Sebagai perbandingan berikut analisis penulis berdasarkan penjelasan diatas;

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Behavioralism dan New Institutionalism

Komparasi	Behavioralism	New Institutionalism
Pendekatan	a. Individu dan Kelompok (Massa. b. Metode-metode yang bersifat; a) Empirik b) Sistematis c) Klasifikasi d) Konseptualisasi	c. Lembaga d. Interaksi antar aktor e. Agenda preverensi individu dan organisasi
Referensi	a. Data Subjektif b. Tujuan-tujuan c. Ide-ide/emosi d. Keinginan	a. Kajian sistem b. Analisis aspek <i>historical</i>
Subject Penelitian	a. Motivasi b. Persepsi	a. Individu atau kelompok dalam organisasi

Komparasi	Behavioralism	New Institutionalism
	c. Komponen tingkah laku politik seperti; tuntutan dan harapan d. Pembentukan teori baru	b. Memiliki arah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi
Fokus Penelitian	Perilaku politik individu	Peran lembaga dalam mempengaruhi perilaku politik individu
Analisis Wacana	Mengapa individu tampak berperilaku politik seperti tampak pada tingkanya, dan mengapa sebagian akibatnya proses-proses dan sistem-sistem politik berjalan seperti yang mereka kerjakan.	Bagaimana institusi akan mempengaruhi perilaku dari individu.
Sifat	Bebas dari nilai dan nilai individu peneliti.	Memiliki batasan yang disepakati secara kolektif.

Sumber: Analisis Peneliti

Ajaran behaviorism menekankan pada penemuan keteraturan, generalisasi melalui hukum dan terfokus pada kausalita. Behaviorism bertujuan pada rekomendasi praktis dan pemecahan masalah. Pengetahuan dan kebenaran tidak dicari untuk kepentingan mereka sendiri. Pengetahuan ini hanya memiliki nilai instrumental, bukan nilai intrinsik. (dalam pengertian yang lebih spesifik,

Instrumentalisme menyangkal bahwa teori-teori ilmiah memiliki nilai-nilai kebenaran). Behavioralism terdiri dari dua tradisi penelitian yaitu teori empiris dan teori umum. Teori empiris bias dibagi menjadi orang-orang yang berfokus pada individu-individu yang tepat (pemungutan suara, pendapat umum) dan mereka yang mengikuti pendekatan kelompok. Mereka yang mengikuti teori umum, di sisi lain, dapat dibagi ke dalam berbagai bentuk teori-teori sistem umum, analisis system, dan fungsionalisme.

Dari analisis diatas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya teori pendekatan behavioralis merupakan suatu metode penelitian politik yang mampu bersanding dengan penelitian ilmiah ilmu alam karena metode-metode yang digunakan bersifat kuantitatif. Pendekatan ini lebih mengarah pada perilaku individu dalam partisipasi politiknya dan menilai bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik sebenarnya. Menurut penulis dari analisis tersebut pandangan behavioralis mengatakan lebih bermanfaat untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati.

Berbanding dari behaviorisme, new institutionalism ini lebih melihat pada aspek institusi/lembaga formal yang akan memengaruhi perilaku heterogen (masyarakat luar) dan individu-individu itu sendiri. Inti dari pandangan new institutionalism adalah adanya pembatasan dalam sebuah proyek yang sesuai dengan konteks dan dibatasi secara kolektif. Pembatasan tersebut terdiri dari institusi-institusi, seperti pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial serta perilaku dari mereka yang memegang peran itu.

Pembatasan tersebut pada dasarnya memberi keuntungan bagi individu dan kelompok dalam mengejar tujuan masing-masing. Hal itu disebabkan, karena faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok juga mempengaruhi pembentukan prefensi dan motivasi dari individu dan kelompok itu sendiri. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai tindakan dan pilihan masa lalu. Pembatasan ini mewujudkan, memelihara dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing. Berkaitan dengan tema yang menjadi dasar tulisan, penulis memfokuskan pendekatan pada New Institutionalism untuk melihat peran dari lembaga-lebaga yang berperan aktif dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Pendekatan Institusionalisme Baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan intitusi berinteraksi.

B. Sistem Politik

1. Pengertian Sistem Politik

Manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya dapat dikatakan hidup bermasyarakat. Setiap hubungan atau proses yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat unsur politik yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang menurutnya baik. Contohnya, masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik karena sering menghadapi terbatasnya suatu sumber daya yang menjadi kebutuhan, sehingga perlu dicari cara distribusi agar masyarakat merasa bahagia dan puas adalah politik pada lingkup kecil atau kelompok masyarakat. Politik dalam lingkup negara berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), kebijakan publik (*public policy*), pengambilan

keputusan (*decision making*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*) (Mirriam Buadiarjo, 2010;14). Politik yang baik, dapat tercapai apabila terdapat sistem yang baik pula untuk menjalankannya.

Secara garis besar sistem politik dapat diartikan sebagai berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara.. Rober A. Dahl dalam Budi Winarno (2007;92) mengatakan sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang sampai dengan tingkat tertentu. Sistem politik dengan demikian dapat menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan yang mulia.

Indonesia menganut sistem politik Trias Politika, yaitu adanya lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Adanya pembagian kekuasaan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tercantum pada Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab IV tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Sedangkan, kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Badan Kehakiman lainnya.

2. Partisipasi Politik

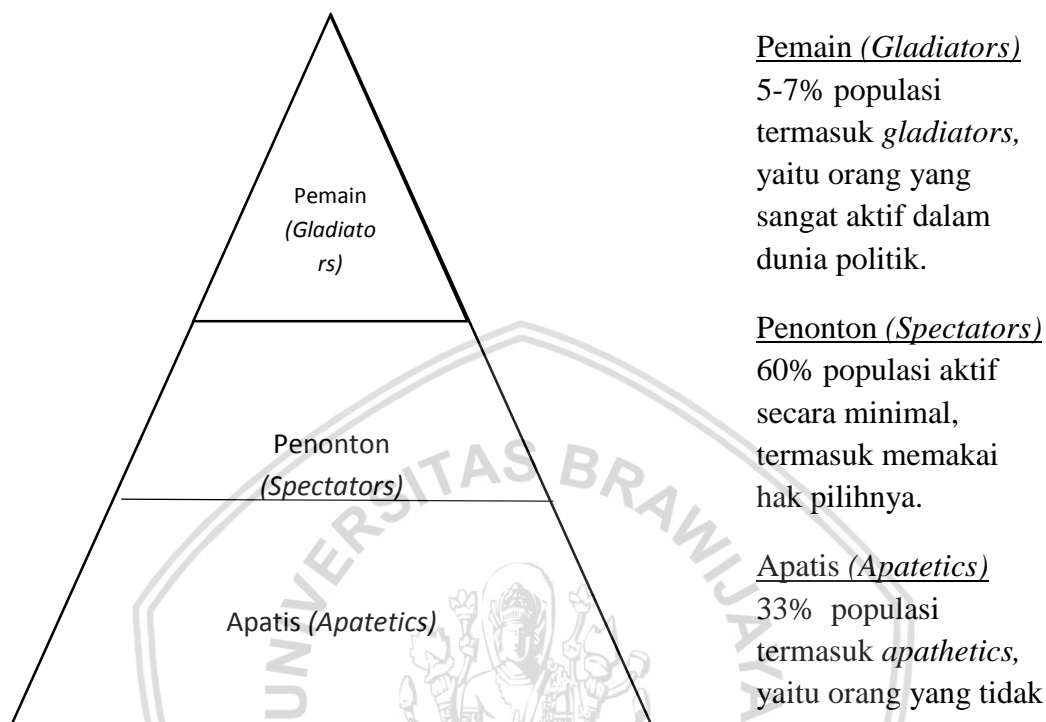
Partisipasi politik sendiri merupakan kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Herbert MacClosky mengatakan bahwa partisipasi politik adalah

kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum Mirriam Budiardjo (2010;367).

Mulanya studi partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada suatu partai sebagai aktor utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik seperti dalam hal keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum selain dalam partisipasi pada pemilu. Secara umum dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Mereka disyaratkan mempunyai pengetahuan mengenai tatacara dalam mempengaruhi pemerintah bahkan memberikan alternatif solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Dalam hal ini, mereka tetap mengikuti tatacara yang diatur oleh negara. Conway dalam Moch. Nurhasim, dkk (2014; 10) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi keputusan politik dan sebagai alat untuk mencapai kebijakan politik yang diinginkan. Selain itu, Kaase dan Marsh pada sumber yang sama mengatakan bahwa partisipasi politik berhubungan erat dengan elemen sebuah negara demokrasi seperti rasionalitas, kontrol, responsiveness, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik.

Moch. Nurhasim, dkk (2014; 10) terdapat istilah dalam studi partisipasi politik, yaitu *voter turnout* yakni, berupa keterlibatan dalam keanggotaan partai politik dan hasil suara dalam pemilu. Di negara-negara demokrasi umumnya menganggap bahwa lebih banyak tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu (voter

turnout) menunjukkan demokrasi pada negara tersebut sudah berjalan dengan baik dan tetap dipercaya oleh warga negara. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa warga negara terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, baik yang aktif maupun yang pasif. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu menunjukkan sejauhmana proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, di mana warga negara yang memiliki hak dan kedaulatan diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya, ada anggapan bahwa rendahnya partisipasi politik di suatu negara dianggap kurang baik bagi demokrasi karena memperlihatkan kurangnya perhatian dan kepedulian warga negara pada masalah politik. Gejala a-politik memang bukan semata-mata dipengaruhi oleh warga yang tidak peduli pada masalah politik, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kekecewaan politik, ketidakpercayaan, ketidaktahuan manfaat dari partisipasinya, serta peran-peran lembaga yang kurang agresif dalam berperan meningkatkan partisipasi. Milberth dan Goel dalam Mirriam Budiardjo (2010; 372) memperlihatkan piramida pola partisipasi masyarakat Amerika yang dibagi dalam tiga kategori yaitu; a. Pemain (Gladiators), b. Penonton (Spectator), dan c. Apatis.



Gambar. 1 Piramida Partisipasi Politik Masyarakat

Sumber: Miriam Budiardjo (2010:372)

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi pimpinan atau pemerintah. Jadi, dalam negara demokrasi merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan mereka yang berwenang untuk membuat

keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (Miriam, 2008: 368-369).

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa banyak partisipasi masyarakat maka partisipasi politik tersebut lebih baik. Tingginya angka untuk ikut berpartisipasi dalam politik dapat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik yang sedang terjadi. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik rendah, maka dalam sebuah negara demokrasi hal tersebut dianggap kurang baik atau dengan kata lain kepekaan masyarakat dalam masalah politik dan kenegaraan sangat kurang. Jika partisipasi politik dalam sebuah negara rendah hal terburuk adalah pemerintah akan kurang tanggap terhadap aspirasi serta kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dan cenderung untuk menanggapi kebutuhan dari kelompoknya saja. Pada umumnya partisipasi yang dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

C. Teori Peran

Teori Peran dan Peranan Istilah peran sudah sering kita dengar dan kita ucapkan, kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan *role expectation*, yaitu harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya. Harapan dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan atau posisi tersebut.

Menurut Soekanto (2002: 268) peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peranan berasal dari kata peran, yang sebelumnya telah dijelaskan pengertiannya. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, memiliki definisi yaitu : suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2002:441) unsur-unsur peranan atau role model adalah sebagai berikut:

- a) Aspek dinamis dari kedudukan
- b) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

D. Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

John Rehfuss dalam (Irfan, 2009;105) mengatakan bahwa politik yang merupakan perjuangan untuk mengalokasikan nilai-nilai dan sumber-sumber sosial secara erat disejajarkan dengan kegiatan administrasi. Bakesbangpol merupakan SKPD yang ada ditingkat kabupaten/kota. Melalui bakesbangpol, Pemerintah Daerah tengah mengupayakan peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden (pilpres),

pemilihan umum legislatif (pileg), maupun pemilihan umum kepala daerah (pilkada.. Bakesbangpol memiliki Tupoksi untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Menurut Sudjiono (1995:74-79) menyebutkan bahwa pemberian suara dalam kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik yang terbiasa, yang seringkali lebih luas dibandingkan dengan partisipasi politik lain. Kegiatan partisipasi politik ini meskipun hanya menyangkut pemberian suara, sebenarnya juga menyangkut semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja untuk membantu pemilihan, membantu ditempat pemungutan suar, mencari dukungan untuk calon, dan tindakan-tindakan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat memperngaruhi hasil pemeriksaan. Susanto (1992:45) Sosialisasi politik memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi tersebut. Berikut adalah faktor dalam proses penunjang sosialisasi politik:

1. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran.
2. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
3. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, mass-media, individu dan kelompok.

Micael Rush dan Philip Althoff (2002,37), mengatakan bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur kegiatan yang mempengaruhinya. Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh :

1. Agen sosialisasi politik yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
2. Materi sosialisasi politik yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.
3. Mekanisme sosialisasi politik, dibagi menjadi tiga yaitu, imitasi, instruksi, motivasi.
4. Pola sosialisasi politik yang terus berkesinambungan, untuk mengetahui proses sosialisasi, yang terdiri dari Badan atau Instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi.

2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagaimana telah banyak diberikan dan disinggung oleh publik di Indonesia, rata-rata tingkat partisipasi pemilih dari satu pemilu dengan pemilu lainnya tidaklah sama. Menurut data KPU dalam Partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 berjumlah 72 persen, tidak terlalu jauh berbeda dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2009. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh tim peneliti dari data resmi KPU untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebenarnya rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional cukup tinggi, sebesar 72 persen. Sementara angka partisipasi Pilpres 2014, angka partisipasi tingkat nasional lebih rendah dari angka partisipasi Pileg 2014, sekitar 69,58 persen. Angka partisipasi ini juga meleset dari target KPU sebesar 75 persen.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPUD memiliki peran utama meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”. KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu :

- a. Melalui komunikasi tatap muka, yang dapat berupa bentuk diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, pendidikan pemilih, ceramah, dan simulasi.
- b. Komunikasi melalui media, hal ini dilakukan dalam bentuk tulisan, gambar, audio, visual, website, iklan, *talk show*, dan debat kandidat. KPUD juga memuat serta memperbarui berita-berita terkait pilkada di *website* kpud.
- c. Melalui mobilisasi sosial yang dapat dilakukan melalui himbauan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dan sekolah.

3. Peran Partai Politik

Menurut Miriam Budiarjo dalam Dasar-dasar Ilmu Politik mengatakan bahwa partai politik berangkat dari anggapan bahwa membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan, dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sedangkan menurut Giovanni

Satori dalam Siahaan (2016) partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Menurut Gaffar dan Amal dalam Fajar (2013:18), dalam kepustakaan ilmu politik sering dikemukakan bahwa parpol mempunyai peranan yaitu:

- a. Dalam proses pendidikan politik
- b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi pelbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara.
- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat.
- d. Sebagai penghubung antara penguas dan rakyat.

Menurut Clark dalam Research Center For Politic and Goverment (PolGov) (2018: 05) parpol juga memiliki peran penting untuk mengaitkan (linkage. antara rakyat dan pemerintahan. Paling tidak terdapat enam model keterkaitan yang diperankan parpol, yaitu :

1. participatory linkage (hubungan partisipan), yaitu ketika partai berperan sebagai agen dimana warga biasa berpartisipasi dalam politik.
2. Electoral linkage (hubungan pemilih), dimana pemimpin partai mengontrol berbagai elemen dalam proses pemilihan.
3. Responsive linkage(hubungan timbal alik), yaitu ketika partai bertindak sebagai agen untuk meyakinkan bahwa pejabat pemerintah bertindak responsive terhadap pemilih.
4. Clientelistic linkage (hubungan klien), yaitu pada saat partai bertindak sebagai sarana memperoleh suara.

5. Directive linkage (hubungan petunjuk), yaitu pada saat partai berkuasa mengontrol tindakan warga.
6. Organizational linkage (hubungan organisasi), yaitu pada saat terjadi hubungan antara elit partai dan elit organisasi dapat membolisasi atau “mengembosi” dukungan suatu parpol.

Menurut Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo (2008: 403), fungsi dari parpol terbagi menjadi empat. Pertama, tugas utama parpol adalah mengatur kehendak umum yang kacau. Partai-partai adalah perantara ide-ide dan selalu menjelaskan, mensistematisasikan dan menerangkan ajaran partai. Partai adalah wakil dari kelompok-kelompok kepentingan sosial, menjembatani jarak yang terdapat antara orang-seorang dan masyarakat luas. Kedua, partai-partai mendorong para pemilih untuk memilih sekurang-kurangnya yang paling kurang buruknya dari dua hal yang buruk, dan dengan demikian memaksakan perbedaan-perbedaan politik disalurkan dalam saluran utama saja atau dikenal dengan pengertian mendidik warga Negara untuk bertanggung jawab secara politik. Ketiga, menjadi penghubung antara pemimpin dan pengikut, merupakan suatu keharusan dalam komunikasi dua arah yang ada dalam system demokrasi itu. Merupakan tugas dari partai untuk menjaga agar saluran komunikasi ini tetap terbuka dan jelas. Tugas seperti itu menjadikan partai, kalau tidak sebagai penguasa, sekurang-kurangnya sebagai pengendali pemerintah dalam suatu Negara demokrasi perwakilan. Keempat, memilih para pemimpin. Di sini sebagaimana juga di tempat-tempat lain dalam Negara demokrasi, pola bersainglah yaitu memilih antara sekurang-kurangnya dua oligarki, yang menjamin mutu dari kepemimpinan. Pemilihan pemimpin seperti itu

tentu saja mengasumsikan adanya suatu public yang mempunyai pikiran terbuka, public yang memnuhi syarat untuk membuat pilihan yang benar, dan adanya suasana intelektual yang cocok untuk berfungsinya partai-partai yang demokratis. Kalau berbagai persyaratan seperti itu suda tidak ada lagi, maka timbullah krisis demokrasi.

Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.” Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan:

“partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melaui optimalisasi organisasi sayap partai.

Berdasarkan pasal diatas, dapat diartikan sebagai berikut;

- a. Sosialisasi kepada kader-kader partai. Setiap kader diharuskan mengajak orang-orang untuk menggunakan hak pilihnya.
- b. Pendidikan politik kepada partai dan masyarakat. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan membuat agenda setiap tahunnya.
- c. Optimalisasi organisasi sayap partai untuk membantu mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat lebih banyak. Organisasi sayap partai mewadahi kepentingan-kepentingan masyarakat diluar kepentingan politik. Namun, dalam pilkada suara mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik partai dan masa yang dimiliki sayap partai dapat secara langsung meningkatkan partisipasi politik.

4. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa disingkat LSM mulai berkembang pada era orde baru sekitar tahun 1970an. pertumbuhan dan peran LSM di Indonesia semakin berkembang seiring dengan menguatnya proses demokrasi yang ditandai dengan penguatan masyarakat sipil (civil society) dalam transformasi pembangunan (Praja, 2009:01). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang sering disebut dengan nama lain Non Government Organization (NGO) atau Organisasi non Pemerintah (Ornop) atau organisasi masyarakat sipil (Civil society Organizations) saat ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan suatu bangsa melalui berbagai macam program dan aktifitas yang dilakukannya. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat;

“Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.”

Indonesia memiliki paradigma LSM reformis yang melihat kondisi sosial ekonomi dan demokrasi berdasarkan tidak berfungsinya elemen-elemen sosial politik yang ada (Arbi Sanit, 1985:67). Paradigma reformis ini, melihat rakyat atau kelompok-kelompok masyarakat kurang memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan. Sebab itu, pendekatan pemecahan masalah identik dengan upaya untuk menyediakan partisipasi dengan model perubahan yang diharapkan berupa perubahan fungsional struktural. Artinya,

Lembaga diharapkan turut andil dalam sebuah pembangunan sosial politik guna memberikan wadah untuk masyarakat turut serta dalam proses politik negara. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990, menyebutkan bahwa terdapat jenis Organisasi Oposisi yaitu organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Organisasi non pemerintah ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah. Artinya, LSM juga dapat sebagai alat control terhadap program dan kebijakan pemerintah yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia menjadi bagian dari salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) yang di Undang-undangkan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian Organisasi Masyarakat (Ormas) yaitu setiap organisasi yang bukan bagian dari organisasi kenegaraan dan bukan pula organisasi bisnis yang didirikan oleh sejumlah warga negara demi mencapai tujuan tertentu yang disebut sebagai "*third sector organization*" (Lewis, 2001:01). Ormas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 diartikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut maka Ormas dapat dikatakan sejajar dengan *civil society organization (CSO)*.

Melalui LSM, masyarakat sipil mendapatkan hak demokrasi secara nyata, dimana kebebasan dasar warga negara seperti bebas berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat kepada publik dapat terpenuhi. Tidak dapat dipungkiri dengan peranannya untuk turut serta dalam pembanguna bangsa LSM tidak dapat melepaskan diri secara penuh atas campur tangan pemerintah. Menurut Ageng Nata Praja (2009: 12) LSM yang berbasis pada gerkan moral memiliki peran penting dalam penyelenggaraan dan kehidupan politik. Oleh karena sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ormas untuk membatasi arah gerak ormas tersebut yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 pasal 59 diantaranya melarang Ormas mengumpulkan dan untuk politik serta dilarang melakukan tindakan permusuhan, penistaan, pemecahbelah, penyalahgunaan, terkait unsur SARA.

5. Peran Media Massa

McQuail (2005: 3) menyatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media massa terdiri dari media cetak (surat kabar, majalah, dan lain-lain) dan media non cetak atau elektronik (radio, TV, internet, film). Untuk membicarakan bagian dari media tadi disebutkan nama media yang bersangkutan. Pengertian Pers menurut UU Pers No. 40 Tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk

lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia.

Fungsi Pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kewajiban Pers tercantum dalam Pasal 5 Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Peran Pers pada pasal 6 poin b yaitu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan. Menurut Gurevitch dan Blumer (1990: 270) dalam Novemelia (2016: 29) terdapat tujuh fungsi media massa dalam partisipasi politik yaitu;

- a. Sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada. Media massa berfungsi sebagai alat kontrol sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun oleh pihak masyarakat. Contoh penyimpangan-penyimpangan seperti praktik KKN oleh pemerintah, penjualan pasir ke Singapura yang mengakibatkan tujuh pulau hilang dan tenggelam (suatu kerugian yang lebih besar dari sekadar perebutan pulau Sipadan dan Ligitan), perilaku masyarakat yang tidak tertib hukum/anarkis, polemik Susno-Polri, dan lain-lain. Berbagai permasalahan sosial tersebut akan membuka mata kita bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

- b. Sebagai pembentuk agenda (agenda setting) yang penting dalam isi pemberitaannya. Pembentukan opini dengan cara pembentukan agenda atau pengkondisian politik sehingga masyarakat terpengaruh untuk mengikuti dan mendukung rencana-rencana pemerintah. Contohnya: wacana pembatasan subsidi BBM untuk sepeda motor, SKPP BibitCandra, dan lain-lain.
- c. Media massa merupakan platform (batasan) dari mereka yang punya advokasi dengan bukti-bukti yang jelas bagi para politisi, jurubicara, dan kelompok kepentingan. Ada pembagian lain dari komunikator politik, yaitu yang disebut dengan komunikator profesional (Carey, 1969). Pembagian ini muncul karena kemajuan-kemajuan dalam dunia teknologi komunikasi. Sehingga ada batasan/pembagian tugas dan peranan penyampaian pesan politik.
- d. Media massa mampu menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat atau diantara pemegang kekuasaan (yang sekarang maupun yang akan datang). Media massa sebagai sarana untuk menampung berbagai pendapat, pandangan, dan paradigma dari masyarakat yang ingin ikut andil dalam membangun sistem politik yang lebih baik.
- e. Media massa merupakan bagian dari mekanisme penguasa untuk mempertahankan kedudukannya melalui keterangan-keterangan yang diungkapkan dalam media massa. Hal ini kerap terjadi pada masa Orba, ketika masa Presiden Soeharto berkuasa yang selalu menyampaikan keberhasilan-keberhasilan dengan maksud agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintahan tersebut harus dipertahankan apabila ingin mengalami kemajuan yang berkesinambungan.

- f. Media massa bisa merupakan insentif untuk publik tentang bagaimana belajar, memilih, dan menjadi terlibat daripada ikut campur dalam proses politik. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan politik bisa disampaikan melalui media massa dengan partisipasi dalam poling jajak pendapat dan dialog interaktif. Hasil dari poling atau jajak pendapat tersebut akan merefleksikan arah kebijakan para politisi. Seperti hasil poling akhir-akhir ini dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat pemilih pada pemilu 2009, mengharapkan pemerintah hasil Pemilu dapat memprioritaskan perbaikan ekonomi. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memilih untuk prioritas pemberantasan korupsi. Hal ini yang menjadi kekhawatiran para aktivis anti korupsi bahwa hasil itu akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah sebagai kecenderungan sebagian besar kelompok masyarakat.
- g. Media massa bisa menjadi penentang utama terhadap semua upaya dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar media massa dan menyusup ke dalam kebebasannya, integritasnya, dan kemampuannya di dalam melayani masyarakat. Fakta-fakta kebenaran yang diungkapkan oleh media massa dapat menyadarkan masyarakat tentang adanya kekuatan-kekuatan berupa terorisme atau premanisme, maupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba mengkaburkan suatu permasalahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomenal yang terjadi agar dapat dipahami dengan bentuk deskripsi. Peneliti berusaha untuk menggambarkan hasil fenomena yang diteliti dengan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk uraian yang menunjukkan peran nyata dari pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Digunakannya metode penelitian kualitatif diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, mendalam, dan bermakna sehingga hasil penelitian dapat tercapai. Karena, dengan pendekatan kualitatif dapat melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah dan mendasar karena orientasinya demikian dan hanya dapat diamati secara langsung di lapangan. Menurut Creswell (2015: 59) untuk mempelajari permasalahan sosial atau manusia peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, dan analisis data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema.

Alasan digunakan metode karena berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu masyarakat (social). Masalah-masalah atau fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat memiliki berbagai macam aspek variabel yang butuh penelitian secara mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dapat dikatakan lebih cocok untuk meneliti fenomena sosial yang membutuhkan kedalaman riset. Denzin dan Lincoln dalam Creswell (2015: 58) mengartikan bahwa penelitian kualitatif mempelajari benda-benda di lingkungan alamiahnya, berusaha untuk

memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang yang diberikan oleh masyarakat kepada peneliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian peranan pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tidak hanya berdasarkan data dan apa yang nampak dipermukaannya saja, tetapi perlu juga mengetahui faktor-faktor penyebab partisipasi politik masyarakat secara mendalam.

Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan strategi studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki secara cermat suatu aktivitas dan program dari lembaga-lembaga pemangku kepentingan dalam menjalankan peran untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Menurut Creswell (2010: 20) penelitian ini secara cermat menyelidiki suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Desain studi kasus dipergunakan untuk memperoleh kedalaman fakta dari fenomena yang diteliti. Salah satu ciri studi kasus yang diutarakan oleh Creswell (2015; 137) adalah memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode kualitatif lebih berfokus pada penggambaran, penjelasan, dan pemahaman atas suatu peristiwa dalam sejarah, dalam rangka pengembangan serta perbaikan teori. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti memfokuskan pada pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami peran penting dari lembaga pemangku kepentingan sehingga perilaku, aktivitas, maupun program mereka mampu memberi dampak kepada partisipasi politik masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:207) batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penetapan fokus dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Selain itu, fokus telah mempermudah peneliti untuk mengetahui secara tepat terkait data yang ada di lapangan. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat:
 - a. Sosialisasi Politikdata
 - 1) Sasaran sosialisasi pemilihan
 - 2) Materi sosialisasi pemilihan
 - 3) Metode sosialisasi
 - b. Pendidikan Politik Bagi Pemilih
 - 1) Sasaran pendidikan politik
 - 2) Metode pendidikan politik
 - c. Kerjasama dengan Pihak lain
 - 1) Alasan pihak lain menjadi partner kerjasama
 - 2) Tujuan melakukan kerjasama
2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat:
 - a. Sosialisasi Politik
 - 1) Sasaran sosialisasi pemilihan

- 2) Materi sosialisasi pemilihan
- 3) Metode sosialisasi
- b. Pendidikan Politik Bagi Pemilih
 - 1) Sasaran pendidikan politik
 - 2) Metode pendidikan politik
- c. Kerjasama dengan Pihak lain
 - 1) Alasan pihak lain menjadi partner kerjasama
 - 2) Tujuan melakukan kerjasama
3. Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat:
 - a. Sosialisasi Kepada Kader
 - b. Optimalisasi Organisasi Sayap Partai
 - c. Pendidikan Politik
 - d. Kampanye Partai
4. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat:
 - a. Pendidikan Politik
 - 1) Sasaran sosialisasi pemilihan
 - 2) Metode sosialisasi
 - b. Sosialisasi Politik berbasis Dakwah
 - c. Kerjasama dengan Pihak lain
 - 1) Alasan pihak lain menjadi partner kerjasama
 - 2) Tujuan melakukan kerjasama
5. Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat:

- a. Pemberitaan
 - 1) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - 2) Program serta Visi dan Misi
- b. Sosialisasi
 - 1) Jadwal Pilkada Kota Malang
 - 2) Tata cara dan Peraturan Pemilihan
- c. Penggiringan Opini dan Propaganda

C. Lokasi dan Situs Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek untuk memperoleh data serta informasi yang valid yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pada lokasi yang telah ditetapkan, peneliti akan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Malang, pemilihan lokasi ini didasarkan pada bentuk masyarakat kota Malang yang telah faham terhadap hak dan kewajibannya dalam partisipasi politik tetapi masih belum mencapai target jumlah partisipasi yang diharapkan oleh KPU.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian ditentukan dengan tujuan agar lokus penelitian tidak meluas. Penelitian kualitatif dalam proses penelitiannya untuk mengambil situs (tempat) lebih mengutamakan situasi sosial sebagai objek, artinya sumber informasi haruslah seseorang yang mengerti akan permasalahan

yang menjadi fokus wawancara penelitian agar lebih mendalam dan valid. Menurut

Sugiono (2014: 62) mengemukakan subjek penelitian bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinyatakan sebagai “*Sosial Situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu, tempat (*place.*, pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin difahami secara lebih mendalam “apa yang terjadi” di dalamnya.”

Dari uraian tersebut peneliti menentukan situs penelitian yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota MALang
3. Partai Politik
 - a. DPC PKB Kota Malang
 - b. DPC Partai Demokrat Kota Malang
 - c. DPD Partai Golkar Kota Malang
4. Organisasi Non-Pemerintahan
 - a. Nahdlatul Ulama Kota Malang
 - b. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang
5. Media Massa
 - a. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Malang
 - b. MHTV Kota Malang
 - c. PT. Kompas Media Nusantara Kota Malang
 - d. Malang Post

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, berikut adalah sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti berdasarkan sumber yang terdapat di lapangan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data utama dari data primer adalah bersumber dari informan. Informan adalah seseorang yang dianggap paham dan mengetahui secara benar tentang objek penelitian. Data yang diperoleh berupa argumen-argumen yang dilontarkan oleh informan yang bersifat objektif melalui tanya jawab berupa wawancara, sehingga nantinya akan memudahkan peneliti guna menghimpun informasi dan data-data untuk dikembangkan. Untuk mendapatkan informasi dan data-data empiris di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang dianggap mengetahui betul peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mengenai penjelasan peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Adapun data primer yang digunakan:

1. Suhardono selaku Sub Bidang Politik, Demokrasi, dan Ham Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

2. Muhammad Seilendra selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.
3. Fajar Kuswardhana selaku Ketua Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Malang.
4. Rudi Nugroho selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golongan Karya (Golkar) Malang.
5. Arif Wahyudi selaku Ketua Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Malang.
6. Asif Budiari selaku Wakil Sekretaris Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Malang.
7. Imam Abda'i selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Malang.
8. Vivi K. selaku Koordinator Teknis MHTv Malang.
9. Dahlia Susandra selaku Kepala Sub Divisi Berita Ulasan dan Dokumentasi RRI Malang.
10. Vandri Battu Koordinator Liputan dan Redaktur Urban Koran Malang Post.

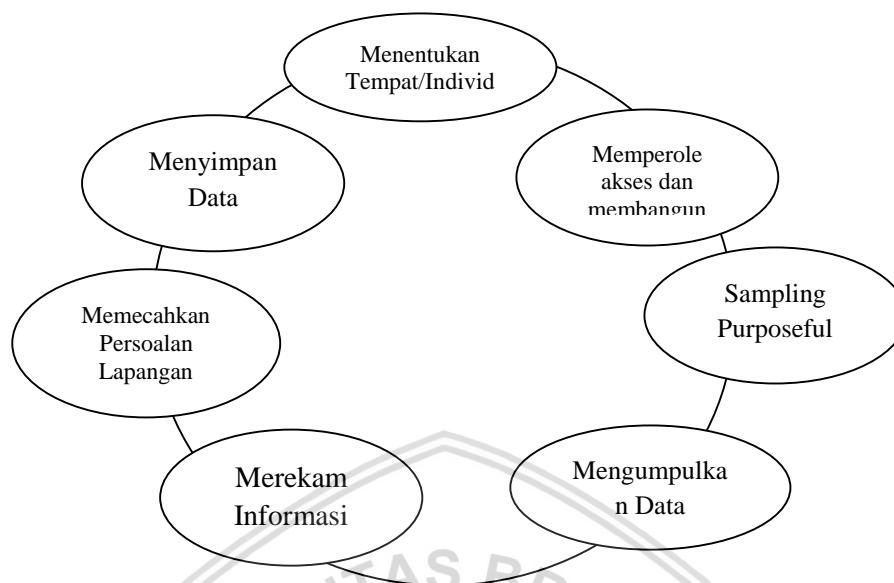
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang

dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, data-data yang terdapat dalam dokumen yang ada pada situs penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan informasi guna menjawab masalah penelitian. Creswell (2015: 207) menggambarkan bahwa pengumpulan data sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul. Aktivitas pengumpulan data yang utama dalam penelitian ialah memilih tempat yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan tersebut akan masuk pada tahap sampling yang dapat menggunakan teknik sampling purposeful seperti yang telah peneliti jelaskan di awal. Berikut aktivitas pengumpulan data yang dikemukakan oleh Creswell:



Gambar 1. Aktivitas-aktivitas Pengumpulan Data

Sumber: John W. Creswell (2015:207)

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk itu diperlukan teknik tertentu dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendekatkan peneliti ke orang-orang yang ditelitinya dan ke situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Dan peneliti dapat masuk ke lingkungan yang ditelitinya atau yang dikenal dengan observasi partisipatif. Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi (Sulistyo-Basuki, 2010:149).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012:118). Melalui wawancara ini pula peneliti menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai peran Pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur dengan harapan dapat menemukan informasi lebih terbuka dari informan.

Tahap wawancara dilakukan menggunakan metode tatap muka dengan narasumber. Untuk memverifikasi pernyataan dari narasumber, penulis melakukan analisis data. Analisis data diperoleh dari dokumentasi kegiatan yang dimiliki lembaga/instansi, serta melalui website yang dimiliki.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Sugiyono (2016:223) mengatakan bahwa instrumen penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan peran serta, namun peranan penelitianlah yang sangat menentukan keseluruhan

skenarionya. Dengan demikian yang dimaksud instrumen yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri dan ditunjang dengan pencatatan dokumen dan pencatatan secara sistematis yang menggunakan alat bantu elektronik. Dalam penelitian ini, instrumen atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti sendiri, menurut Moleong (2006:4) salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Peneliti dalam menyerap dan mengambil data di lapangan yaitu dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi melalui observasi dan wawancara.
2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*, yaitu berupa materi poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan informan. Hal ini berguna untuk mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan dan data apa yang dibutuhkan untuk penelitian ini, sehingga nantinya data-data ini dapat diperoleh dan diolah oleh peneliti.
3. Alat penunjang yaitu alat rekaman dan kamera untuk mengambil gambar melalui *Handphone* peneliti serta buku saku kecil yang digunakan untuk catatan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendukung wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

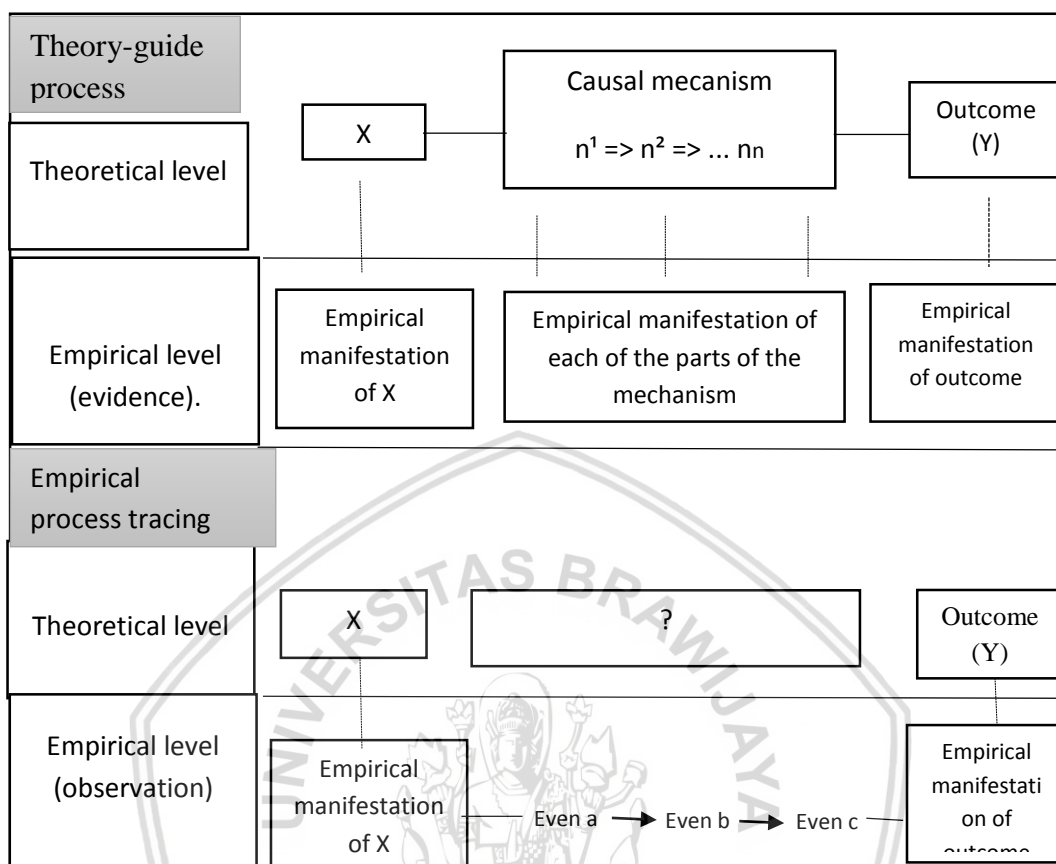
G. Metode Analisis Data

Analisis Data merupakan tahap dimana penulis telah memperoleh seluruh data dan informasi yang kemudian dioalah dan dianalisis. Pengolahan data ini dilakukan

agar data dan informasi yang didapat sesuai dengan apa yang diperlukan untuk disampaikan peneliti yang sesuai dengan fokus permasalahan. Menurut Sugiyono (2012: 224) mengatakan bawa :

“Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan”.

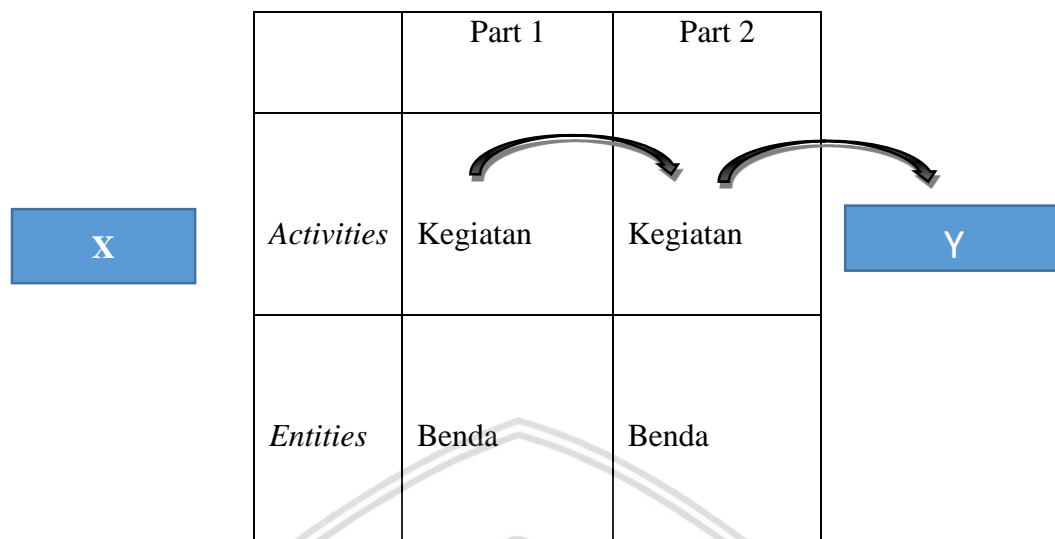
Secara umum analisis data dilakukan untuk meringkas data secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini menggunakan analisis dengan metode pendekatan *process tracing* untuk membantu menganalisis studi kasus dengan berusaha untuk menemukan mekanisme-mekanisme penyebab antara kondisi dengan hasil yang diakibatkannya melalui analisis serangkaian peristiwa dalam sebuah kasus. Menurut Derek (2016: 02) *Process tracing is single case research method that can be used to make within-case inferences about presence/absence of causal mechanisms* artinya bahwa Process Tracing merupakan metode penelitian kasus tunggal yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dalam suatu kasus tentang ada atau tidak adanya mekanisme sebab-akibat. *Process tracing* dalam prosesnya menggunakan *causal mechanisms* yaitu sebuah teori sistem yang mengkaitkan antar bagian yang mentransmisikan kekuatan kausalitas dari X ke Y. Derek menggambarkan *process tracing* sebagai berikut:



Gambar 2. Process Tracing Menggunakan Mekanisme Kausalitas

Sumber: Beach Derek (2012: 5)

Ketepatan pemahaman dari kausalitas dijelaskan oleh King, Keohane and Verba dalam Derek (2016: 09) bahwa *...the difference between the systematic component of observation made when the explanatory variable takes one value and the systematic componen of comparable observation when te explanatory variables takes on another value*. Artinya bahwa perbedaan yang ada antara sistematis terhadap keseluruhan layanan yang ada dalam penjelasannya ditentukan berdasarkan nilai dan tingkat kemampuan sistemik daripada yang sesuai dengan kriteria yang ada.



Gambar 3. Ruang Lingkup Causal Mechanism

Sumber: Beach Derek (2012: 12)

Causal mechanisms memiliki ruang lingkup yang berkaitan untuk mendapatkan hasil yang tepat. faktor yang secara individual bagian penting dari mekanisme, terdiri dari kegiatan sebagai produsen perubahan atau apa yang mentransmisikan kekuatan kausal dan entitas yang terlibat dalam kegiatan kegiatan itu sendiri. Variabel X yang menjadi pengaruh memerlukan kegiatan sebagai alat gerak agar terjadi perubahan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Y). Pada proses kegiatan berlangsung, bentuk segala aktivitas yang dilakukan akan memiliki nilai yang lebih bila menggunakan suatu entitas sebagai daya tarik tersendiri.

Pengaruh dinamis dan interaktif sebagai keseimbangan bagi faktor sebab (X). Pada kasus yang ditransmisikan melalui berbagai upaya tersebut, untuk mengintervensi mekanisme dilakukan pengendalian pada mekanisme tersebut untuk memproduksi hasil akhir yang tepat. Mekanisme itu sendiri merupakan aspek dari bagian yang berinteraksi yang berarti kumpulan unsur yang menghasilkan

suatu pengaruh yang tidak melekat pada siapa pun daripadanya. *Causal mechanism* akan dapat dilihat hasil akhirnya secara tepat apabila seluruh cakupan ruang lingkup telah terkait.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Letak Geografis Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi sehingga udara terasa sejuk. Kota Malang merupakan salah satu bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya bersama dengan Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

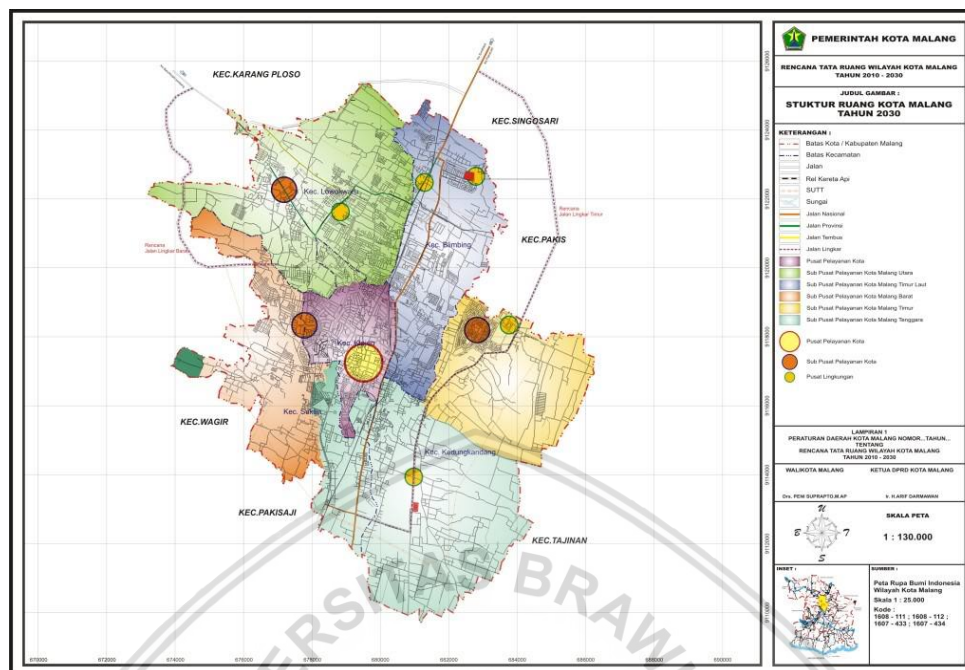
Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang



Gambar 1. Peta Kota Malang

Sumber : Malangkota.go.id

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara $22,7^{\circ}\text{C}$ – $25,1^{\circ}\text{C}$. Sedangkan suhu maksimum mencapai $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $18,4^{\circ}\text{C}$. Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86% . Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40% . Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

b. Kondisi Demografis

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan Laporan Pertambahan Penduduk Bulan Desember 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang jumlah penduduk Kota Malang sebesar 904.165 jiwa yang terdiri dari 451.337 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 452.828 jiwa. Tersebar di 5 kecamatan (Klojen = 110.037 jiwa, Blimbing = 198.428 jiwa, Kedungkandang = 212.459 jiwa, Sukun = 209.053 jiwa, dan Lowokwaru = 174.152 jiwa.. Kota Malang memiliki 285.534 Kepala Keluarga (KK). Berikut adalah uraian jumlah penduduk di tiap Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan pada tahun 2017:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Klojen	36.396	110.037
2.	Blimbing	62.638	198.428
3.	Kedung Kandang	65.582	212.459
4.	Sukum	65.999	209.053
5.	Lowokwaru	54.919	174.152
	Jumlah	285.534	904.165

Sumber: Dispendukcapilmalangkota.go.id

Kota Malang mengalami pertambahan sebesar 8.778 jiwa, hal ini dapat dilihat dari Laporan Pertambahan Penduduk pada bulan Desember 2016 sebesar 895.387 jiwa. Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk Kota Malang cukup padat bila dibandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki. Kepadatan penduduk dapat memicu pola kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dapat lebih maju.

2) Agama

Penduduk Kota Malang memeluk beragam Agama. Hal tersebut dikarenakan selain penduduk yang padat juga karena masyarakat Kota Malang merupakan pendatang dari berbagai daerah lain. Mayoritas penduduk Kota Malang beragama Islam, kemudian diikuti oleh Agama Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Koghuchu, dan Penganut Kepercayaan. Walaupun demikian, masyarakat Kota Malang memiliki kerukunan umat beragama terjalin dengan toleransi.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Penganut Agama di Kota Malang

No	Agama	Kecamatan				
		Klojen	Blimbing	Kedung Kandang	Sukun	Lowokwaru
1.	Islam	91,116	177,388	200,721	184,262	157,580
2.	Kristen	8,828	12,454	7,731	14,579	8,487
3.	Katholik	7,952	7,211	3,328	8,966	6,982
4.	Hindu	170	431	310	226	337

No	Agama	Kecamatan				
		Klojen	Blimbing	Kedung Kandang	Sukun	Lowokwaru
5.	Budha	1,918	903	331	965	733
6.	Konghuchu	68	39	18	27	16
7.	Penghayat Kepercayaan	21	2	20	28	17

Sumber: *Dispendukcapilmalangkota.go.id*

c. Visi dan Misi Kota Malang

1) Visi Kota Malang

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud (malangkota.go.id, 22 April 2018).

Visi Kota Malang ialah **“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”**. Kata Martabat yang tercantum dalam Visi tersebut,

memiliki maksud yang tercantum pada setiap akronimnya yaitu, Bersih, Makmur, Adil, Religius-Toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Selain Visi tersebut hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang (malangkota.go.id, 22 April 2018).

2) Misi Kota Malang

Kota Malang memiliki Misi yang digunakan sebagai acuan yaitu sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan;

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan.

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial;

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender.

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat.

4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan;

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya.

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

a. Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Malang merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah Kota Malang. Bakesbangpol Kota Malang terletak di Jalan Ahmad Yani No.98 Purwodadi Kota Malang. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD pemerintahan Kota Malang. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota yaitu Perwal No. 62 tahun 2012 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dalam urusan politik salah satunya ialah turut serta untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

b. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Visi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang adalah “terwujudnya kehidupan yang demokratis di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa”.

c. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka dilakukan dengan misi. Adapun misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang ialah sebagai berikut:

1. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan Politik Masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat modern yang dicita-citakan berdasarkan Pancasila;
2. Memelihara dan melestarikan heterogenitas masyarakat yang merupakan potensi kekayaan budaya bangsa untuk tetap utuhnya NKRI yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang di cita-citakan;
3. Mengembangkan kreativitas masyarakat dengan mendorong kearah kehidupan politik yang sehat menjunjung HAM, berkeadilan , bertanggung jawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Meningkatkan upaya penyelamatan dari bencana dan rehabilitasi akibat bencana.

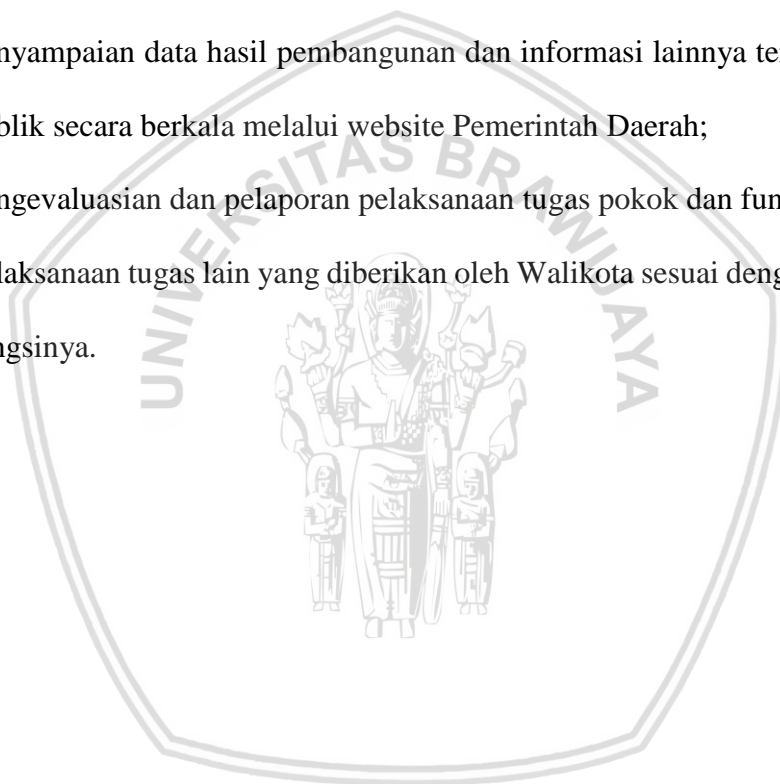
d. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Berdasarkan Perwali No. 62 Tahun 2012 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang pada Pasal 3 Ayat (1) memiliki tugas pokok sebagai memiliki tugas pokok sebagai penyusun dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana.

Sedangkan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang tercantum pada Pasal 3 Ayat (2) yang berisi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahunan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
6. Pemberian rekomendasi penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
7. Pemberian rekomendasi atas kegiatan tertentu yang berpotensi konflik SARA;
8. Penyusunan bahan kebijakan perlindungan masyarakat;
9. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
10. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

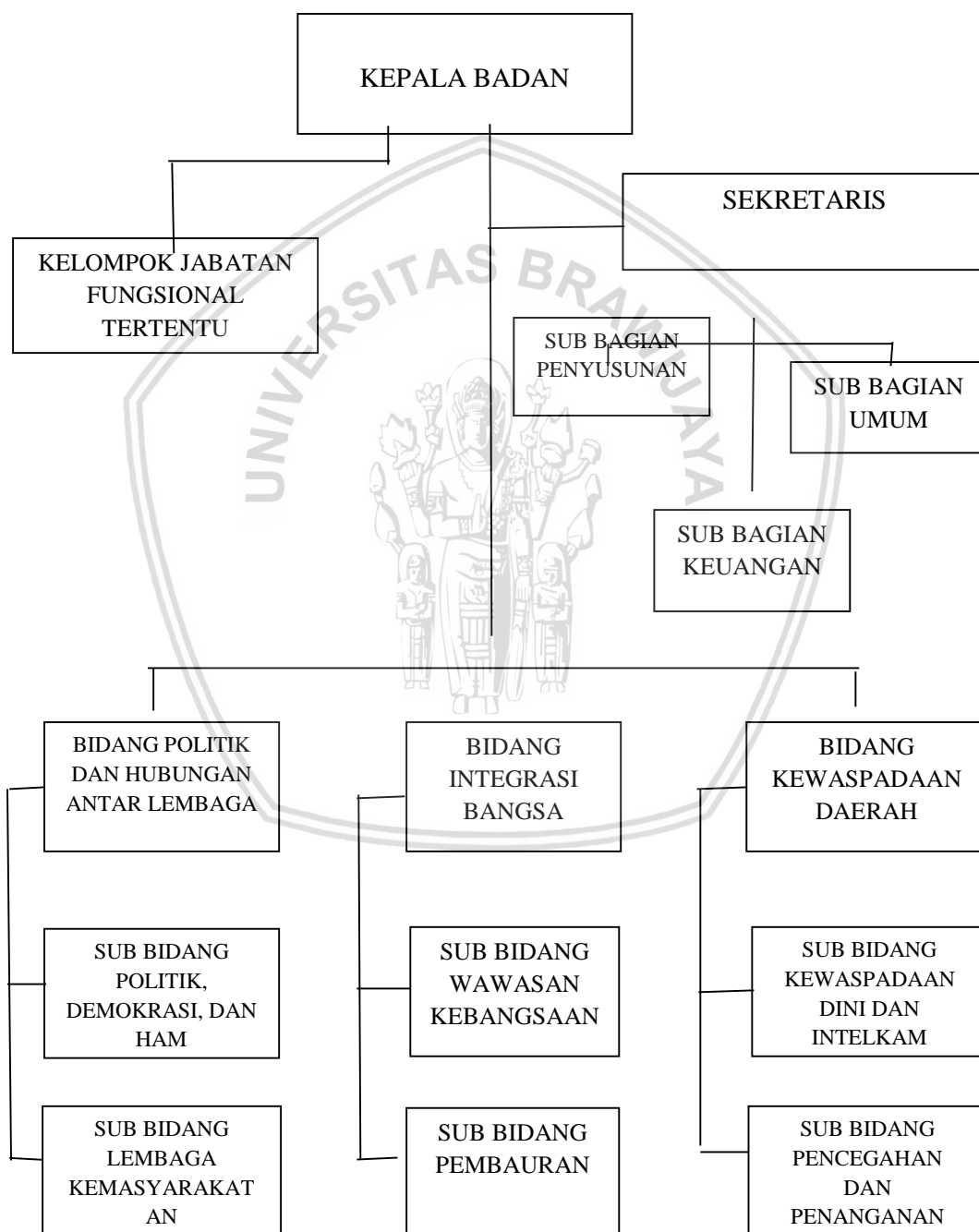
12. Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



e. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Malang

Gambar 2. Struktur Organisasi Bakesbangpol Kota Malang



Sumber: bakesbangpol.malangkota.go.id

f. Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Malang

Tabel 3. Nama Pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. Indri Ardoyo, M.Si	19580927 199003 1 004	Kepala Badan
2.	Heru Mulyono S.P, M.T	19720420 1992011 001	Sekretaris
3.	Dra. Suhartini, MM	19690220 199303 2 005	Sub Bagian Penyusunan Program
4.	Drs. Puji Utami, MM	19650906 199111 2 001	Sub Bagian Keuangan
5.	Ir. Titik Mujiati	19641013 199303 2 001	Sub Bagian Umum

Sumber: Bakesbangpol.malangkota.go.id

Tabel 4. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. Andang R	19600613199 703 001	Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
2.	Suhardono, SE	19610816 19703 1001	Sub Bidang Politik, Demokrasi, dan Ham
3.	Drs. Agus Purnomo Ali, MM	19630303 1989 11 1003	Sub Bidang Lembaga Kemsyarakatan

Sumber: Bakesbangpol.malangkota.go.id

Tabel 5. Bidang Integrasi Bangsa

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. Tony Noermawan	19621125 199003 1 009	Kepala Bidang Integrasi Bangsa
2.	Drs. I Gusti Ngurah Gede K.	19660330 199403 1 004	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
3.	Drs. Ismu Sukamto	19600729 198712 1 001	Sub Bidang Pembaharuan

Sumber: Bakesbangpol.malangkota.go.id

Tabel 6. Bidang Kewaspadaan Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dra. Psi. Latifah Hanun	19640824 198501 2 001	Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah
2.	Hari Renny Rendrarti, SE, MSI	19740803 199803 2 006	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Intelka
3.	Solikin, SE	19710105 2001121 001	Sub Bidang pencegahan dan Penanganan Konflik

Sumber: Bakesbangpol.malangkota.go.id

3. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang

a. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang merupakan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang ada di Wilayah Kota Malang. KPU Kota Malang terletak di Jalan Bantaran Nomor 6 Malang. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan

demokrasi di wilayah Kota Malang. Segala elemen dan aspek yang terdapat dalam KPU di optimalkan untuk dapat sebaik mungkin menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang penyelenggara Pemilu. Selain itu KPU juga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat, sebagaimana penejelasan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Artinya, Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Malang memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

b. Visi Komisi Pemilian Umum Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam menjalankan kegiatan kelembagaan memiliki visi. Visi tersebut berbunyi “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut, mencerminkan arah gerak kinerja dari lembaga KPU Kota Malang untuk merealisasikan asas demokrasi yang didengungkan oleh pemerintahan.

c. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Agar misi dapat terealisasi dengan baik, maka upaya yang dilakukan adalah melalui Misi. Adapun Misi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

d. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

e. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Gambar 3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



Sumber: kpud.malangkota.go.id

f. Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Tabel 7. Kepala Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

No.	Nama	Divisi
1.	Zaenudin, ST. M.AP	Ketua KPU dan Anggota Divisi Teknis
2.	Ashari Husen S.Sos. Msi	Anggota KPU Divisi SDM Dan Parmas
3.	Deny Rachmat Bachtir, S.Sos	Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data
4.	Fajar Santosa, SH. MH.	Anggota KPU Divisi Hukum

No.	Nama	Divisi
5.	Aminah Asminigtyas, SP	Amggota KPU Divisi Umum, Keuangan Logistik
6.	Muhammad Sailendra, ST., MM.	Sekretaris KPU Kota Malang

Sumber:kpud.malangkota.go.id

Tabel 8. Kepala Sub Bagian Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

No.	Nama	Divisi
1.	Iffatunnisaa', SH.	Kasubag Program dan Data
2.	Drs. Edy Wuryanto	Kasubag Teknis Pemilu dan Humas
3.	Antung Amiludinsyah, SH	Kasubag Hukum
4.	Kamilia Cahyani, A.Md	Kasubag Keuangan dan Logistik

Sumber:kpud.malangkota.go.id

Tabel 9. Daftar Nama Staff Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

No.	Nama	Divisi
1.	Diana Agustina Imbarwati, S.AP	Kasubag Program dan Data
2.	Stefan Krisna Priawan, S.TP	Kasubag Program dan Data
3.	Yoga Triatno, ST	Kasubag Teknis Pemilu dan Humas
4.	Jujuk Winarko	Kasubag Teknis Pemilu dan Humas
5.	Yekti Wijayanti, S.Sos	Kasubag Hukum
6.	M. Syahrul Ramadhan	Kasubag Hukum
7.	Diah Fitasari, SH	Kasubag Keuangan dan Logistik
8.	Ayu Jaya Tiur Nauli S., S.Sos	Kasubag Keuangan dan Logistik
9.	Sucipto	Kasubag Keuangan dan Logistik

No.	Nama	Divisi
10.	Suyadi	Kasubag Keuangan dan Logistik
11.	Soirin	Kasubag Keuangan dan Logistik
12.	Mokhamad Irwanto, SE	Kasubag Keuangan dan Logistik
13.	Heru Setiawan	Kasubag Keuangan dan Logistik

Sumber:kpud.malangkota.go.id

4. Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

a. Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebuah partai politik berideologi Konservatisme di Indonesia. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998 bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah. Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah). Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Malang berada di Jalan Jl. Ketapang No.2, Kasin, Klojen, Kota Malang.

b. Visi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nilai-nilai yang dicanangkan oleh PKB tercantum pada Visi yang dimiliki.

Visi tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

c. Misi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Usaha untuk menjalankan suatu Visi dilakukan melalui Misi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki Misi sebagai berikut:

1. **Bidang Ekonomi:** menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
2. **Bidang Hukum:** berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
3. **Bidang Sosial Budaya:** berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
4. **Bidang Pendidikan:** berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem

pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

5. **Bidang Pertahanan:** membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

d. Makna Lambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Gambar 4. Lambang PKB



Sumber: www.pkb.or.id

Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal.

Arti Gambar adalah sebagai berikut:

1. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai;
2. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan;
3. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;
4. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

Arti warna adalah sebagai berikut:

1. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
2. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan;
3. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.
4. Asas dan Prinsip Perjuangan (menggantikan Tugas dan fungsi)
5. Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Prinsip perjuangan PKB adalah

pengabdian kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljama'ah*

e. Struktur Partai Kesatuan Bangsa (PKB)

Partai Kesatuan Bangsa (PKB) memiliki struktur dari pusat ke daerah sebagai berikut:

1. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP;
2. Organisasi Daerah Provinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;
3. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC;
4. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
5. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt;
6. Organisasi Tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPART;

Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat DPCP.

5. Gambaran Umum Partai Demokrat

a. Profil Partai Demokrat

Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono. Pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015-2020.

b. Visi Partai Demokrat

Partai Demokrat memiliki visi sebagai arah dari jalanya partai. Visi tersebut ialah Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

c. Misi Partai Demokrat

Sebagai alat guna menjalankan Visi, maka dibuatlah sebuah Misi. Misi yang dicanangkan oleh Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

6. Gambaran Umum Partai Golongan Karya (Golkar)

a. Profil Partai Golongan Karya (Golkar)

Sejarah Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada akhir pemerintahan soekarno, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat yang menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, serta nelayan. Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

- Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
- Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- Organisasi Profesi
- Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
- Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971

Tujuh KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR).

b. Visi Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar memiliki Visi sebagai arah gerak jalannya Partai. Visi tersebut berbunyi “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia”.

c. Misi Partai Golongan Karya (Golkar)

Untuk menjalankan Visi agar terealisasi dengan baik maka diwujudkan melalui Misi. Partai Golkar memiliki Misi sebagai berikut:

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

d. Platform Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar selain memiliki Visi dan Misi, juga memiliki Platform partai. Platform ini ditujukan agar partai Golkar dapat menjadi partai yang mandiri,

demokratis, kuat soild, berakar, dan responsif. Platform tersebut diantara berisi sebagai berikut:

1. Senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara pandang mengatasi perbedaan faham, golongan, dan kelompok atas dasar suku, etnis, agama, aliran, dan budaya sehingga seluruh bangsa Indonesia terhimpun dalam kekuatan besar.
3. Mengembangkan cirri pluralism dalam persatuan dengan menampung kemajemukan bangsa Indonesia yang terpatri dalam semboyan Bhineka Tunggal ika.
4. Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
5. Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh, menurunkan kemiskinan dan penagngguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan.
6. Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional.

7. Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sekaligus sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan.
8. Mewujudkan pengelolaan kekayaan alam secara efisien, berdaya guna dan berkesinambungan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan.
9. Membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk mewujudkan ketahanan nasional.

7. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama Kota Malang

a. Profil Nahdlatul Ulama Kota Malang

Nahdlatul Ulama atau disingkat (NU) merupakan organisasi non-pemerintahan berbasis keagamaan yaitu agama Islam. NU merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, dan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat Indonesia. NU berdiri karena didorong oleh minat para kalangan pesantren yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban. Kalangan pesantren tersebut terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Pada tahun 1984 terdapat gagasan kembali ke Khittah, yaitu merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Gagasan tersebut menjadi tonggak merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI) Agama Partai Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI). NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi. Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pengurus cabang NU kota malang berada di jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 21, Kauman, Klojen, Kota Malang.

b. Tujuan Nahdlatul Ulama Kota Malang

Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Kota Malang memiliki tujuan organisasi yang sama dengan NU Pusat. Tujuan organisasi NU ialah “Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama’ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Maksud dari Ahlussunnah Waljama’ah ialah Ahlussunnah Wal-jama’ah adalah orang yang memegang teguh al-Qur’an dan mengikuti segala sesuatu yang telah dijalankan oleh Rasulullah Saw, para sahabatnya, serta as-Salaf as-Shalih dan para penerusnya.

c. Usaha Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Malang

Usaha Nadlatul Ulama (NU) Kota Malang dalam organisasi tidak berbeda dengan NU Pusat yaitu sebagai berikut:

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.
3. Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

d. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Kota Malang

Nadlatul Ulama (NU) memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi pada umumnya. Berikut susunan struktur organisasi dari yang paling tinggi kedudukannya hingga jabatan di daerah:

1. Pengurus Besar (tingkat Pusat)
2. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi)
3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota.
4. Majelis Wakil Cabang (tingkat Kecamatan)
5. Pengurus Ranting (tingkat Desa/Kelurahan)

Untuk tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Mustasyar (Penasehat)
2. Syuriah (Pimpinan Tertinggi)
3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk tingkat Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Syuriah (Pimpinan tertinggi)
2. Tanfidziyah (Pelaksana harian)

e. Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang

Tabel 10. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang Masa Khidmat 2016-2021

No	Jabatan	Nama	Alamat
1.	Mustasyar	Kh. Drs. Zainuddin Abdul Muhith	Perum Cempaka Putih I Blok R. 1
2.		Kh. Abdurrahman Yahya	Pp. Miftahul Huda – Gading
3.		Kh. M. Baidowi Muslich	Pp. Anwarul Huda Karangbesuki
4.		Habib Baqir Mauladawilah	Jl. Kapt. Piere Tendean
5.		Kh. Drs. A. Madjid Ridwan	Jl. Bantaran I-D/ 11
6.		Kh. Abdurrahman Qomari	Pp. Darul Falah Kenongo Pandanwangi
7.		Kh. Ubaedillah Fadhil	Jl. Cisadane 21
8.		Habib Abdul Hadi Al-Kaf	
9.		Drs. Kh. Mas'ud Ali, M.Ag	Jl. Cumi-Cumi 12
10		Kh. Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag	Jl. Bareng Tenes Iv
11		Kh. Nur Salim Mafa	Jl. Kebonsari I/1
12		Kh. Lukman Al-Karim	Pp. Bahrul Magfiroh Joyo Grand
13		Kh. Drs. Marzuki Mustamar, M.Ag	Pp. Sabilurrosyad – Karangbesuki
14		Prof. Dr. H. Imam Suprayogo	

No	Jabatan	Nama	Alamat
15		Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si	
16		Prof. Dr. H. M. Bisri, Ms	
17		Prof. Dr. H. A. Rofiuddin, M.Pd	
18		Prof. Dr. H. Iwan Nugroho, Ms	
19		Prof. Dr. H. Masykuri Bakri, M.Si	
20		Prof. Dr. H. Agus Sholehuddin	
21		Dr. Ir. H. Tundung Subali Padma, Mt	
22		Drs. H. Imron, M.Ag	
23		Dr. H. M. Zainuddin, Ma	
22	Rais	Kh. Drs. Chamzawi, M.Hi	Perum Dinas Uin No. 5 Malang
23	Wakil Rais	Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban	Jl. Kh. Malik Dalam 24-A
24	Wakil Rais	Kh. Abdul Malik Salam Amin	Pp. Nurul Ulum – Kebonsari
25	Wakil Rais	Kh. Muhammad Nafi'	Jl. Cengger Ayam
26	Wakil Rais	Kyai. Drs. A. Achwanuri	Jl. Kol. Sugiono Iii-B/23
27	Wakil Rais	Kh. Drs. Saifuddin Zuhri	Jl. Simpang Panji Suroso I
28	Wakil Rais	Kh. Drs. Moh. Murtadho, M.Hi	Jl. Candi 6/C /Pp. Sabilurrosyad
29	Wakil Rais	Kh. Drs. M. Damanhuri Sc	Jl. Kyai Tamin Iii/75
30	Wakil Rais	Kh. Drs. M. Nursalim	Kebonsari V/172-A
31	Katib	Kh. Dr. Badruddin Muhammad, M.Hi	Perum Dinas Uin Malang
32	Wakil Katib	Kh. Dr. A. Zainur Rouf, M. Hi	Jl. Kh. Malik Dalam
33	Wakil Katib	Kh. Athoillah Wijayanto, S.Ag	
34	Wakil Katib	Kh. Faris Choirul Anam, M.Hi	
35	Wakil Katib	Ust. H. Choirul Arif, S.Ag	
36	A ' W A N	Kh. Hasan Amin	Jl. Kyai Parseh Jaya 37
37		Kh. A. Nur Hadi	Pp. Nurul Muttaqin Tlogowaru
38		Habib Asadullah Alaydrus	

No	Jabatan	Nama	Alamat
39		Kh. Muhammad Rifa'i	Jl. Klayatan I/11
40		Habib Abdullah Al-Haddad	
41		H. Nur Asmari	Jl. Brigjen Katamso Vii/1526
42		Habib Abdullah Bin Salim Mauladawilah	
43		Kh. Suyuthi Asyrof	Pp. Al-Mubarak – Merjosari
44		Habib Umar Syihab	
45		Kh. Maksum	
46		Habib Umar Haddad	
47		Kh. A. Qomaruddin Dahlan	Jl. Teluk Grajakan 17
48		Kh. Hamid Manan	Jl. Selorejo 29-A
49		H. M. Socheh Ansori	Jl. Bareng Kartini Iii-B/38
50		Kh. Drs. Qusyairi, M.Pd	
51		Kh. Ahmad Shonhaji	
52		H. M. Syafraji Hariyanto, Sh	Jl. S. Supriyadi Ix-A/48
53		Ust. Drs. H. Imam Mukti	Jl. S. Supriyadi Iv/20
54		Drs. H. Hamzah Abdul Madjid	
55		Kh. Achmad Djamali	
56		Ir. H. Warsito, Mt	
57		Kh. Drs. M. Amien Abdullah, M.Ag	
58	Ketua	Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag	Perum Dinas Uin Malang
59	Wakil Ketua	Dr. H. M. Mujab Masyhudi	Jl. Salahutu 15
60	Wakil Ketua	Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said	Jl. Candi Ngrimbi 34
61	Wakil Ketua	Drs. Sutiaji	Jl. Mt. Haryono V/254
62	Wakil Ketua	Drs. H. Muh. Sudiyono Al- Anshory	Jl. S. Supriyadi Vii/20
63	Wakil Ketua	Dr. H. Akhmad Muzakki, Ma	Perum Dinas Uin Malang
64	Wakil Ketua	Kh. Dr. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag	
65	Wakil Ketua	Dr. H. Mochtar Data, M.Pd	
66	Wakil Ketua	Mahmudi Muhith	Jl. Prof. M. Yamin Ii Kav. 17

No	Jabatan	Nama	Alamat
67	Sekretaris	H. Asif Budairi, Mh.	Jl. Candi 6a/18a
68	Wakil Sekretaris	H. Hilman Wadjdi, M.Pd	
69	Wakil Sekretaris	H. Yuanda Kusuma, Lc.,Ma	
70	Wakil Sekretaris	M. Ihsan, S.Ag, M.Pdi	
71	Wakil Sekretaris	Dr. Zulkarnain, Sh, Mh	
72	Wakil Sekretaris	H. Khoirul Anwar, S.Ag, Mpd	
73	Wakil Sekretaris	Dr. H. Yusuf Hanafi, M.Ag	
74	Wakil Sekretaris	Dr. Mohammad Mahpur, M. Si	
75	Wakil Sekretaris	Irul Evianto, Se.	
76	Bendahara	H. M. Anton	Jl. Tlogo Indah 16
77	Wakil Bendahara	H. Moch. Rif'an Yasin	Jl. Kh. Ahmad Dahlan I/104
78	Wakil Bendahara	Ir. H. Ghufro Marzuqi	
79	Wakil Bendahara	Ir. H. Yunar Mulya Hk, Mm	Jl. Basuki Rakhmat Ii/802

Sumber: NUMuda.id

8. Gambaran Umum Organisasi Muhammadiyah Kota Malang

a. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kota Malang berada di Jalan Gajayana Nomor 28 B Kota Malang. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan

ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Merujuk Khittah Ujung Pandang (1971), Surabaya (1978), dan Denpasar (2002), Muhammadiyah menegaskan tetap dalam koridor dakwah dan menjaga netralitas politik. Netralitas politik merupakan pilihan dan strategi agar Muhammadiyah tetap independen, berwibawa, dan mampu memelihara persatuan warganya. Muhammadiyah tidak terpengaruh dan tidak terlibat dalam hiruk-pikuk kekuasaan. Kedua, mendirikan partai politik sebagai amal usaha di mana Muhammadiyah menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Atau, Muhammadiyah berafiliasi dengan partai politik tertentu sebagai partai utama. Partai tetap independen dalam hal kepemimpinan dan kebijakan. Hubungan Muhammadiyah dengan partai bersifat aspiratif, bukan simbolis. Ketiga, tetap menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik, namun dalam situasi tertentu mendukung calon eksekutif dan legislatif. Orientasi politik Muhammadiyah bersifat adhoc dan rasional dengan melihat individu dan partai yang akan dipilih.

b. Visi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alamina menuju terciptanya/terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

c. Misi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar memiliki misi :

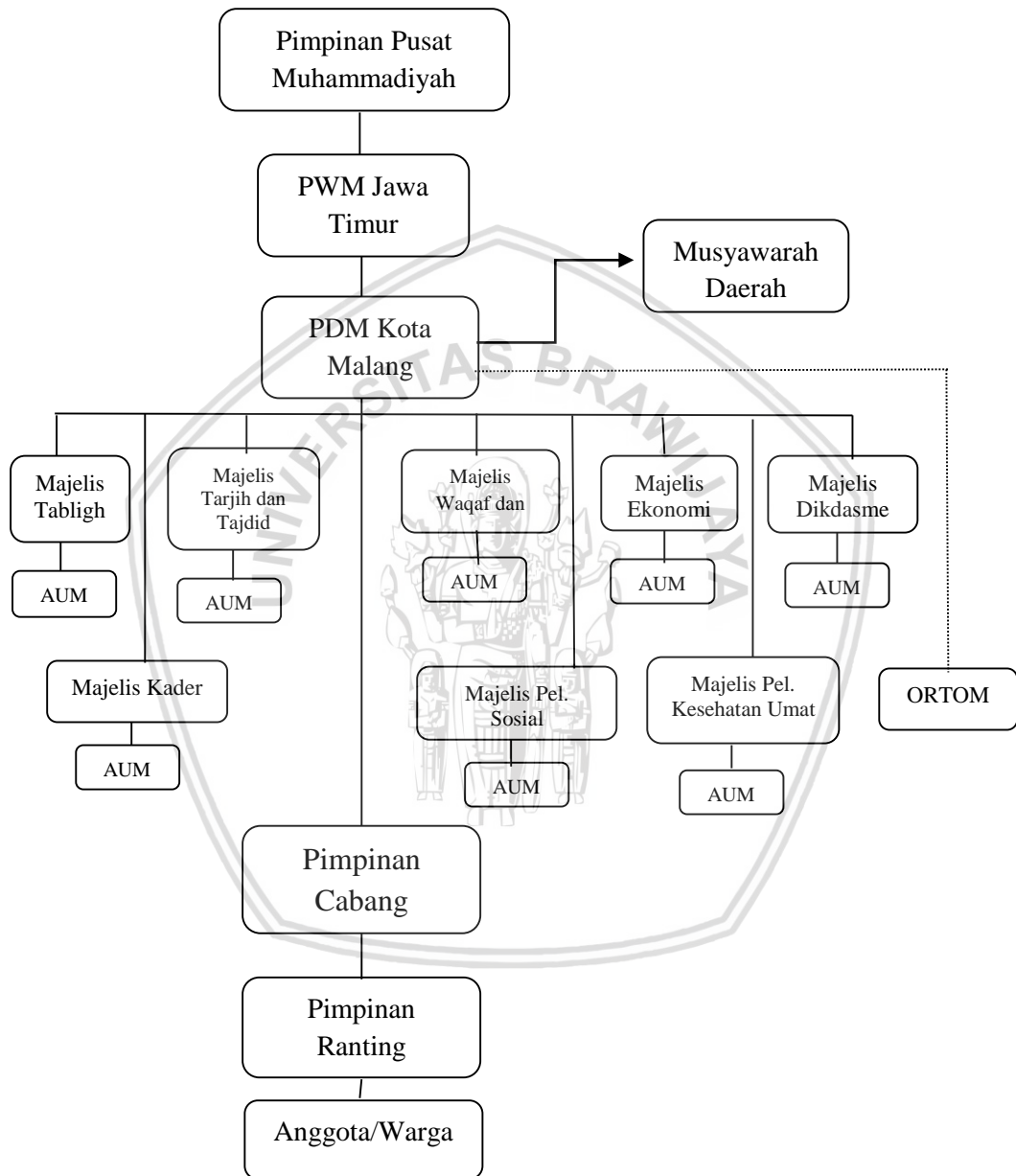
- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
- c. Menyebar luaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

d. Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota

Malang

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang menggunakan struktur organisasi, dimana wewenang mengalir dari pimpinan ke bawahan, pengawasan langsung mengalir dari pimpinan ke karyawan, dan para karyawan bertanggungjawab terhadap pimpinan, sehingga ubungan perintah membentang dari pimpinan sampai pekerja bawahan merupakan satu garis.

Gambar 5. Struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang



9. Gambaran Umum Radio Republik Indonesia (Radio) Kota Malang

a. Profil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang

RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Besarnya tugas dan fungsi RRI yang diberikan oleh negara melalui UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, PP 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta PP 12 tahun 2005, RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjangkauan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran Asing.

Dengan kekuatan 62 stasiun penyiaran termasuk Siaran Luar Negeri dan 5 (lima. satuan kerja (satker) lainnya yaitu Pusat Pemberitaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangdiklat) Satuan Pengawasan Intern, serta diperkuat 16 studio produksi serta 11 perwakilan RRI di Luar negeri RRI memiliki 61 (enampuluh satu) program 1, 61 program 2, 61 program 3, 14 program 4 dan 7 studio produksi maka RRI setara dengan 205 stasiun radio.

b. Visi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Malang memiliki Visi yang sesuai dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Indonesia (RRI) Pusat. Visi tersebut yaitu berbunyi “Terwujudnya RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan mendunia”. Artinya RRI harus mampu menjadi sumber informasi yang terpercaya tidak hanya di lokal saja tetapi juga di manca negara.

c. Misi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota

Malang

Sesuai dengan Visi yang hendak dicapai, maka memerlukan Misi agar tujuan tersebut terealisasi. Misi yang dimiliki Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Malang sesuai dengan Misi RRI Pusat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik/kode etik penyiaran.
2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa.
3. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.
4. Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas.
5. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI

6. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.
7. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran.
8. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran serta mengefisienkan pengelolaan operasional maupun pemeliharaan perangkat teknik.
9. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan sistem manajemen sumber daya (SDM, keuangan, asset, informasi dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang baik (good corporate governance).
10. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.
11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan asset negara secara profesional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

d. Tugas Pokok Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang

LPP RRI Kota Malang memiliki tugas pokok yang telah ditetapkan oleh LPP RRI Pusat. Tugas pokok tersebut adalah memberikan pelayanan informasi,

pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. (PP.12/2005. Ps. 4).

Selain itu, tugas LPP RRI dalam melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI tidak bisa dilayani dengan satu program saja, oleh karena itu RRI menyelenggarakan siaran dengan 4 program:

1. **Pro 1:** Pusat siaran pemberdayaan masyarakat
2. **Pro 2:** Pusat siaran kreatifitas anak muda
3. **Pro 3:** Pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio
4. **Pro 4:** Pusat siaran budaya dan pendidikan
5. **VOI:** Citra & Martabat bangsa didunia internasional siaran setiap hari dengan 8 bahasa asing
6. **Studio Produksi LN:** Jembatan informasi Indonesia - LN dan LN - Indonesia

e. Peran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang

Sebagai lembaga penyiaran publik maka RRI memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi kepada publik. Untuk itu peran RRI dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat:** RRI menyelenggarakan siaran pemberdayaan masyarakat di semua lapisan masyarakat melalui siaran pedesaan, nelayan, wanita, anak-anak, siaran lingkungan hidup,

kewirausahaan, teknologi tepat guna, kerajinan, perdagangan, pertanian, koperasi, industri kecil dll.

- 2) **Peran RRI sebagai Pelestari Budaya Bangsa:** Seluruh RRI wajib menyelenggarakan siaran seni dan budaya daerah seluruh indonesia secara konsisten dan tidak pernah berhenti seperti siaran ketoprak, wayang orang, wayang golek, madihin, saluang dan budaya minang lainnya, budaya bugis, dan budaya daerah-daerah lainnya.
- 3) **Peran RRI sebagai pelestari lingkungan:** RRI menyelenggarakan siaran Green Radio untuk penanaman kembali dan Re Use, Reduce dan Recycling dengan berbagai format dan variasi bentuk acara.
- 4) **Peran RRI sebagai media pendidikan:** RRI menyelenggarakan siaran pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai Mahasiswa. RRI menyelenggarakan Pekan Kreatif dengan mengadakan lomba kreatif remaja seperti lomba cipta lagu, lomba cipta design , lomba IT, lomba band indie, bintang radio, pekan tilawatil quran. Disamping itu juga menyelenggarakan siaran pendidikan social masyarakat, seperti siaran wanita, siaran pedesaan, siaran KB dll.
- 5) **Peran RRI sebagai Media Diplomasi:** RRI menyelenggarakan siaran radio diplomasi melalui siaran luar negeri untuk membangun citra positif bangsa didunia internasional bekerjasama dengan kedutaan dan radio luar negeri dengan siaran yang bersifat reciprocal . kerjasama siaran dengan ABC , NHK, RTM, RTB, KBS, RTH, SR, BBC, Radio Jedah, Radio Turki, RCI, DW dll.

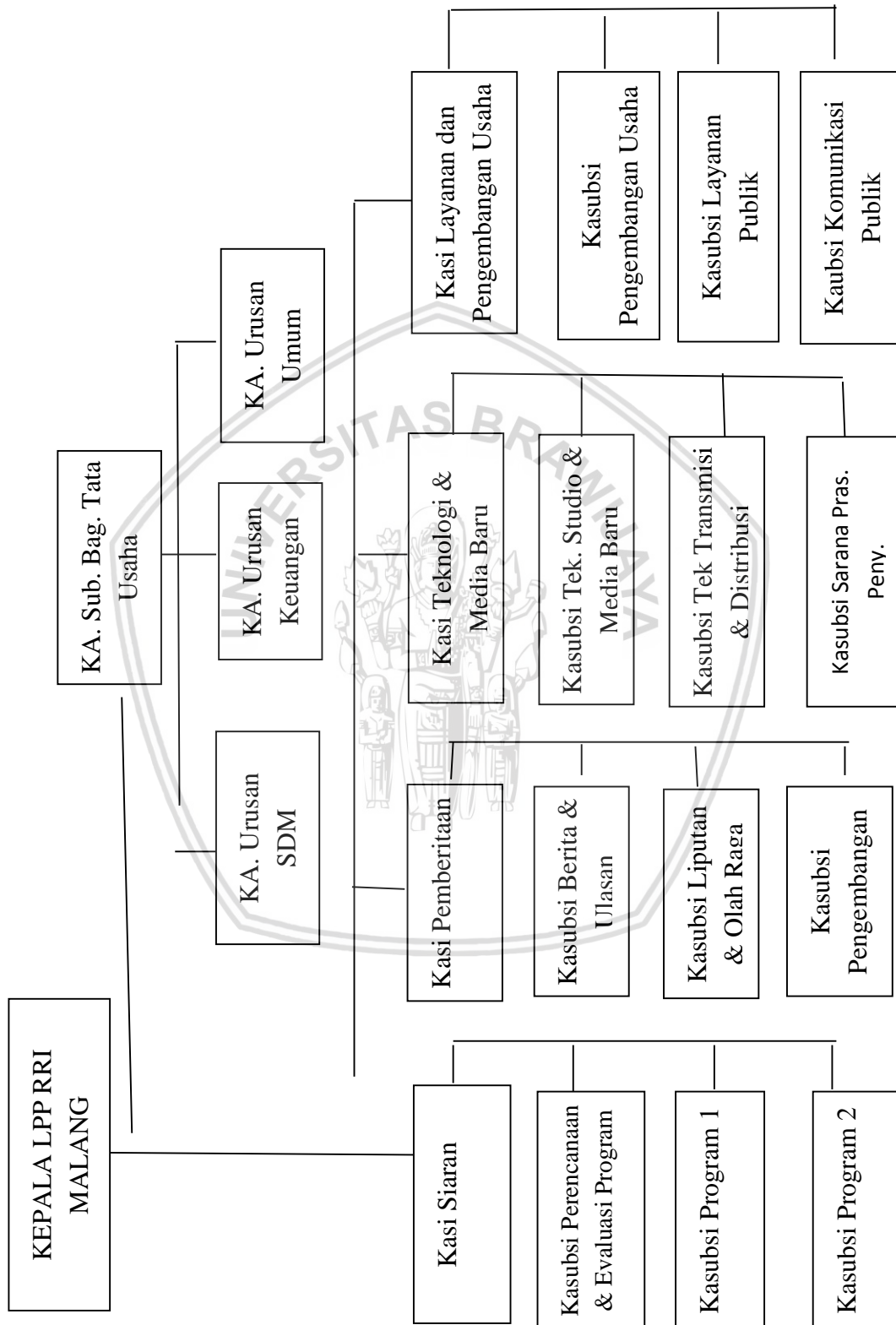
- 6) **Peran RRI sebagai media terdepan tanggap bencana:** RRI menyelenggarakan siaran langsung dari tenda darurat melalui Radio Based Disaster Management. Setiap ada bencana dalam waktu tidak lebih dari 24 jam RRI harus sudah melaporkan, kemudian diikuti program Pelipur Lara korban bencana dan trauma healing dengan mendirikan studio darurat.
- 7) **Peran RRI dalam menghubungkan tenaga kerja di Luar Negeri:** RRI menyelenggarakan siaran rutin dan terkoneksi dengan 7 negara yaitu Hongkong, Malaysia, Brunei Darusalam, Jepang, Taiwan, Korea dan Arab Saudi untuk mendekatkan TKI dengan kampung halaman. Pendengar RRI di luar negeri khususnya TKI berjumlah puluhan ribu orang yang mendengar melalui audio streaming. Dalam rangka mewujudkan peran second track diplomacy menyelenggarakan acara Diplomatic Forum. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Luar negeri khususnya tenaga kerja Indonesia antara lain diselenggarakan acara bilik sastra yang diperlombakan dan 2 pemenang dihadirkan oleh SLN untuk menghadiri acara upacara kenegaraan 17 Agustus di Istana negara dan sidang DPR dan DPD di Senayan.
- 8) **Peran RRI sebagai media hiburan:** RRI menyelenggarakan siaran hiburan berupa siaran music dan kata, pagelaran musik klasik yaitu orkes symphony Jakarta dan orkes symphony yang dimiliki RRI daerah. Pagelaran kesenian dan budaya, lawak, Quiz dll.
- 9) **Peran RRI dalam sabuk pengaman informasi (Information Safety Belt):** selama tahun 2009 - 2010 RRI telah mendirikan studio di wilayah perbatasan

dan daerah terpencil atau blankspot, antara lain: Entikong, Batam, Nunukan, Putusibaou, Malinau, Atambua, Ampa, Boven Digoel, Kaimana, Skow, Oksibil, Takengon, Sabang dan Sampang. Siaran melalui studio-studio produksi ini ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memberikan akses informasi yang berimbang bagi masyarakat di daerah perbatasan maupun di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat menerima siaran RRI atau blankspot.

f. Struktur Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kota Malang

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Malang menggunakan struktur organisasi, dimana wewenang mengalir dari pimpinan ke bawahan, pengawasan langsung mengalir dari pimpinan ke karyawan, dan para karyawan bertanggungjawab terhadap pimpinan, sehingga ubungan perintah membentang dari pimpinan sampai pekerja bawahan merupakan satu garis.

Gambar 6. Struktur Organisasi RRI



10. Gambaran Umum PT. Media Utama Televisi (MHTV) Kota Malang

a. Profil PT. Media Utama Televisi (MHTV) Kota Malang

Media Utama Televisi (MHTV) Malang adalah salah satu stasiun TV lokal di Malang Raya yang berdiri sejak Juni 2014. MHTV berada di Jalan Amad Yani Komplek De'Panorama Square Blok A-10 Malang. MHTV tayang dengan 14 program yaitu Wartakota, Wartakota Sepekan, Sportainment, Titian Iman, Primanada, Gagas, Animal Zone, M-Klip, M-Musik, Ciluba, Mencekam, M-Tech, dan Clip Anak.

b. Visi PT. Media Utama Televisi (MHTV) Kota Malang

Media Utama Televisi (MHTV) Malang memiliki Visi untuk tujuan berjalanya persahaan, diantara adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan masyarakat Malang pada posisi pertama dengan memberikan informasi melalui media untuk membantu pemirsa televisi mencapai gol dan tujuan mereka.
2. Bekerja keras untuk memastikan bawa jasa dan program MTV Malang adalah program yang menegakkan standard yang paling tinggi dalam hal: Kualitas, Integritas, Kemandirian, dan Netral.
3. Memberikan perspektif yang berbeda di bandingkan televisi lainnya.
4. Memberikan suguhan yang menghargai kecerdasan pemirsa dan waktu mereka melihat tayangan MHTV Malang.

5. Terikat dengan pembelajaran dan penginformasian yang nantinya akan memajukan pengembangan dari pemirsa MHTV Malang.

c. Misi PT. Media Utama Televisi (MHTV) Kota Malang

Visi yang telah menjadi tujuan dari PT. Media Utama Televisi (MHTV) Kota Malang dijalankan melalui Misi yang dibuat. Misi tersebut ialah:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat Malang Raya melalui penyediaan program yang baik, santun, sesuai dengan aspek budaya lokal yang ada.
2. Mendidik dan menyiapkan remaja serta orang dewasa untuk ikut produktif demi masa depan yang maju dan berkembang.
3. Menambah wawasan hidup pemirsa mulai dari sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan.

11. Gambaran Umum Koran Malang Post

a. Sejarah Malang Post

era globalisasi saat ini, informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting. Masyarakat haus akan informasi yang terdepan dan akurat. Alasan untuk memenuhi kebutuhan itulah yang kemudian mendorong penerbit surat kabar harian pagi Malang Post. Surat kabar arian Malang Post resmi terbit pada tanggal 1 Agustus 1998 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. : 369/SK MENPEN?SIUPP/1998. Pendirian perusahaan ini dilakukan dilakukan di hadapan notaris dengan bukti dikeluarkannya Akta Notaris Darma Sanjata Sudagung, S.J. Nomor 206, tanggal 24 Oktober 1998. Awal penerbitan surat kabar harian Malang Post memiliki nama surat kabar harian Malang Kucecwara Post. Berdasarka SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) yang dikeluarkan ole Menteri Penerangan R.I.

tertanggal 17 Juli 1998, disebutkan bahwa SIUPP diberikan kepada P.T. Jawa Media Agro Indonesia untuk menerbitkan surat kabar harian pagi Malang Kucecwara Post.

Melalui berbagai perkembangan, sesuai dengan perubahan nama perusahaan dan nama penerbit surat kabar harian dari Departemen Penerangan R.I. Nomor 192/Ditjen PPG/XI/1998 menerangkan bahwa surat kabar harian pagi Malang Post dibawah naungan P.T. Malang Post Cemerlang. P.T. Malang Post Cemerlang merupakan anak perusahaan dari Group Jawa Post. Sebagai media daerah, Malang Post diterbitkan sekaligus sebagai media pertama di Indonesia yang bernafas otonomi daerah. Sebuah bentuk “Lembaga surat kabar yang berkuasa” di daerah terbitnya. Ide yang dilakukan oleh Malang Post membuat kekuasaan di daerah akhirnya diperkuat dengan terbitnya UU No. 25 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan daerah. Malang Post pun menjadi icon Malang Raya dengan slogan sebagai Korane Arek Malang.

b. Visi Malang Post

Surat kabar harian pagi Malang Post memiliki sebuah Visi yang digunakan sebagai tujuan. Visi tersebut ialah “Menjadi perusahaan yang kuat, sehat dan percaya diri”. Adanya Visi tersebut digunakan sebagai arah gerak dari Malang Post.

c. Misi Malang Post

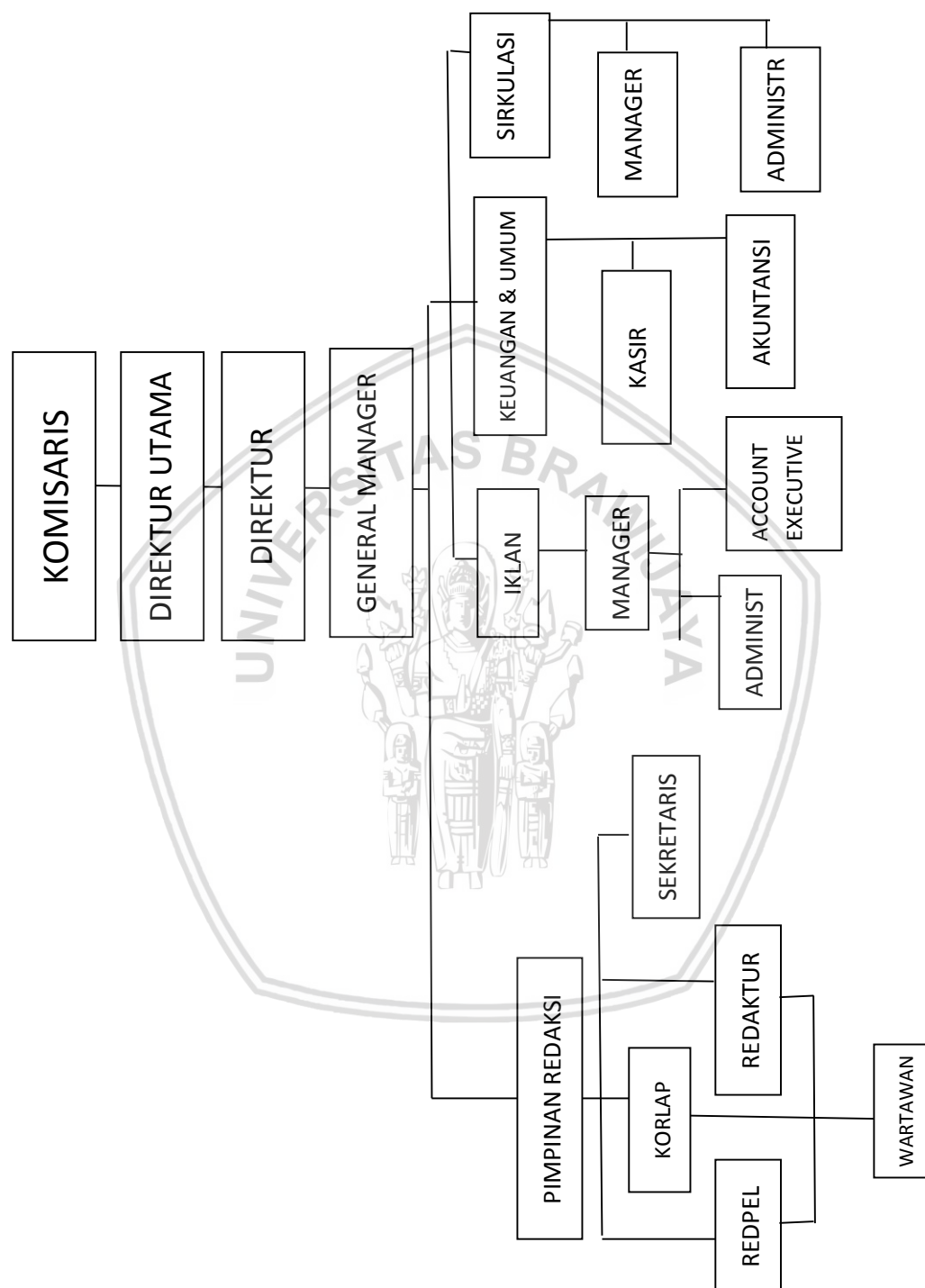
Guna mewujudkan Visi yang ada, Malang Post mempunyai Misi. Misi tersebut ialah “Malang Post, korane arek Malang sebagai media informasi, publikasi dan promosi yang independent, serta memiliki peran sebagai kontrol sosial. Misi tersebut diharapkan dapat mencapai Visi yang ada.

d. Struktur Organisasi Malang Post

Struktur organisasi PT. Malang Post Cemerlang menggunakan struktur organisasi, dimana wewenang mengalir dari pimpinan ke bawahan, pengawasan langsung mengalir dari pimpinan ke karyawan, dan para karyawan bertanggungjawab terhadap pimpinan, sehingga ubungan perintah membentang dari pimpinan sampai pekerja bawahan merupakan satu garis.



Gambar 7. Struktur Organisasi Malang Post



B. Penyajian Data

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang biasa disebut Bakesbangpol merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemerintah daerah. Bakesbangpol memiliki Tupoksi untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bakesbangpol salah satunya ialah berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Suhardono selaku Bidang Politik Demokrasi, dan Ham:

“Peran Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan partisipasi politik masyarakat memang salah satunya dilakukan oleh Bakesbangpol karena Bakesbangpol adalah SKPD Kota Malang yang lingkupnya adalah perihal kesatuan bangsa dan politik. Terkait segala bentuk tentang politik seperti alnya pemilu, pilkada, pilgub dan lain sebagainya apabila itu dalam lingkup Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur dan Negara kita turut andil untuk mensukseskan adanya agenda tersebut.”
(Wawancara pada Rabu, 28 Maret 2018)

Dalam meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat, pemerintah daerah melalui SKPD mengadakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu kegiatan Sosialisasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Suhardono:

“jadi begini, Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol memberikan dukungan fasilitas untuk mensukseskan pelaksanaan, fasilitas itu berupa apa? Ya seperti fasilitas persiapan pelaksanaan PILKADA, seperti Sosialisasi pelaksanaan PILKADA berupa sosialisasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam PILKADA. Sosialisasi ini bertujuan untuk apa, ya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tentunya masyarakat jadi tahu bahwa ada agenda pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang.”

(Wawancara pada Rabu, 28 Maret 2018)

Pernyataan tersebut berarti bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh Bakesbangpol merupakan cara untuk meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah pada agenda PILWALI Kota Malang Tahun 2018. Hal tersebut diungkap oleh Suhardono bahwa:

“iya benar, pada Pilwali Tahun 2018 ini tentu kita melakukan sosialisasi, dan tidak hanya pilwali tetapi juga nanti akan diadakan sosialisasi terkait Pilgub Jawa Timur juga.”

(Wawancara pada Rabu, 28 Maret 2018)

Sosialisasi dilakukan dengan memberi materi terkait syarat-syarat bisa memilih dan cara memilih yang benar. Oleh karena hal itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sosialisasi bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain KPU dan Panwaslu. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh Bakesbangpol beserta KPU dan Panwaslu sesuai dengan kapasitas pekerjaan masing-masing. Hal tersebut dijelaskan oleh Suhardono sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat kita menganut pada ketentuan Permendagri no. 9 Tahun 2005 yaitu untuk melakukan sosialisasi bersama dengan KPU dan Panwaslu kepada masyarakat. Jadi Kita memberikan sosialisasi berupa ajakan kepada masyarakat agar sadar betapa pentingnya turut berpartisipasi pada Pilwali, dan KPU memberikan materi terkait bagaimana cara memilih dan benar pokoknya terkait hal-hal teknis, sedangkan Panwaslu mensosialisasikan perihal pelanggaran-pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Sehingga semua elemen yang terlibat disini melakukan koordinasi.”

(Wawancara pada Rabu, 28 Maret 2018)

Pada sosialisasi yang dilakukan oleh Bakesbangpol dilakukan dengan cara pendidikan politik. Maksud dari pendidikan politik ialah dilakukan dalam cara

formal yaitu tatap muka antara pemateri dengan audiensi. Diungkapkan oleh Suhardono yaitu:

Pelaku kegiatan berjumlah 1.500 orang yang terdiri dari:

- a. Masyarakat Kota Malang yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, agama, perempuan, pemuda, partai politik, dan unsur perguruan tinggi.*
- b. Unsur Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, Penyelenggara Pemilu, Camat, dan Lurah se Kota Malang.*
- c. Narasumber: Desk Pilkada Kota Malang, Panwaslu Kota Malang dan KPU Kota Malang.*
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.*

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Rabu dan Kamis tanggal 21 dan 22 Maret 2018 serta hari Selasa, Rabu dan Kamis tanggal 2, 4 dan 5 April 2018, masing-masing pelaku terdiri dari 300 orang pada pagi hingga siang hari. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Akasia Hotel Savana Kota Malang (Jl. Letjen Sutoyo No. 30-34 Kota Malang). Kegiatan ini dilaksanakan swakelola oleh panitia kegiatan yang melibatkan antar instansi dengan fasilitas bahan perlengkapan/praktek berupa kaos dan materi yang terdiri dari:

- a. Peran Pemerintah Kota Malang dalam Pilkada Kota Malang 2018*
- b. Tahapan dan Tata Cara Pemungutan Suara dalam Pilkada 2018*

Pengawasan, Pemantauan, dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pilkada 2018. (Wawancara pada Rabu, 28 Maret 2018)

Berdasarkan data empiris penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2008 dan 2013, tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan. Tingkat partisipasi politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2008 sebesar 70,30% dari 557.381 Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan tingkat partisipasi politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013 sebesar 64,74% dari 612.464 Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap. Tren penurunan tingkat partisipasi tersebut bisa saja berlanjut pada Pilkada di masa mendatang khususnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018. Kecenderungan

turunnya partisipasi pemilih di beberapa daerah khususnya di Kota Malang juga perlu dicermati dan dicarikan solusinya. Strategi peningkatan partisipasi pemilih masyarakat terletak pada upaya sosialisasi politik kepada masyarakat agar memiliki sikap yang aktif dan partisipatif khususnya dalam Pilkada. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2018 di Kota Malang. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Faktor yang menjadi tolok ukur keberhasilan sosialisasi politik dalam kegiatannya ialah harus tepat sasaran. Hal tersebut agar apa yang menjadi tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, sasaran kepada siapa dan bertujuan untuk apa haruslah menjadi aspek yang diperhatikan. Dijelaskan oleh Suhardono terkait siapa saja yang menjadi sasaran sosialisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

“oh tentu, kita memperhatikan sasaran sosialisasi ini ditujukan untuk siapa, dan yang menjadi sasaran dari Bakesbangpol malang adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala kelurahan, beserta jajarannya, dan yang paling penting pemilih pemula yang biasanya ada perwakilan dari SMA untuk ikut sosialisasi. Kita pilih tokoh-tokoh tersebut karena agar mereka bisa memberikan informasi kepada lingkungan masyarakat yang lebih luas, karena pasti masyarakat lebih dekat dengan tokoh-tokoh seperti itu kan. Untuk pemilih pemula ini kenapa penting karena mereka baru pertama kali akan berpartisipasi untuk memberikan suaranya tentu butuh bimbingan dan arahan agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik dan benar, apalagi merekalah nantinya kan yang akan menjadi penerus generasi bangsa ini.”

(Wawancara pada Rabu, 28 Maret 2018)

Sasaran yang dimaksud oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut diharapkan agar para sasaran dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tingkat dibawahnya. Hal tersebut karena berkaitan dengan kemampuan kapasitas penyampaian sosialisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tidak dapat mencapai seluruh masyarakat Kota Malang.

Selain sosialisasi, Bakesbangpol juga memberikan pendidikan bagi pemilih pemulah hal tersebut dijelaskan oleh Suhardono sebagai berikut:

Pendidikan politik kita agendakan dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan pertama (Januari-Maret 2018) sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pelaku terdiri dari 400 orang pada pagi hingga siang hari. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel yang representatif dengan kapasitas 400 orang. Kegiatan ini dilaksanakan swakelola oleh panitia kegiatan yang melibatkan antar instansi dengan fasilitas bahan perlengkapan/praktek berupa kaos dan materi yang terdiri dari: Peran Pemerintah Daerah dalam Pemilu; Tahapan dan Tata Cara Pemungutan Suara dalam Pemilu 2019; Pengawasan, Pemantauan, dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pemilu 2019.

(Wawancara pada Rabu, 28 Maret 2018)

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan pendidikan politik masyarakat khususnya bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, kegiatan fasilitasi pendidikan politik bagi

generasi muda merupakan sarana yang sangat penting untuk membangun kesadaran generasi millennial agar tidak apatis terhadap isu-isu politik khususnya yang berkaitan dengan Pemilu. Selain agenda terstruktur para personal Bakesbangpol juga menjalankan kewajibannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara inisiatif individu, hal tersebut dijelaskan oleh Suhardono sebagai berikut:

“Pendekatan personal pasti ada, pegawai/pejabat di bakesbangpol mendorong masyarakat di lingkungan sekitarnya utk ikut mencoblos. Kita juga hadir dan jadi pemateri pada bbrp program/seminar yg dilaksanakan Ormas/Universitas yg bertujuan mensosialisasikan pelaksanaan pilkada. Hanya saja "tsunami politik" jd tantangan besar utk meningkatkan partisipasi masyarakat dlm pilkada, awalnya menargetkan tingkat partisipasi sebesar 70% di Kota Malang, tp faktanya hanya sekitar 66%. Di satu sisi sesuai arahan Pimpinan, tp di sisi lainnya juga merupakan inisiatif individu krn pada dasarnya kita menyadari pentingnya Pilkada. Bahkan kita juga sosialisasikan kpd warga jawa timur yg merupakan perantau di Kota Malang agar ttp menggunakan hak pilih dgn mengurus form A5 di KPU (utk Pilgub).”
(Wawancara pada hari Senin, 16 Juli 2018)

Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Malang dalam mencapai target 70% tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2018. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tidak hanya patut pada Undang-Undang yang berlaku, para aparat Bakesbangpol Kota Malang juga sadar akan pentingnya menyampaikan informasi serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar secara personal.

2. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat. Salah satu partisipasi politik masyarakat paling utama ialah memberikan hak suaranya untuk calon wakilnya di Pemerintahan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, KPU Kota Malang melakukan agenda sosialisasi terkait adanya. Kegiatan sosialisasi Pemilu termasuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota. Hal tersebut ditegaskan oleh Muhamad Sailendra selaku Sekretaris KPU Kota Malang:

“Kita kan pasti mengacu pada PKPU, sehingga segala bentuk peraturan yang tercantum dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 kita laksanakan. Salah satunya ya sosialisasi itu. Gunanya apa, ya jelas agar masyarakat tahu bahwa ada agenda Pemilihan Umum yang akan berlangsung.”
(Wawancara pada hari Senin, 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut, sosialisasi politik yang mengacu pada PKPU No. 8 Tahun 2017 tercantum pada pasal 3 yaitu bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam memilih, dan paling utama ialah guna meningkatkan partisipasi Pemilu dalam Pemilihan. Sehingga dalam sosialisasi materi yang perlu disampaikan adalah hal-hal teknis Pemilihan Umum terkait cara pencoblosan, syarat dan ketentuan agar

masyarakat bisa memberikan hak suara, serta pelanggaran-pelanggaran yang perlu dihindari. Untuk itu KPU Kota Malang perlu menyampaikan materi terkait hal-hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh Muhamad Sailendra selaku Sekretaris KPU Kota Malang:

“Materi yang disampaikan yang umum, ya seperti halnya masalah pilkada berkaitan dengan bagaimana cara untuk mencoblos, dan cara bagaimana agar bisa mencoblos yang harus memiliki ktp elektronik, harus masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan kalau tidak masuk ke dalam DPT atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) dia harus kemana dan bagaimana. Serta diberikan sosialisasi lain terkait aniti hoax, anti e-money politik, dan anti SARA.”
(Wawancara pada hari Senin, 14 Mei 2018)

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Malang bekerjasama dengan berbagai pihak. Seperti yang pada wawancara diatas, untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU bekerjasama sama dengan Dinas Kependudukan (Dispenduk). Sehingga sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pihak KPU Kota Malang saja tetapi juga Dispenduk. KPU Kota Malang juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan sosialisasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhamad Sailendra selaku Sekretaris KPU Kota Malang:

“Sosialisasi KPU ini di lakukan oleh komisioner divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat dibantu oleh kasubag teknis dan humas dan tim yang dibentuk dari personil KPU sendiri. Divisi pasti, personilnya gantian karena banyak kegiatan lain. Dan KPU juga tidak melakukan sosialisasi sendiri, tapi juga dengan bakesbangpol, dispenduk, serta panwaslu. Karena setiap dari instansi tersebut memiliki kapasitas masing-masing tentang apa yang disampaikan sehingga kita lakukan kerjasama.”
(Wawancara pada hari Senin, 14 Mei 2018)

Materi sosialisasi politik oleh KPU Kota Malang yang bekerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan kapasitas pekerjaan setiap instansi tersebut. KPU memberikan materi terkait hal-hal teknis seperti yang telah disebutkan di atas, Dispenduk membantu dalam hal jumlah penduduk yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, sedangkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mensosialisasikan perihal pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Panwaslu dalam tugasnya juga mengoreksi kinerja dari KPU Kota Malang agar tidak terjadi penyelewengan kinerja selama proses persiapan PILKADA maupun saat PILKADA berlangsung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam melakukan sosialisasi politik masyarakat menggunakan berbagai metode. Muhamad Sailendra selaku Sekretaris KPU Kota Malang mengungkapkan beberapa metode yang digunakan:

“metode yang dilakukan ada beberapa macam. Seperti tatap muka, artinya kita sosialisasi di dalam ruangan dan kita sebagai narasumber serta ada audiensi. Biasanya tatap muka ini kita diundang dari muhammadiyah, nu, dan organisasi lain. Kemudian di media massa kita juga lakukan dengan radio, televisi, koran-koran, ada mobil keliling juga milik KPU. Serta ada alat peraga sosialisasi yang dibuat KPU Malang.”

(Wawancara pada hari Senin, 14 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut, KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 melakukan sosialisasi dengan menggunakan 3 metode. *Pertama*, melalui komunikasi tatap muka. Kegiatan komunikasi tatap muka dilakukan dalam bentuk seminar, *workshop*, pendidikan pemilih, dan ceramah. Hal ini diwujudkan dalam kegiatannya sosialisasi formal pada Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kota Malang Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol

bekersama dengan KPU dan Panwaslu, serta kegiatan Sosialisasi Peran Media Digital dalam Mensukseskan Pilkada Kota Malang Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah dan KPU. *Kedua*, melalui komunikasi dan penyampaian melalui media. Penyampaian melalui media dilakukan dalam bentuk tulisan, gambar, audio visual, website, iklan, *talk show*, dan debat kandidat. KPU Kota Malang memiliki beberapa kanal media sosial sendiri seperti Twitter dengan alamat @kpumalangkota, instagram dengan nama kpukotamalang.official, facebook dengan nama KPU Malang Kota, youtube dengan nama Garudeyatv, dan website dengan alamat www.kpud-malangkota.go.id. KPU juga melakukan sosialisasi melalui media massa lain yaitu radio dan tv lokal yang ada di Malang. Selain itu, KPU Kota Malang juga menggunakan alat peraga sosialisasi seperti umbul-umbul, spanduk, dan poster yang terpasang di jalan-jalan kota Malang dan ditempel di kecamatan serta kelurahan yang ada di Kota Malang. *Ketiga*, sosialisasi dilakukan melalui mobilisasi sosial. Metode mobilisasi sosial dilakukan melalui himbauan peran serta seluruh komponen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok-kelompok masyarakat, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi Pilkada Kota Malang Tahun 2018. Hal tersebut dilakukan seperti turut hadir dalam acara ‘Malang 104 Sound of Unity’ oleh Malang Sound Community dan Musik Malang Bersatu di Stadion Gajayana yang dijadikan kesempatan oleh KPU Kota Malang sebagai media sosialisasi Pilkada Kota Malang Tahun 2018. Selain itu, KPU Kota Malang mengadakan

pagelaran Seni dan Budaya dalam rangka Menyongsong 1 Tahun Menjelang Pemilohan Umum Tahun 2019 yang di dalamnya juga menyampaikan hal-hal terkait Pilkada 2018. Mobilisasi sosial juga digunakan sebagai wadah untuk melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula, seperti 'Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula' yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dimana KPU sebagai pemateri bersama dengan pihak Bakesbangpol dan Panwaslu. Selain kegiatan dan agenda struktural, para aparat KPU Kota Malang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat dekat lingkungan tinggal mereka, Muhamad Sailendra selaku Sekretaris KPU Kota Malang mengungkapkan:

“kami menyadari akan pentingnya partisipasi masyarakat, dan tentu untuk mencapai hasil yang maksimal kita tetap mengoptimalkan peran-peran kita baik di dalam maupun diluar kegiatan dari KPU itu sendiri. Contohnya, masing-masing dari kami semua selalu mengajak warga sekitar kami untuk tidak lupa mencoblos dan memebritahu mereka pentingnya suara yang mereka berikan.”
(Wawancara pada hari Senin, 16 Juli 2018)

Memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi tanggungjawab pribadi personal KPUD Kota Malang. Sosialisasi dan pendidikan secara personal dilingkungan masyarakat membuat hubungan antara masyarakat dan aparat menjadi lebih dekat. Al tersebut akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat dan dapat mempengaruhi secara emosional bagi kerabat maupun masyarakat sekitar.

3. Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Masyarakat.

Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.” Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat setidaknya dilakukan dalam empat metode, yaitu:

Pertama, sosialisasi kepada kader. Partai Politik melakukan pembinaan kader agar dapat meneruskan kepemimpinan partai kedepannya. Menuju agenda Pilkada Kota Malang 2018, partai politik meningkatkan intensitas pembinaan kepada para kader berupa sosialisasi. Melalui kader-kader politik tersebut, materi sosialisasi diarpakan akan disampaikan kepada keluarga dan lingkungan masyarakat dimana para kader tinggal. Beberapa partai politik yang melakukan sosialisasi diantaranya adalah Demokrat, Golkar, dan PKB. Bagi para partai tersebut sosialisasi kepada kader dianggap penting. Fajar Kuswardhana selaku Komisi Pemenangan Pemilu partai Demokrat mengatakan:

“dalam partai kami, tentunya yang paling utama adalah kader-kader yang kita punya. Karena nanti merekalah yang akan masuk ke masyarakat lebih luasnya. Karenanya sosialisasi kepada kader ini kita utamakan. Supaya mereka bisa mengajak orang-orang disekitar mereka untuk memberikan dukungan kepada kami.”

(Wawancara pada hari Selasa, 10 April 2018)

Menurut partai demokrat, sosialisasi kepada kader menjadi hal yang utama sebagai langkah mencari pendukung untuk pasangan calon yang diajukan. Selain itu, dari partai Golkar Rudi Nugroho selaku Wakil Bidang pemenangan pemilu mengatakan:

“kita juga melakukan sosialisasi kepada kader. Supaya mereka tahu dan turut aktif untuk menjalankan proses Pilkada ini nantinya. Tentu mereka menjadi tombak bagi kita karena juga nanti mereka yang akan mengurus organisasi partai ini, sehingga mereka harus betul-betul tahu bagaimana proses berjalannya agenda Pilkada ini dari awal hingga akhir.”

(Wawancara pada hari Kamis, 03 Mei 2018)

Bagi partai Golkar, sosialisasi kepada kader sangatlah diperlukan. Hal tersebut dikarenakan kader partai merupakan generasi penerus bagi kepengurusan partai itu sendiri. Oleh karena itu, kader diharapkan untuk mengetahui proses berjalannya agenda Pilkada Kota Malang 2018 guna mendukung pasangan calon partai Golkar. Begitupun dengan Arif Wahyudi selaku Ketua Pemenangan Pemilu partai PKB mengatakan:

“kepada kader-kader partai kita berikan sosialisasi terkait adanya agenda Pilkada. Sosialisasi ini diberikan supaya para kader faham akan tugas dan wewenangnya terhadap partai, dan juga agar seluruh kader mampu berbicara dilingkungan masyarakat luar untuk menarik perhatian masyarakat.”

(Wawancara pada hari Selasa, 24 April 2018)

Sosialisai yang dilakukan, secara tidak langsung mengajarkan para kader berpikir progresif untuk kesuksesan partai. Melihat hal tersebut, partai politik akan memberikan pelatihan bagi kadernya tentang bagaimana cara berbicara di hadapan publik, menggiring opini publik dan bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Tujuan adanya sosialisasi ini agar kader memberikan

pengenalan kepada masyarakat tentang partai politik tersebut sekaligus untuk mempromosikan tujuan yang sudah ditetapkan agar mendapatkan dukungan.

Kedua, optimalisasi sayap partai. Kinerja dan pergerakan partai politik tidak lepas dari bantuan organisasi sayap partai. Banyaknya anggota yang ada pada organisasi sayap partai dapat menentukan jumlah peningkatan partisipasi politik masyarakat. Organisasi sayap partai pada umumnya tidak hanya berada pada tataran nasional, tetapi juga ada pada tingkat daerah. Walaupun kegiatan atau aktifitas organisasi sayap partai tidak cukup eksis, apabila saat menjelang agenda Pemilu akan menunjukkan dirinya di masyarakat. Eksistensi organisasi sayap partai dapat digunakan sebagai alat mencari masa dan dukungan bagi pasangan calon yang diusung oleh partai politik tersebut.

Organisasi sayap partai digunakan sebagai alat guna mewadahi kepentingan-kepentingan masyarakat diluar kepentingan politik. Walau demikian, jumlah mereka dapat digunakan sebagai suara dukungan untuk kepentingan politik. Oleh sebab itu, jumlah massa yang dimiliki organisasi sayap partai dapat dikatakan mampu secara otomatis meningkatkan partisipasi politik. Kedudukan organisasi sayap partai yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan mampu mensukseskan pasangan calon yang diusung oleh partai. Beberapa partai besar di Kota Malang memiliki organisasi sayap partai diantaranya seperti Demokrat, Golkar, dan PKB. Berikut adalah organisasi-organisasi sayap partai yang dimiliki oleh ketiga partai tersebut:

Tabel 11. Daftar Nama Organisasi Sayap Partai

No.	DEMOKRAT	GOLKAR	PKB
1.	Muda-Mudi Demokrat (MMD)	Angkatan muda partai golkar (AMPG)	Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa)
2.	Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI)	Kesatuan perempuan partai golkar (KPPG)	Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba)
3.	Kader Muda Demokrat (KMD)	angkatan muda pemuda indonesia (AMPI)	Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB)
4.	Ikhwanul Muballigin	himpunan wanita karya (HWK)	
5.	Gerakan Mahasiswa Merah Putih	Al-Hidayah	
6.		Satkar Ulama	
7.		Majelis Dakwah Indonesia (MDI)	

Sumber: Hasil riset peneliti melalui wawancara ketiga partai (Demokrat, Golkar, PKB)

Optimalisasi organisasi sayap partai pada umumnya digunakan untuk mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang enggan terlibat dengan partai politik maupun sekelompok masyarakat yang tidak dapat masuk kedalam partai politik karena alasan tertentu. Sehingga, organisasi sayap partai tersebut dapat mengurangi kesulitan partai politik untuk merangkul kelompok-kelompok masyarakat yang demikian. Fajar Kuswardhana selaku Komisi Pemenangan Pemilu partai Demokrat mengatakan:

“sayap partai kita optimalkan, walau Demokrat merupakan partai yang masih muda beberapa sayap partai kita sudah ada di daerah-daerah. Terutama untuk anak-anak muda dan mahasiswa seperti Kader Muda Demokrat (KMD) dan Gerakan Mahasiswa Merah Putih (Gema MP). Karena kaum muda semangatnya masih tinggi dan menjadi ikon yang bagus bagi daya tarik partai. Dan tentu Dukungan dari seluruh anggota sayap partai sangat berimplikasi banyak terhadap kesuksesan pada paslon kami yaitu SAE pada Pilkada 2018 ini.”

(Wawancara pada hari Selasa, 10 April 2018)

Partai politik Demokrat yang usianya terbilang masih cukup muda beranggapan bahwa organisasi sayap partai memang sangat diperlukan. Optimalisasi sayap partai guna mendukung pasangan calon yang diusung, mengingat partai Demokrat membutuhkan massa yang cukup banyak daripada partai-partai lain yang lebih tua usianya. Tak hanya partai Demokrat, partai Golkar yang usianya jauh lebih tua juga memiliki organisasi partai sayap yang lebih matang. Rudi Nugroho selaku Wakil Bidang pemenangan pemilu partai Golkar mengatakan:

“Golkar memiliki organisasi sayap yang bisa diikuti oleh berbagai golongan masyarakat. Karena ada sekelompok atau golongan orang-orang yang tidak bisa masuk kedalam struktur partai, seperti PNS, para tokoh-tokoh agama yang tidak mau terlibat partai politik secara langsung, dan lain sebagainya. Untuk itu organisasi sayap ini sebagai wadah bagi mereka. Dengan banyaknya wadah tersebut, maka orang-orang golkar bisa masuk kedalam seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, hasilnya akan berdampak positif di Pilkada 2018 ini nanti.”

(Wawancara pada Kamis, 03 Mei 2018)

Selain partai Demokrat dan Golkar, PKB juga memiliki beberapa organisasi sayap partai. Optimalisasi sayap partai juga dilakukan oleh PKB guna mensukseskan agenda Pilkada Tahun 2018. Arif Wahyudi selaku Ketua Pemenangan Pemilu partai PKB mengatakan:

“selain sebagai sayap partai juga merupakan bagian upaya untuk mengoptimalkan penyuksesan pasangan Abah Anton dan Samsul. Sayap partai guna mampu merengkuh golongan muda seperti mahasiswa agar partai tidak pragmatis, sehingga memerlukan wajah-wajah anak muda. Sehingga bisa menjadi kekuatan bagi partai untuk memenangkan Pilkada ini.”

(Wawancara pada hari Selasa, 24 April 2018)

Organisasi sayap yang dimiliki oleh partai politik akan lebih mampu menarik masyarakat dari berbagai golongan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih menyesuaikan kepada kegiatan yang cocok. Kegiatan atau aktifitas yang sesuai akan menarik simpati masyarakat, dan partai politik akan mudah untuk menanamkan nilai-nilai politik kepada masyarakat.

Ketiga, pendidikan politik. Tugas utama partai politik ialah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik tidak hanya diberikan kepada kader-kader partai saja, tetapi juga kepada masyarakat umum. Walau demikian, dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum oleh partai masih terbilang cukup minim. Hal tersebut dapat dilihat dari agenda yang dilakukan oleh partai politik, yang hanya memberikan pendidikan politik kepada kader-kader partai saja. Pendidikan politik kepada masyarakat umum seringkali hanya dilakukan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Seperti halnya ketiga partai (Demokrat, Golkar, dan PKB) yang ada di Kota Malang, memberikan pendidikan politik sebatas sebagai bentuk agenda kampanye agar masyarakat tidak melakukan Golput. Metode pendidikan politik oleh partai demokrat dipaparkan oleh Fajar Kuswardhana selaku Komisi Pemenangan Pemilu partai Demokrat yang mengatakan:

“dengan adanya pilkada ini adalah suatu sistem pendidikan politik tinggal bagaimana kami mengemas, mencari simpati kepada kaum milenial kaitannya

pemilih pemula itu termasuk ikon yang dimiliki parti demokrat seperti mas Emil, mas AHY, dan calon wakil gubernur bu khofifah. Sehingga itu bisa menarik kaum milenial bagi partai kami. Pada pendidikan politik kita berbicara program, berbicara figur, berbicara hasil, tidak ada hoax, tidak ada money politik, tidak ada black kampanye.”

(Wawancara pada hari Selasa, 10 April 2018)

Agenda-agenda Pemilu seperti Pilkada bagi partai demokrat menjadi momentum untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik oleh partai Demokrat dikemas dengan cara memanfaatkan ikon yang dimiliki oleh partai. Ikon yang dimaksud ialah berupa tokoh-tokoh seperti AHY, Emil, dan khofifah yang dianggap mampu menarik simpati kaum milenial khususnya pemilih pemula. Selain Demokrat, partai Golkar juga melakukan pendidikan politik. Rudi Nugroho selaku Wakil Bidang pemenangan pemilu partai Golkar mengatakan:

“Menegenai peran partai golkar dalam pendidikan politik yaitu mendidik, menginformasikan dan membujuk masyarakat untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Partai politik juga mendidik warga negara supaya mereka tau mengapa mereka perlu turut serta dalam pemilu sebagai salah satu bentuk partisipasi politik. Pendidikan kita berikan kepada kader-kader, tokoh-tokoh masyarakat, dan pada organisasi sayap. Untuk kemasayarakat lebih luas kita lakukan saat agenda-agenda kampanye. Karena sebetulnya para kader kita juga tentu sebelum itu juga menyalurkan pengetahuan dan informasi terkait politik kepada masyarakat dilingkungan terdekat mereka.”

(Wawancara pada hari Kamis, 03 Mei 2018)

Pendidikan politik partai Golkar dilakukan melalui kader-kader partai dan organisasi sayap partai untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Para kader dan tokoh masyarakat dianggap lebih dekat dengan lingkungan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat mampu terjalin lebih akrab. Selain pratau Demokrat

dan Golkar, partai PKB juga melakukan pendidikan politik. Arif Wahyudi selaku Ketua Pemenangan Pemilu partai PKB mengatakan:

“Pendidikan atau pelatihan kepemimpinan kader partai politik di tingkat dasar menjadi penting. Tidak hanya untuk mendukung visi dan misi partai dari tingkat ranting, pendidikan politik bagi kader pertama juga merupakan cara untuk menyebarluaskan nilai-nilai baik politik sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat langsung dari tingkat dasar.”

(Wawancara pada hari Selasa, 24 April 2018)

Bagi partai PKB kota Malang, pendidikan politik diberikan kepada kader partai. Kader partai yang telah menerima pendidikan politik, diwajibkan untuk menyebar informasi kepada masyarakat. Kader partai juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

Keempat, kampanye partai. Kampanye merupakan salah satu cara yang digunakan oleh partai politik untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. pesan yang disampaikan harus disusun secara cermat sebelum disebarkan dan dikonsumsi oleh media dan publik. Saat pemilu, kampanye berguna sebagai media untuk menyampaikan visi dan misi kandidat agar masyarakat bisa lebih mengenal lagi siapa calon yang akan dipilihnya. Kampanye menjadi sebuah tindakan dengan tujuan untuk mencapai hasil dalam bentuk dukungan bagi suatu pemungutan suara. Strategi kampanye pemilu merupakan persoalan yang sangat penting karena strategi kampanye menjadi bagian terpenting dari rangkaian kegiatan pemilihan. Ketiga partai (Demokrat, Golkar, dan PKB) kota Malang memiliki strategi kampanye untuk agenda Pilkada Kota Malang 2018. Fajar Kuswardhana selaku Komisi Pemenangan Pemilu partai Demokrat yang mengatakan:

“dalam konsep partai kami ada dua unsur kemenangan. Unsur struktural dan unsur tim kampanye gabungan. Unsur struktural konsentrasi pada titik-titik kantong-kantong suara kami yang diketahui dari data yang diperoleh pada tahun 2014, jadi di daerah mana saja. Yang diluar ini menggunakan tim gabungan. Tim gabungan ini berupa kerjasama kampanye dengan simpatisan, komunitas, dan kelompok masyarakat. pada kampanye Pilkada 2018 ini, kita menawarkan program, menawarkan solusi-solusi terhadap kendala-kendala di masyarakat selama itu bisa langsung action, seperti ada orang sakit dan BPJSnya tidak jalan itu bisa langsung kita bantu. Dan yang utama menyampaikan visi-misi paslon.”

(Wawancara pada hari Selasa, 10 April 2018)

Partai Golkar juga melakukan kampanye untuk menarik perhatian masyarakat.

Kampanye dalam Pilkada 2018 Demokrat dan Golkar berkoalisi, keduanya saling bersinergi untuk bekerjasama. Rudi Nugroho selaku Wakil Bidang kemenangan pemilu partai Golkar menambahkan:

“dalam kampanye, kita menggunakan Alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, pamflet, poster, peflet. Alat penunjang kampanye ada kaos, kalender, payung, buku, dsb yang tidak boleh lebih dari 25rb harganya berdasarkan aturan PKPU 5, 6, 7 yang digunakan oleh partai. Alat peraga ini agar masyarakat mudah mengenal dan mengingat dari paslon yang kita usung.”

(Wawancara pada hari Kamis, 03 Mei 2018)

Partai PKB Kota Malang juga melakukan kampanye dengan metode yang tidak jauh berbeda dengan partai Demokrat dan Golkar. Arif Wahyudi selaku Ketua Kemenangan Pemilu partai PKB mengatakan:

“untuk pilkada 2018 ini kampanye kita lakukan setiap hari. Ada tim yang blusukan ke daerah-daerah. Dan ada tim pencitraan dan propaganda melalui media. Kita lakukan konsolidasi dengan para kiai-kiai, pengasuh pondok pesantren, ulama, dan guru ngaji. Untuk alat peraga kampanye kita adakan sesuai dengan peraturan KPU yang sudah ada yaitu jumlah maksimal baliho 5 di kota, umbul 20 di setiap kecamatan. 2 spanduk/kelurahan. Itu adalah yang dibiayai oleh KPU dan yang dibiayai partai max 150% dari dana yang dikeluarkan KPU.”

(Wawancara pada hari Selasa, 24 April 2018)

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh ketiga partai tersebut, kampanye menjadi metode paling efektif untuk mengenalkan pasangan calon wali Kota Malang 2018. Kampanye dilakukan dengan berbagai metode seperti branding mobil, propaganda media, poster, baliho, umbul-umbul, dan agenda kampanye besar dimana pasangan calon melakukan orasi dan penyampaian visi-misi di tempat-tempat umum atau terbuka. Visualisasi yang dilakukan dalam kampanye tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan pasangan calon Wali Kota Malang tetapi untuk mengajak masyarakat agar memberikan dukungan dan suara mereka pada Pilkada 2018.

4. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (NU dan Muhammadiyah)

Lembaga sosial yang berada paling dekat dengan masyarakat adalah organisasi masyarakat atau lebih sering disebut *civil society*. Karena kedekatannya dengan masyarakat yang lebih kental, banyak pihak yang menaruh harapan untuk bisa secara langsung menyentuh masyarakat agar turut serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Organisasi masyarakat yang memiliki pengikut banyak di Kota Malang ini antara lain adalah NU dan Muhammadiyah. Selain bidang keagamaan, kedua organisasi tersebut aktif dalam melakukan dakwah kenegaraan.

a. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat atau biasa disingkat ormas yang cukup besar di Kota Malang. Setiap pelosok daerah kota Malang hampir selalu ada anggota NU. Dengan banyaknya warga NU atau yang bisa disebut warga Nahdliyin, NU mampu menyebarluaskan informasi dengan baik. Informasi yang

diberikan biasanya dilakukan melalui dakwa-dakwah di daerah. Dakwah yang disampaikan oleh NU tidak hanya berkaitan tentang agama tetapi juga terkait kenegaraan. Hal tersebut dikarenakan latar belakang NU yang pernah masuk pada dunia politik praktis pada masa orde lama. Pada tahun 50an NU menjadi Partai Politik yang memenangkan pemilu. Saat NU menjadi partai, nyatanya dianggap tidak kondusif untuk mengelola kemasyarakatan yang ternyata kontraproduktif. Sehingga pada tahun 1984 terjadi khittah, dimana NU tidak lagi menjadi partisipasi politik aktif tetapi sebagai politik kebangsaan. Politik kebangsaan ini artinya NU berpolitik tapi tidak masuk dalam struktur partai, tetapi mengelola masyarakat agar menjadi lebih maju, agamis, dan toleran. Arah dari NU ialah memberdayakan masyarakat, dimana berdaya secara politik, ekonomi, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan umumnya adalah mencerdaskan masyarakat. NU sendiri memiliki saluran politik seperti PPP dan PKB. Walau demikian, tidak memungkiri untuk berada di Partai lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Asif Budairi selaku Sekertaris PCNU Kota Malang:

"Kita memiliki banyak kader yang ada di partai PKB dan PPP, juga partai lain. Tapi atas nama personal, hanya latar belakangnya saja yang NU. Hal tersebut terbukti dengan bahwa seluruh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota yaitu Anton, Samsul, Wanedi, Nanda, Sutiaji, dan Edi yang berlatar belakang NU."

(Wawancara pada hari Rabu, 04 April 2018)

Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Malang, terlihat cukup dekat dengan PKB, melihat bahwa ada beberapa agenda kampanye PKB dengan pasangan calon Anton dan Samsul melakukan pengajian dengan menggaet NU. hal tersebut dibenarkan oleh Asif Budairi selaku Tanfidziyah NU:

“PKB tidak bisa lepas dari NU karena memang PKB dilahirkan oleh tokoh-toko NU sampai menjadi partai yang besar seperti saat ini. Dan hubungannya adalah seperti hubungan anak yang dilahirkan artinya bagaimanapun ya harus menjalin silaturahmi dan sebagian besar simpatisan juga adalah warga nahdliyin.”

(Wawancara pada hari Rabu, 04 April 2018)

Melihat hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa NU memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia politik. Untuk merealisasikan politik kebangsaan sebagai arah gerak NU, aktivitas yang dilakukan berupa adanya pemberdayaan politik. Asif Budairi selaku Sekertaris PCNU Kota Malang mengatakan:

“Pemberdayaan politik berupa himbauan kepada warga Nahdliyin untuk tidak melakukan golput. Walaupun memiliki pilihan yang berbeda jangan sampai terjadi bentrok. Bahwa rutinitas berpolitik 5th sekali adala hal yang biasa, inilah yang harus disadarkan kepada masyarakat. NU berperan penting dalam menjaga kedamaian, terutama dengan perbedaan pandangan dan pilihan. Dengan adanya perbedaan tetap dibungkus dengan adanya kesatuan negara republik indonesia. Menyadarkan masyarakat harus memilih dan terlibat melaksanakan pesta demokrasi. Yang penting adalah pemberdayaan umat yang demokratis untuk memilih. Karena NU adalah politik kebangsaan sehingga tidak secara langsung seperti yang dilakukan partai-partai pada umumnya yang notabenenya sebagai politik kekuasaan.”

(Wawancara pada hari Rabu, 04 April 2018)

Pada pemberdayaan politik ini, NU mendidik kader-kadernya untuk mencitai negara dan memiliki toleransi yang tinggi. Kader yang berada di dalam naungan NU antaranya Ikatan Pelajar NU (IP NU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPP NU). Dua organisasi anak NU ini memiliki anggota yang banyak dan merupakan anggota yang aktif. Sehingga pendidikan politik sangat efektif diberikan karena yang berada didalamnya adalah golongan kaum muda. Selain itu, terdapat pula Muslimat yang beranggotakan ibu-ibu pengajian dibawah NU. Melalui pengajian ini, dapat

disampaikan dakwah-dakwah kenegaraan untuk meningkatkan partisipasi politik golongan ibu-ibu.

b. Muhammadiyah

Organisasi masyarakat kedua yang memiliki anggota besar ialah Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir pada tahun 1912. Pilar kokoh dalam gerakannya adalah pendidikan. Pendidikan digunakan oleh Muhammadiyah untuk menciptakan kader yang menjadikan individu sebagai orang yang dapat mencerahkan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Walaupun bergerak dalam bidang keagamaan, Muhammadiyah juga bergerak dalam dunia politik. Arah gerak politik Muhammadiyah sama dengan NU yakni politik kebangsaan. Imam Abda'i selaku Sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang mengatakan:

“Keterikatan Muhammadiyah dengan politik ialah, dimana Muhammadiyah tidak berpolitik tapi tidak apatis terhadap politik. Jadi kecintaan Muhammadiyah terhadap NKRI sudah harga mati dan mendukung negara kesatuan.”

(Wawancara pada hari Jum'at, 20 April 2018)

Terkait dengan dunia politik, Muhammadiyah memiliki hubungan kusus dengan PAN. Hubungan ini terjalin karena PAN didirikan oleh Amin Rais yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah. Walaupun demikian, kader-kader Muhammadiyah tidak hanya berada didalam PAN teteapi juga partai-partai yang lain.

Untuk menjalankan politik kebangsaan yang menjadi arah politik, Muhammadiyah memberikan pendidikan politik terhadap warga Muhammadiyah dan kepada seluruh kadernya. Imam Abda'i selaku Sekertaris Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Malang mengatakan Pendidikan politik dilakukan melalui berbagai metode:

“pendidikan politik di Muhammadiyah ada yang namanya LHKP disana menggodok khusus tentang politik, kemudian ada ngaji politik yang memberikan keleluasaan bagi warga Muhammadiyah untuk memilih saat ada perayaan pemilu.”

(Wawancara pada hari Jum’at, 20 April 2018)

Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan politik memiliki banyak metode, diataranya ialah Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) yang didalamnya khusus membicarakan dan berdiskusi terkait masalah-masalah politik Indonesia, kemudian adanya sekolah kader yang ditujukan kepada golongan muda, serta terdapat training yang dinamakan Ideopolitor dimana training ini mengajarkan perihal ideologi, politik, dan berorganisasi. Untuk memperluas pendidikan politiknya, Muhammadiyah melakukan dakwah ke daerah-daerah di Kota Malang. Imam Abda’i selaku Sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang mengatakan:

“dakwah muhammadiyah terdapat dua yaitu bilhikmah (bijaksana) dan bisyiaysah (berpolitik) artinya tidak terlibat dengan politik praktis sehingga cara berpolitiknya adalah seperti pelangi warna-warni yang mana bebas memilih partai manapun, bukan harus partai PAN.”

(Wawancara pada hari Jum’at, 20 April 2018)

Terkait dengan agenda Pilkada Kota Malang tahun 2018, Muhammadiyah melakukan sosialisasi tidak hanya dengan cara-cara dakwah tetapi juga dengan bentuk kegiatan lain seperti adanya agenda ‘Sosialisasi Peran Media Digital dalam Mensukseskan Pilkada Kota Malang Tahun 2018’ oleh pemuda Muhammadiyah. Selain itu juga terdapat kegiatan sosialisasi oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada warga Muhammadiyah yang diadakan oleh Pimpinan

Daerah Muhammadiyah (PDM). Imam Abda'i selaku Sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang mengatakan:

“mengundang paslon untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat muhammadiyah. Sehingga warga muhammadiyah menjadi pemilih yang cerdas. Muhammadiyah memberi pengetahuan tentang informasi terkait seluruh paslon agar tidak terjebak dengan politik praktis. Dan memberikan pendidikan bahwa tidak boleh apatis terhadap politik, agar faham bahwa arus memilih dengan pandangan sendiri mana yang baik untuk dipilih. Tidak diarah-arahkan untuk memilih salah satu paslon saja.

(Wawancara pada hari Jum'at, 20 April 2018)

5. Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Masyarakat.

Media memiliki peran yang sangat signifikan di era globalisasi seperti saat ini. Melalui media, komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Terutama untuk Pilkada, media menjadi saluran alternatif yang efektif bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah agar terjadi peningkatan partisipasi politik. Media yang sangat efektif guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Televisi

Televisi menjadi media yang sangat dengan semua masyarakat diberbagai kalangan karena kemudahan aksesnya. Salah satu stasiun televisi lokal yang berperan aktif dalam sosialisasi Pilkada adalah stasiun televisi Media Husada Televisi atau biasa disebut MHTv. Stasiun televisi MHTv melakukan kerjasama

dengan KPU untuk memberikan informasi terkait Pilkada Kota Malang Tahun 2018. MHTv selalu aktif memberikan pemberitaan terkait proses berlangsungnya persiapan Pilkada Kota Malang kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Vivi selaku koordinator teknis:

“kerjasama dengan KPU yang mana KPU mengumpulkan media tentang agenda-agenda kegiatan kampanye dari paslon. Jadi kita seperti ikut serta proses pemilihan nomer urut paslon untuk diberitakan kepada masyarakat dan peliputan debat pilkada agar masyarakat bisa tahu paslon mana yang cocok. Dan tujuan pemberitaan kita adalah menyampaikan pemberitaan yang real seperti kegiatan-kegiatan jadwal pelaksanaan pencoblosan pilkada, visi-misi para paslon seperti itu.”
(Wawancara pada hari Selasa, 03 April 2014)

Berdasarkan dari wawancara yang disampaikan oleh Vivi selaku MHTv hanya memberikan informasi berupa hal-hal teknis dan umum. Pemberitaan tersebut berupa kandidat pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota, Informasi seputar Visi dan Misi yang dibawa oleh para Paslon, serta proses kegiatan KPU perihal persiapan Pilkada Kota Malang Tahun 2018.

b. Radio

Media elektronik berikutnya yang digunakan sebagai media sosialisasi adalah radio. Walaupun saat ini banyak media yang bermunculan, radio masih tetap bisa dianggap eksis dalam dunia informasi hingga kini. Radio masih memiliki banyak pendengar terutama kalangan orang-orang dewasa dan remaja. Walaupun tanpa visualisasi radio memiliki caranya sendiri agar mampu bersaing dan menarik hati para pendengar. Salah satu radio yang masih banyak pendengarnya adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI). RRI memiliki berbagai

chanel yang di sesuaikan dengan kalangan yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, RRI menyelenggarakan siaran dengan 4 program:

1. **Pro 1:** Pusat siaran pemberdayaan masyarakat
2. **Pro 2:** Pusat siaran kreatifitas anak muda
3. **Pro 3:** Pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio
4. **Pro 4:** Pusat siaran budaya dan pendidikan

LPP RRI menciptakan acara-acara khusus menjelang Pilkada. Salah satunya adalah dialog interaktif dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Pilkada. Dialog dilakukan antara lain dengan KPU Kota Malang sebagai penyelenggara Pilkada, dengan pasangan calon wali kota dakil wali kota, dan Tim sukses dari tia pasangan calon wali kota dakil wali kota. Dahlia Susandra selaku Kepala Sub Divisi Berita Ulasan dan Dokumentasi mengatakan:

“Dan untuk pilkada kita melakukan komunikasi dengan KPU, untuk melakukan agenda peliputan akan ada jadwal para paslon kampanye dari KPU. Partisipasi RRI adalah berupa liputan paslon apabila ada kampanye, penyampaian visi misi para paslon. Untuk penyiaran radio kita memberikan ruang bagi seluruh paslon untuk menyampaikan visi-misinya dan kita tidak ada keberpihakan untuk satu paslon saja jadi semua paslon kita undang. Sealin itu juga ada tim sukses paslon yang datang.”

(Wawancara pada hari Senin, 02 April 2018)

**Tabel 12. Jadwal Rencana Pelaksanaan: Program “Nuansa Demokrasi”
Pilwali Kota Malang. Setiap Selasa, Pukul: 10.00-10.55 WIB**

No.	Hari/Tanggal	Topik	Nara Sumber
1.	6 Februari 2018	Pentingnya Pilkada bagi masa depan daerah	Pengamat/Pakar Politik
2.	13 Februari 2018	Peran LPP dalam Pilkada	KPU Kota Malang

No.	Hari/Tanggal	Topik	Nara Sumber
3.	20 Februari 2018	Ayo awasi dan cermati Pilwali	Panwas Kota Malang
4.	27 Februari 2018	Pendidikan dan Budaya	Paslon/Timses/Jurkam Paslon 1
5.	6 Maret 2018	Pendidikan dan Budaya	Paslon/Timses/Jurkam Paslon 2
6.	13 Maret 2018	Pendidikan dan Budaya	Paslon/Timses/Jurkam Paslon 3
7.	20 Maret 2018	Ekonomi dan Pembangunan	Paslon/Timses/Jurkam Paslon 1
8.	27 Maret 2018	Ekonomi dan Pembangunan	Paslon/Timses/Jurkam Paslon 2
9.	3 April 2018	Ekonomi dan Pembangunan	Paslon/Timses/Jurkam Paslon 3
10.	10 April 2018	Awas potensi bahaya Money Politik	Panwas dan Akademisi
11.	17 April 2018	Tekan Golput, Tingkatkan Partisipasi	KPU dan Akademisi
12.	24 April 2018	Kesiapan Logistik Pilwali	KPU Kota Malang
13.	8 Mei 2018	Pariwisata dan Mengatasi Macet	Paslon/Timses/Jurkam Paslon 1
14.	15 Mei 2018	Pariwisata dan Mengatasi Macet	Paslon/Timses/Jurkam Paslon 2
15.	22 Mei 2018	Pariwisata dan Mengatasi Macet	Paslon/Timses/Jurkam Paslon 3
16.	29 Mei 2018	Pengamanan Pilwali Kota	Kepolisian
17.	5 Juni 2018	Melawan Hoax, Ujaran Kebencian dan Provokasi	Akademisi

No.	Hari/Tanggal	Topik	Nara Sumber
18.	12 Juni 2018	Pemilih cerdas, Pemilu berkualitas	Akademisi
19.	3 Juli 2018	Hasil rekapitulasi pilwali	KPU Kota Malang
20.	10 Juli 2018	Hasil pemantauan dan Penindakan pelanggaran	Panwas Kota Malang
21.	17 Juli 2018	Evaluasi hasil pilwali	Pengamat / Pakar Politik

Sumber: Riset Peneliti

**Tabel 13. Jadwal Rencana Pelaksanaan:
Program “Kampanye Dialogis” Pilwali Kota Malang, Setiap Kamis pukul
10.05-10.55 WIB**

No.	Hari/Tanggal	Topik	Nara Sumber
1.	8 Februari 2018	Tahapan Pilwali Kota Malang	KPU dan Panwas Kota Malang
2.	15 Februari 2018	Mengenal Profil Paslon 1	Timses Pasangan Nomor Urut 1
3.	22 Februari 2018	Mengenal Profil Paslon 2	Timses Pasangan Nomor Urut 2
4.	1 Maret 2018	Mengenal Profil Paslon 3	Timses Pasangan Nomor Urut 3
5.	8 Maret 2018	Visi Misi Paslon 1	Timses Pasangan Nomor Urut 1
6.	15 Maret 2018	Visi Misi Paslon 2	Timses Pasangan Nomor Urut 2
7.	22 Maret 2018	Visi Misi Paslon 3	Timses Pasangan Nomor Urut 3

No.	Hari/Tanggal	Topik	Nara Sumber
8.	29 Maret 2018	Program ekonomi-pembangunan	Timses Pasangan Nomor Urut 1
9.	5 April 2018	Program ekonomi-pembangunan	Timses Pasangan Nomor Urut 2
10.	12 April 2018	Program ekonomi-pembangunan	Timses Pasangan Nomor Urut 3
11.	19 April 2018	Program pendidikan dan budaya	Timses Pasangan Nomor Urut 1
12.	26 April 2018	Program pendidikan dan budaya	Timses Pasangan Nomor Urut 2
13.	3 Mei 2018	Program pendidikan dan budaya	Timses Pasangan Nomor Urut 3
14.	10 Mei 2018	Potensi Pariwisata dan atasi macet	Timses Pasangan Nomor Urut 1
15.	17 Mei 2018	Potensi Pariwisata dan atasi macet	Timses Pasangan Nomor Urut 2
16.	24 Mei 2018	Potensi Pariwisata dan atasi macet	Timses Pasangan Nomor Urut 3
17.	31 Mei 2018	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Timses Pasangan Nomor Urut 1
18.	7 Juni 2018	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Timses Pasangan Nomor Urut 2
19.	14 Juni 2018	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Timses Pasangan Nomor Urut 3
20.	21 Juni 2018	Kesiapan KPU Jelang Hari H, dan Penindakan Pelanggaran	KPU dan Panwas Kota Malang

Sumber: Riset Peneliti

c. Koran

Selain melalui media elektronik, media berikutnya yang digunakan dalam melakukan sosialisasi adalah media cetak. Media cetak yang masih efektif adalah koran. Koran masih mampu menjadi media cetak yang menyebarkan informasi karena konten-konten bacaan yang disajikan oleh penulis berita. Kota Malang sendiri memiliki koran lokal yaitu Malang Pos yang paling diminati oleh masyarakat Kota Malang karena isi berita paling banyak berkaitan dengan fenomena-fenomena yang ada di Kota Malang sendiri. Malang Pos memberikan porsi berita lebih besar perihal masalah Politik, dikarenakan politik sebagai alat yang mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu yang masuk dalam ranah politik ialah adanya agenda Pilkada Kota Malang Tahun 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Vandri Battu selaku Koordinator Liputan dan Redaktur Urban:

“Malang pos menganggap memfasilitasi informasi berupa berita-berita politik. Karena berpolitik itu mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Untuk mesejahterakan masyarakat salah satunya dengan jalan politik. Untuk pengambilan kebijakan dipemerintah itu politik. Karena itu memberikan porsi berita kepada politik cukup besar.”

(Wawancara pada hari Kamis, 03 Mei 2018)

Berita yang ditulis pada koran diharap mampu menggiring masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. Oleh karena itu, berita yang disampaikan haruslah bersifat dalam dan laus. Untuk itu, Malang Pos menggunakan metode liputan lapangan. Vandri Battu selaku Koordinator Liputan dan Redaktur Urban mengatakan:

“Untuk agenda Pilkada kita menempatkan wartawan untuk meliput setiap paslon. Untuk memberitakan kepada masyarakat terkait program-program, visi-misi, aksi-aksi para paslon untuk meraih simpati. Dan juga meliput KPU sebagai lembaga penyelenggara dan panwaslu sebagai pengawas jalannya pemilu. Dengan adanya menempatkan wartawan tersebut bertujuan untuk

memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang aktivitas dan tahapan-tahapan pilkada.”

(Wawancara pada hari Kamis, 03 Mei 2018)

Sebagai satu-satunya koran lokal, Malang Post lebih menyediakan porsi-porsi berita seputar Kota Malang lebih banyak. Hal tersebut menuntut Malang Post menjadi media yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karenanya, informasi yang diberikan diharapkan tidak hanya masalah-masalah umum yang sudah nampak terjadi, tetapi juga agar informasi yang didapat masyarakat lebih mendalam dan luas.

C. Analisis Data dan Pembahasan

Sistem Politik di Indonesia bukan lagi merupakan suatu yang asing bagi masyarakat. Bahkan politik tidak hanya berada pada lingkungan pemerintahan saja tetapi juga memasuki ruang-ruang di masyarakat. Negara Indonesia menganut sistem politik trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Politik di Indonesia juga berperan dalam jalannya administrasi publik. Menurut Jon Refuss dalam (Irfan, 2009: 105) mengatakan bahwa politik yang merupakan perjuangan untuk mengalokasikan nilai-nilai dan sumber-sumber sosial secara erat disejajarkan dengan kegiatan administrasi. Peran administrasi negara dalam proses perpolitikan sebagai pelaksana kebijakan dan perumus kebijakan sangatlah penting. Sebab tidak hanya melaksanakan kebijakan negara, tetapi juga sebagai pembuat suatu kebijakan. Oleh karena itu, analisis atas perilaku administrator tidak hanya dilakukan pada level individu tapi bisa juga dilakukan terhadap organisasi maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Hall dan Taylor (1996:6) yang

mengungkapkan bahwa institusi merupakan penyedia *template* untuk moral dan kognisi dalam melakukan interpretasi dan tindakan dalam diri seorang individu. Pada akhirnya institusi akan memberikan pedoman tindakan yang baik bagi individu dan bukan alat untuk “mensetir” perilaku individu. Ruang lingkup analisis tidak hanya terletak pada konteks tapi juga pada tindakan yang dilakukan. Sehingga ketika individu tersebut adalah aktor pembuat keputusan pada tingkat elit negara, maka analisis bergeser ke level Negara. Konsekuensinya, struktur Negara menjadi alat yang dapat digunakan oleh individu untuk mempengaruhi perilaku masyarakat melalui penggunaan institusi (rules and regulations).

1. Pandangan Teori Pendekatan *New Institutionlism* terhadap Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Partisi Politik Masyarakat.

Pengertian institusi oleh Peters (2004: 18) diungkapkan sebagai atribut utama yang bersifat struktural sebagai penanda suatu masyarakat atau kebijakan. Senada dengan pernyataan Peters, institusi didefinisikan secara spesifik sebagai aturan main dalam masyarakat atau alat yang membatasi manusia dalam berinteraksi oleh North (1990:1). Sedangkan secara umum, Hall dan Taylor (1996:6) merumuskan institusi sebagai prosedur-prosedur, rutinitas, norma-norma dan beragam konvensi yang telah mengakar dalam struktur keorganisasian proses pemerintahan dan politik ekonomi. Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas, institusi merupakan suatu kelembagaan organisasi bersifat struktural yang memiliki aturan main. Hal tersebut dikarenakan, institusi memiliki peraturan yang dapat menjadikan organisasi tersebut bertahan. Selain itu, setiap kebijakan ataupun aktivitas yang dikeluarkan dan dilakukan oleh institusi tersebut guna mempengaruhi masyarakat.

Terdapat 2 teori pendekatan dalam penelitian politik yaitu *Behavioralism* dan *New Institutionalism*. Teori pendekatan Behaviorisme menekankan penelitian pada perilaku orang-orang atau kelompok yang ada pada institusi tersebut. Bagi behaviorisme, penelitian politik terfokus pada bagaimana individu mempengaruhi politik dengan fenomena yang terlihat jelas. Sedangkan New institutionalism memperjelas bahwa perilaku setiap individu dipengaruhi oleh struktur, aturan-aturan, dan norma-norma yang ada pada institusi. Strukturisasi pada sebuah lembaga menjadi pembatas bagi ruang gerak aktor yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Institusi menjadi wadah untuk mempengaruhi masyarakat berdasarkan dengan tujuan-tujuan yang telah ada. Organisasi terbentuk disebabkan karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Eksistensi yang terjadi pada organisasi memiliki cakupan organisasional yang luas, dimana setiap organisasi saling mempengaruhi bentuk organisasi lainnya lewat proses adopsi atau institusionalisasi (pelembagaan).

Administrasi negara dalam fungsinya menjalankan kebijakan dan sebagai perumus kebijakan menjadi pemegang kendali pada kondisi politik suatu bangsa. Negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan membutuhkan elemen diluar pemerintahan. Elemen tersebut berupa organisasi-organisasi non pemerintahan dimana sebagai kontrol terhadap perilaku pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Salah satu kebijakan politik pemerintah adalah terkait adanya Pemilihan Umum (Pilwali). Agenda tersebut pemerintah memerlukan banyak pihak untuk mensukseskannya. Di antaranya adalah para pemangku

kepentingan yang aktif turut serta untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Karena salah satu syarat suksesnya Pemilihan Umum ialah tingginya partisipasi masyarakat. Pemangku kepentingan melalui lembaga-lembaga melakukan aktivitas dan aksi untuk mempengaruhi masyarakat. Oleh sebab itu, Institusi negara tidak dapat berjalan sendiri melainkan beriringan bersama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan tujuan.

Adanya peran pemangku kepentingan yang terorganisir menjadi sebuah lembaga dalam turut serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjadi bentuk konkret dari sistem demokrasi di Indonesia. Para pemangku kepentingan yang dimaksud antara lain ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Partai Politik, Organisasi Sipil (*Civil Society*), dan Media Massa. Instansi-instansi tersebut menjadi sebuah kelembagaan yang saling berkoordinir ketika ada agenda Pemilihan Umum (Pemilu). Penelitian ini memfokuskan peran lembaga-lembaga tersebut dalam turut serta untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Setiap lembaga tersebut memiliki tujuan organisasi masing-masing, sehingga dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan bersama mereka melakukan kegiatan berdasarkan kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh organisasi.

Hall dan Taylor (1996: 9) membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (*historical institutionalism*), institusionalisme pilihan rasional (*rational choice institutionalism*) dan institusionalisme sosiologis (*sociological institutionalism*). Institusionalisme pilihan rasional melihat proses institusionalisasi dan relasi antar

institusi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan bersama melalui pertimbangan pertimbangan rasional dan untung rugi. Dalam pandangan institusionalisme pilihan rasional-seperti halnya teori pilihan rasional-manusia secara individual-yang juga merupakan representasi dari sebuah institusi dipandang sebagai individu rasional yang bertindak atas dorongan kepentingan rasional, didasari oleh perhitungan ekonomis, untung-rugi, memaksimalkan keuntungan dan aksi-reaksi dari aktor lainnya. Asumsi mendasar dari institusionalisme pilihan rasional adalah bahwa individu adalah aktor sentral dalam proses politik, dan bahwa orang-orang bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas pribadi. Salah satu mencapai tujuan tersebut secara efektif adalah melalui tindakan institusional, dan perilaku mereka juga dibentuk oleh lembaga (Peters, 1991: 45). Tindakan individu mempengaruhi lembaga, tetapi juga diatur oleh aturan-aturan dalam lembaga. Karena itu, tindakan atau keputusan lembaga, juga dapat merefleksikan tindakan individu. Institusionalisme pilihan rasional melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau aturan-baik formal maupun informal-yang disepakati bersama. Pendekatan ini melihat bahwa keadaan normal politik adalah di mana aturan permainan yang stabil dan para aktor memaksimalkan keuntungan (biasanya keuntungan pribadi) yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut. Para aktor mempelajari aturan-aturan, strategi adaptasi dan dengan demikian melahirkan keseimbangan institusional. Meski tidak semua aktor merasa senang atau diuntungkan dengan struktur kelembagaan yang terbentuk, tetapi yang menjadi tujuan adalah pada kondisi yang stabil. Setelah stabil, sangat sulit untuk mengubah aturan karena tidak ada yang bisa memastikan hasil dari struktur yang terbentuk

(Clarke and Foweraker, 2005: 572). Ada beberapa fenomena yang menjadi perhatian para penganut pilihan rasional

institusionalisme, termasuk analisis dalam perilaku koalisi, pengembangan lembaga-lembaga politik dan kajian tentang konflik (Hall dan Taylor, 1996: 9). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kelima lembaga (KPU, Bakesbangpol, Partai Politik, LSM, dan Media Massa) melakukan berperan dan merespon perubahan-perubahan yang menuntut peran mereka. Serta, bagaimana aktor-aktor dalam lembaga, atau aktor-aktor yang merefleksikan lembaga, berfikir, dan berperan. Baik peran yang diatur dan dibatasi oleh norma dan aturan, maupun peran yang lebih luas yang tidak diatur dalam aturan-aturan formal.

2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang berdasarkan Salinan Perwal Nomor 62 Tahun 2012 pasal 2 adalah lembaga teknis daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Pelaksanaan partisipasi politik termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, peran pemerintah daerah dalam mensukseskan agenda Pilkada dilakukan oleh Bakesbangpol. Dukungan Pemerintah Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah fasilitasi untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat 3 permendagri Nomor 9 Tahun 2005 pada pasal 5 dijelaskan dukungan tersebut diantaranya berupa:

a. Fasilitas persiapan pelaksanaan pilkada

- Sosialisasi pelaksanaan PILKADA. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam PILKADA.

b. Fasilitas pelaksanaan pilkada

- Membantu KPUD dalam mengatasi hal-hal teknis penyelenggaraan PILKADA;
- Menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman;
- Membantu KPUD dalam penyelesaian pendaftaran pemilih secara optimal di daerah bagi seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih;
- Memberikan dukungan sarana prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik;
- Memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum pada setiap rangkaian proses Pilkada;
- Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadaikan perilaku-perilaku yang destruktif;
- Mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah.

c. Koordinasi Pelaksanaan Pilkada

- melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan keamanan;
- memantapkan koordinasi horizontal dan konsultasi vertikal pada aspek- aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan PILKADA;
- merekam semua hal-hal yang berlangsung selama pelaksanaan PILKADA.

Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat berdasarkan ketentuan Permendagri no. 9 Tahun 2005 ialah melakukan sosialisasi bersama dengan KPU dan Panwaslu kepada masyarakat. Pentingnya fasilitas sosialisasi pilkada oleh pemerintah ialah agar masyarakat yang masuk daftar pemilih, termasuk pemilih pemula, bisa mendapatkan gambaran utuh tentang proses pilkada yang berujung pada meningkatnya partisipasi dan kualitas pelaksanaan Pilkada.

Berdasarkan undang-undang diatas, Badan kesatuan bangsa dan politik melakukan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memberikan fasilitas-fasilitas kepada KPU dan Panwaslu untuk melakukan sosialisasi terkait agenda Pilkada 2018 berupa sosialisasi dan pendidikan politik. Hal tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Suhardono selaku Bidang Politik Demokrasi, dan Ham. Melihat Data pemilihan tahun 2008, 70,3% masyarakat Kota Malang mencoblos. Sedangkan di tahun 2013 mengalami penurunan yaitu hanya 64 persen. Peran yang dilakukan oleh Bakesbangpol bertujuan untuk memaksimalkan pengetahuan masyarakat terkait Pilkada. Selain itu agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk

memilih wakilnya. Oleh karena itu Bakesbangpol menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan dukungan fasilitas sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 permendagri Nomor 9 Tahun 2005 pada pasal 5. Dukungan fasilitas yang telah dilakukan ialah berupa sosialisasi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada 2018.

Materi yang disosialisasikan berkaitan dengan Pendidikan Politik khususnya tentang Pilkada. Bakesbangpol memiliki 2 (dua) kegiatan yang berkaitan langsung dengan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018, yaitu kegiatan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dan kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu. Kegiatan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dilaksanakan pada pertengahan Februari 2018, yaitu 14-15 februari 2018, sedangkan kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tanggal 21-22 Maret serta 2, 4, dan 5 April 2018.

Mekanisme sosialisasi dilakukan dalam forum seminar, kegiatan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dihadiri oleh 800 Siswa/Siswi se Kota Malang yang memiliki hak pilih atau telah berusia 17th pada saat pemungutan suara yaitu pada 27 Juni 2018, sedangkan kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dihadiri 1500 orang yang terdiri dari Tokoh masyarakat, Unsur Partai Politik, Unsur Perguruan Tinggi, serta OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Sosialisasi dilakukan oleh Narasumber yang dipilih oleh Bakesbangpol berdasarkan keahliannya, Narasumber pada kegiatan Pendidikan Politik bagi

Generasi Muda berasal dari Desk Pilkada Kota Malang sebagai Narasumber Utama, serta Ketua KPU Kota Malang dan Unsur Akademisi yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. Adapun materi yang disampaikan yaitu: Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2018 dan 2019 oleh Drs. Wasto, SH. MH sebagai Sekretaris Daerah Kota Malang selaku Ketua Desk Pilkada Kota Malang; Tahapan dan Tata cara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2018 dan 2019 oleh Zaenudin, ST, M.Ap selaku Ketua KPU Kota Malang; Hak dan Kewajiban Warga Negara (Generasi Muda) dalam Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2018 dan 2019 sebagai Akademisi dari UMM.

Sedangkan Narasumber pada kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dibuka langsung PJS Walikota Malang sekaligus sebagai *keynote speaker* dalam kegiatan dimaksud. Adapun Narasumber lainnya berasal dari Desk Pilkada Kota Malang, KPU Kota Malang, dan Panwaslu Kota Malang, dengan materi yang disampaikan sebagai berikut: Peran Pemerintah Kota Malang dalam Pilkada 2018 oleh Drs. Wasto, SH. MH sebagai Sekretaris Daerah Kota Malang selaku Ketua Desk Pilkada Kota Malang; Tahapan dan Tata Cara Pemungutan Suara dalam Pilkada 2018 oleh 5 (lima) komisioner KPU Kota Malang, yaitu Zaenudin, ST, M.Ap, Ashari Husen S.Sos, M.Si, Deny Rachmat Bachtiar, S.Sos, Aminah Asminingtyas, SP, dan Fajar Santosa, SH, MH; Pengawasan, Pemantauan, dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pilkada 2018 oleh 3 (tiga) Komisioner Panwaslu Kota Malang yaitu Alim Mustofa, S.Sos, M.Ap, Iwan Sunaryo, dan Erna Almagfiroh, ST.

Aktor eksternal Bakesbangpol yang terlibat dalam Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu yaitu Desk Pilkada Kota Malang, KPU Kota Malang, Panwaslu Kota Malang, Dispora Kota Malang, dan Camat se Kota Malang. Adapun Aktor eksternal Bakesbangpol yang terlibat dalam Kegiatan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yaitu Desk Pilkada Kota Malang, KPU Kota Malang, dan unsur Akademisi yang berasal dari UMM.

Sasaran kegiatan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yaitu Siswa/Siswi se Kota Malang yang memiliki hak pilih atau telah berusia 17th pada saat pemungutan suara yaitu pada 27 Juni 2018, sedangkan sasaran kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu yaitu terdiri dari Tokoh masyarakat, Unsur Partai Politik, Unsur Perguruan Tinggi, serta OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Adapun sasaran kegiatan tersebut sekaligus diharapkan menjadi agen dalam mendorong dan memotivasi masyarakat lainnya untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2018. Hal ini penting mengingat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Malang periode sebelumnya mengalami penurunan. Pada Pilkada Kota Malang Tahun 2008, tingkat partisipasi mampu mencapai 70%, sedangkan pada Pilkada Kota Malang Tahun 2018 tingkat partisipasi menjadi 65%.

Menurut Menurut Rusadi Kantaprawira (2006: 56) pendidikan politik ialah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai faham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus menjalankan tugas partisipasi. Sedangkan sosialisasi politik, menurut Hyman dalam Maslekah (2015: 35)

merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (emotional learning) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Melihat pengertian diatas, pemerintah daerah melalui Bakesbangpol peran yang dilakukan bakesbangpol guna warga negara harus sadar dengan sistem politik yang ada di negaranya. Untuk itu pendidikan berguna untuk memberikan wawasan akan pentingnya partisipasi kepada warga negara. Serta, sosialisasi menjadi metode untuk mendoktrin masyarakat agar turut serta dalam partisipasi politik berupa memberikan hak suaranya untuk memilih pada agenda Pilkada Kota Malang 2018.

Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Bakesbangpol bersama dengan pihak KPU dan Panwaslu merupakan aktivitas institusi. Aktivitas tersebut bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut serta memberikan hak suaranya pada Pilkada. Kegiatan yang dilakukan diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan yang tertera. Oleh karena itu, instansi digerakan oleh individu maupun kelompok yang ada di dalamnya berdasarkan dengan aturan-aturan yang berlaku dengan menjalankan norma-norma yang ada. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol merupakan instansi SKPD pemerintahan daerah, sehingga peran Bakesbangpol hanyalah sebatas apa yang tercantum dalam Tugas Pokok dan Fungsi yang ada di Instansi dimana sebagai fasilitator. Entitas yang ada berupa memberikan fasilitas kepada KPU dan Panwaslu untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.

Segala bentuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula guna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam proses politik Negara khususnya terkait Pemilu. Selain itu, juga untuk membangun kesadaran dan pemikiran kritis generasi muda untuk memilih dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan anti politik uang. Serta yang terpenting ialah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu khususnya dalam Pilkada 2018. Sedangkan kegiatan sosialisasi politik dalam agenda peningkatan partisipasi politik masyarakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan tanggung masyarakat dalam Pemilu, dalam hal ini Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018. Selain itu, juga guna Membangun kesadaran dan pemikiran kritis masyarakat untuk memilih dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan anti politik uang. Serta, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Kota Malang, Panwaslu Kota Malang, dan Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Desk Pilkada Kota Malang.

3. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui sosialisasi politik. Sosialisasi politik dapat dilakukan oleh suatu pemerintahan sebagai lembaga/intansi yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Menurut Rush & Althoff (2002:35) mendefinisikan sosialisasi politik dalam arti sempit yakni “penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek yang oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab.”

Berdasarkan pengertian tersebut, badan instruksional yang dimaksud ialah instansi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan instansi pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan masyarakat dalam hal pembelajaran mengenai politik. Sehingga, tercipta peran dari lembaga instruksional yang dimaksud dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan.

Mengenai hal tersebut, KPU yang merupakan badan instruksional sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal agenda Pemilu. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Muhammad Sailendra, ST., MM. selaku Sekretaris KPU Kota Malang yang menjelaskan bahwa KPU Kota Malang meningkatkan partisipasi politik masyarakat berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) yang menjadi landasan normatif KPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut ialah Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota digunakan sebagai pedoman sosialisasi. Pada bab II PKPU tersebut disebutkan secara eksplisit mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, diantaranya yakni sasaran sosialisasi pemilihan, materi sosialisasi pemilihan, dan metode sosialisasi. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Malang sebagai badan instruksional dari instansi pemerintahan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi politik telah sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Rush & Althoff (2002:35). Selain itu, KPU Kota Malang dalam melakukan sosialisasi politik menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang

sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota digunakan sebagai pedoman sosialisasisebagai dasar hukum dan pedoman.

- **Sasaran Sosialisasi**

Peran yang dilakukan oleh KPU Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat ialah melalui sosialisasi. Sosialisasi haruslah memperhatikan sasaran yang akan dituju. Sasaran sosialisasi yang dimaksud adalah kelompok atau individu yang akan dituju oleh KPU Kota Malang dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan. Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota pada Pasal 4 dijelaskan dan dijabarkan yang menjadi sasaran sosialisasi pemilihan diantaranya ialah:

- a. Pemilih yang berbasis:
 - keluarga;
 - Pemilih pemula;
 - Pemilih muda;
 - Pemilih perempuan;
 - Pemilih penyandang disabilitas;
 - Pemilih berkebutuhan khusus;
 - kaum marjinal;
 - komunitas;
 - keagamaan;
 - relawan demokrasi; dan
 - warga internet (*netizen*).
- b. masyarakat umum;
- c. media massa;
- d. partai politik;
- e. pengawas;
- f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;

- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. masyarakat adat; dan
- i. instansi pemerintah.

PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dijadikan pedoman oleh KPU Kota Malang dalam melaksanakan sosialisasi. Terkait dengan sasaran politik yang dituju oleh KPU Kota Malang, Muhammad Sailendra, ST., MM. selaku Sekretaris KPU Kota Malang mengatakan bahwa sasaran dalam sosialisasi politik adalah adalah semua segmen masyarakat seperti, kaum perempuan, agama, masyarakat pinggiran, disabilitas, pemuda, organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah dan agama yg lain, parpol, kepemudaan, dan pemilih pemula, serta kampus-kampus yang ada di Kota Malang.

KPU Kota Malang juga melakukan sosialisasi kepada pengguna media sosial dengan tujuan untuk menysasar warga internet (*netizen*). Hal tersebut juga juga disampaikan oleh Muhammad Sailendra, ST., MM. selaku Sekretaris KPU Kota Malang yang mengatakan bahwa sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai media yang dimiliki oleh KPU Kota Malang seperti Twitter dengan alamat @kpumalangkota, instagram dengan nama kpukotamalang.official, facebook dengan nama KPU Malang Kota, youtube dengan nama Garudeyatv, dan website dengan alamat www.kpud-malangkota.go.id.

Selain itu KPU Kota Malang juga sudah menysasar masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, media massa, partai politik, organisasi masyarakat, LSM dan instansi pemerintah lainnya. KPU Kota Malang dalam memberikan sosialisasi kepada sasaran yang dituju hampir sepenuhnya sudah sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi

masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota yang terdapat pada Pasal4.

- **Materi Sosialisasi**

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, salah satu faktor yang penting untuk disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Rush dan Althoff (2002:37) menjelaskan bahwa materi sosialisasi merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, nilai sosialisasi harus mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Materi sosialisasi yang dimaksud disini yaitu meliputi pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat. Materi dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam melakukan sosialisasi, dari materi tersebut masyarakat mengetahui informasi yang disampaikan oleh KPU Kota Malang dalam melakukan sosialisasi.

Dalam menyampaikan materi sosialisasi, KPU Kota Malang menggunakan aturan baku di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota pada Pasal 7 diantaranya:

- a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - pencalonan dalam Pemilihan;
 - kampanye dalam Pemilihan;
 - dana kampanye peserta Pemilihan;
 - pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
- b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Terkait dengan materi sosialisasi, Muhammad Sailendra, ST., MM. selaku Sekretaris KPU Kota Malang mengatakan bahwa materi yang diberikan oleh KPU Kota Malang dalam melakukan sosialisasi politik adalah materi Materi yang umum adalah masalah pilkada untuk mencoblos, dan cara bagaimana agar bisa mencoblos (harus memiliki ktp elektronik, harus masuk dalam daftar pemilih tetap dan kalau tidak masuk ke dalam DPT atau Daftar Pemilih Sementara harus kemana dan bagaimana) diberikan sosialisasi lain terkait aniti hoax, anti e-money politik, anti SARA. Materi mengenai Pemilu ini diberikan karena pada dasarnya ranah KPU sendiri adalah pelaksana pemilihan umum yang ada di Indonesia. Selanjutnya materi sosialisasi yang disampaikan oleh KPU Kota Malang sendiri disesuaikan dengan latar belakang dari sasaran sosialisasi yang dituju. Jika sasaran sosialisasi adalah mencakup masyarakat umum maka materi yang disampaikan adalah pemutakhiran data dan daftar pemilih serta materi mengenai pentingnya pemilihan umum. Jika sasaran sosialisasinya adalah partai politik maka materi yang diberikan adalah pencalonan dalam pemilihan, kampanye dalam pemilihan, dan dana kampanye peserta pemilihan. Sedangkan materi mengenai pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, serta penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan diberikan kepada semua sasaran sosialisasi yang dituju KPU Kota Malang.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mensukseskan sosialisasi politik yang dilakukan, KPU Kota Malang sudah sesuai dengan salah satu faktor keberhasilan dalam sosialisasi pemilihan yang disampaikan oleh Rush

dan Althoff (2002:37) yakni memberikan materi kepada sasaran sosialisasi perihal pengetahuan dalam pemilihan umum.

KPU Kota telah melaksanakan pemberian materi sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota yang terdapat pada Pasal 7. Yakni materi mengenai seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan dan materi lain terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu.

- **Metode Sosialisasi**

Menyampaikan materi sosialisasi politik, diperlukan metode atau cara untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Tahap penyampaian materi ini, metode yang digunakan akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan. Rush dan Althoff (2002:37) menyebutkan salah satu keberhasilan dalam melakukan sosialisasi adalah mekanisme sosialisasi yang dibagi menjadi 3, yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi. Artinya ada 3 cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi politik.

Sama halnya dengan sasaran dan materi sosialisasi politik, KPU Kota Malang juga menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota dalam hal metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi politik. Pada Pasal 10 PKPU tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi, diantaranya:

- a. forum warga;
- b. komunikasi tatap muka;
- c. media massa;
- d. bahan sosialisasi;
- e. mobilisasi sosial;
- f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- g. laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
- h. papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
- i. media sosial;
- j. media kreasi; dan/atau
- k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

Terkait dengan metode sosialisasi, Muhammad Sailendra, ST., MM. selaku Sekretaris KPU Kota Malang mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dilakukan melalui bentuk tatap muka, artinya sosialisasi dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan sasaran sosialisasi atau dengan kata lain sosialisasi dengan komunikasi tatap muka. Selain itu juga, KPU Kota Malang memanfaatkan *leaflet*, *booklet*, *pamflet*, spanduk, banner, dan baliho sebagai bahan sosialisasi. Hal tersebut juga dibuktikan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa penempatan spanduk dan banner, serta penyebaran *booklet*, *pamflet* dan *leaflet* sudah dilakukan oleh KPU Kota Malang. Selain itu KPU Kota Malang juga melakukan sosialisasi melalui media sosial. Sosialisasi di media sosial dilakukan melalui Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan Website KPU Kota Malang. Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Malang bahwa metode yang digunakan KPU Kota Malang dalam melakukan sosialisasi lebih ke bersifat instruksi. Hal tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh Rush & Althoff (2002:40) bahwa instruksi merupakan peristiwa penjelasan diri. Artinya dalam hal ini KPU melakukan sosialisasi dengan cara

melakukan seruan atau ajakan kepada masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa metode sosialisasi KPU Kota Malang sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 10 diantaranya sudah berjalan dengan baik melalui metode komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, mobilisasi sosial, *website* KPU Kota Malang, dan media sosial. Tetapi sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Malang melalui media sosial belum berjalan dengan baik.

4. Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Partai politik merupakan wadah bagi orang-orang yang memiliki pikiran dan ideologi yang sama sehingga membentuk organisasi. Apa yang menjadi tujuan dan cita-cita mereka adalah mempengaruhi berbagai golongan atau masyarakat luas agar dalam pembuatan keputusan mendapat berbagai dukungan dan dorongan. Miriam Budiardjo (2010: 404) mengatakan bahwa tujuan kelompok yang disebut partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Oleh karena itu, partai politik adalah aktor yang sangat berperan aktif dalam turut meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan berbagai kegiatan yang bertujuan agar meningkatkan eksistensi dari partai itu sendiri.

Miriam Budiardjo (2010: 405-409) menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Berdasarkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh partai politik diharapkan partai politik mampu membangun kesadaran masyarakat sehingga mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melihat kondisi

yang terjadi dilapangan dimana adanya penurunan pemilih pada Pilkada 2013, parati politik diharap mampu menarik minat masyarakat. Beberapa partai politik kota Malang (Demokrat, Golkar dan PKB) menjadi sasaran penelitian ini.

Partai Demokrat, Golkar dan PKB Kota Malang bekerja sama dengan berbagai pihak guna melancarkan komunikasi kepada masyarakat. Partai Demokrat bekerjasama dengan simpatisan, kelompok masyarakat, dan komunitas. Partai Golkar sebagai koalisi sari partai Demokrat mengoptimalkan komunikasi dengan organisasi-organisasi sayap partai yang dimiliki. Sedangkan PKB, selain melakukan komunikasi dengan organisasi sayap partai dan lembaga-lembaga lain juga memanfaatkan kedekatan yang dimiliki dengan kelompok priyai. Komunikasi oleh partai-partai tesebut bertujuan untuk mempropaganda dan membentuk opini masyarakat agar mendukung pasangan calon dari masing-masing partai sehingga mendapat perolehan suara yang ingin di capai pada Pilkada Kota Malang 2018. Peran yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik diantaranya ialah **sosialisasi kepada kader, optimalisasi sayap partai, pendidikan politik, dan kampanye partai.**

a. sosialisasi kepada kader partai

salah satu fungsi partai ialah melakukan kaderisasi. kader-kader partai yang dimiliki diberdayakan melalui berbagai program agar dapat menguasai masalah-masalah politik serta dapat menjadi penerus partai. Sosiali kepada kader-kader partai bertujuan untuk mengoptimalkan informasi. Kader partai yang telah diberikan arahan dan pendidikan, diharapkan mampu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum disekitar lingkungan mereka tinggal. Penyebarluasan

tersebut sebagai bentuk upaya memperoleh dukungan partai. Upaya-upaya tersebut dapat berupa propaganda maupun penggiringan opini.

b. optimalisasi sayap partai

organisasi sayap partai menjadi sebuah peluang tersendiri bagi partai politik untuk memperoleh massa. Semakin banyak organisasi sayap yang dimiliki, semakin banyak anggota, maka semakin banyak pula suara yang akan didapat. Organisasi sayap partai mampu memasuki ruang-ruang kehidupan sosial masyarakat. Sehingga, banyak masyarakat yang tanpa sadar menjadi bagian dari partai politik tersebut. Tentunya menjadi anggota salah satu sayap partai berarti secara otomatis memberikan hak suaranya kepada pasangan calon yang diusung oleh partai. Hal tersebut dikarenakan, walaupun dalam kegiatan organisasi sayap partai jauh dari dunia politik, tanpa disadari setiap interaksi dan informasi didalamnya akan ada tentang propaganda partai. Sehingga seringkali berada disalah satu organisasi sayap partai akan mempengaruhi individu untuk condong ke salah satu pasangan calon yang diusung partai tersebut.

c. pendidikan politik

Pendidikan politik ini selain di berikan oleh pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik juga melalui lembaga-lembaga non formal seperti Partai Politik dan organisasi-organisasi masyarakat. Pendidikan politik dalam hal ini dipahami sebagai perbuatan untuk memberikan ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dari diri manusia. Pendidikan politik sejauh ini masi dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik melalui sosialisasi dan menghadirkan narasumber dari praktisi politik dan juga audience yaitu generasi

muda. Sehingga dari penerima pesan (generasi muda) dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan atas hak pendidikan sangat penting dalam memenuhi hak asasi manusia (HAM), seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Hak mengenai jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai terlihat masih sangat minim. Hal tersebut dikarenakan, bahwa pendidikan politik dilakukan bersamaan dengan agenda kampanye. Padahal pendidikan politik dan kampanye partai merupakan hal yang berbeda.

d. Kampanye Partai

Agenda kegiatan partai politik kampanye dimasukan sebagai kategori pendidikan politik. Melihat dari wawancara yang telah dilakukan penleiti, bahwasnya partai politik tidak mengadakan pendidikan politik bagi masyarakat umum melainkan kampanye. Menurut ketiga partai yaitu Demokrat, Golkar, dan PKB, pada saat kampanye berlangsung mereka juga menyampaikan informasi seputar pengetahuan Pemilu yang ternasuk didalamnya ada Pilkada. Akan tetapi, jika ditelisik kembali bawa pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari untuk mempengaruhi masyarakat agar memberikan hak suaranya kepada pasangan calon yang diusung. Tujuan dari kampanye itu sendiri dapat dilihat dari UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Setiap pasal dari tiga serangkaian,

pemilihan demokratis tidak menyebutkan secara tegas ketentuan pendidikan politik. Pasal 37 UU 42/2008 hanya memuat aturan terkait visi, misi dan program pasangan calon.

Secara teoretis parpol setidaknya memiliki lima peran atau fungsi yang semestinya diperankan dalam proses kehidupan bernegara yang demokratis yaitu, (1) fungsi artikulasi kepentingan, (2) fungsi agregasi kepentingan, (3) fungsi sosialisasi politik, (4) fungsi rekrutmen politik, dan (5) fungsi komunikasi politik Menurut Putra dalam Metera (2011:47-50).

a) Artikulasi Kepentingan

Setiap individu ataupun kelompok masyarakat sebagai warga negara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan itu bisa sejalan dan bisa berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Parpol harus bisa memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terlayani oleh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memegang kedaulatan. Kalau parpol mampu memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat seperti itu, maka parpol yang demikian akan memperoleh dukungan rakyat. Sebaliknya jika Parpol tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, maka ia akan ditinggalkan oleh pemilihnya.

Oleh karena itu, partai Demokrat, Golkar dan PKB dalam agenda Pilkada 2018 memiliki Visi dan Misi yang dikenalkan kepada masyarakat. Visi dan Misi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi perial perspektif dari kepentingan masyarakat yang mereka wakikan. Dasar dari Visi dan Misi tersebut dari anggapan

bahwa apa yang mereka angkat adalah kebutuhan dan kepentingan dari rakyat. Berbagai pandangan dan perspektif akan timbul dari masyarakat melihat isu apa yang mereka jadikan Visi dan Misi. Urgenitas dari Visi dan Misi menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat untuk memberikan dukungannya. Seperti halnya, apakah Visi dan Misi tersebut mengutarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat, atau seberapa besar perhatian para pasangan calon terhadap masalah-masalah yang timbul di Kota Malang.

b) Agregasi Kepentingan

Rakyat sebagai warga negara memiliki berbagai kepentingan yang diajukan untuk dipenuhi oleh kebijakan publik. Parpol dalam proses perumusan kebijakan publik harus dapat memerankan fungsinya menggabungkan kepentingan-kepentingan yang merupakan tuntutan rakyat menjadi alternatif-alternatif terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat. Menggabungkan kepentingan-kepentingan yang beragam yang terkadang bertentangan menjadi alternatif-alternatif terbaik membutuhkan intelektualitas yang tinggi. Parpol yang mampu memerankan fungsinya seperti itu akan menjadi pilihan rakyat. Sebaliknya Parpol yang tidak mampu memerankan fungsinya akan ditinggalkan.

Agregasi dapat direalisasikan melalui program-program yang ditawarkan oleh partai politik melalui pasangan calon wali kota pada Pilkada Kota Malang 2018. Ketertarikan masyarakat dapat dicapai melalui program-program yang diajukan. Program yang disampaikan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat Kota Malang tentang pola pikir pasangan calon terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, program yang digaungkan memperlihatkan letak keberpihakan pasangan calon.

c) Sosialisasi Politik

Setiap negara memiliki nilai-nilai dan etika politik yang dipandang baik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Parpol harus memerankan fungsinya mensosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kepada warga negara. Sosialisasi nilai-nilai dan etika politik harus dilakukan secara terus menerus, sehingga nilai-nilai dan etika politik yang berlaku mempribadi pada diri warga negara. Parpol yang tidak melakukan sosialisasi politik seperti itu dapat dipertanyakan komitmennya terhadap negara. Di sisi lain rakyat seharusnya bisa berlaku kritis terhadap Parpol yang demikian. Misalnya untuk Indonesia, nilai-nilai dan etika politik yang berlaku adalah yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undan Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Kaelan dalam Metera (2011-48). Parpol yang tidak mensosialisasikan nilai-nilai dan etika politik itu seharusnya tidak dipilih rakyat.

Sejauh ini, melihat pola sosialisasi yang dilakukan partai Demokrat, Golkar dan PKB dilakukan hanya pada saat agenda-agenda Pilkada. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa, Parpol melakukan sosialisasi politik lebih ke arah mengkampanyekan pasangan calon yang diusung. Sosialisasi politik juga dilakukan dengan menggaet berbagai pihak media massa. Hal tersebut bertujuan agar tersampainya segala informasi yang diharapkan dapat memengaruhi masyarakat.

d) Rekrutmen Politik

Parpol memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kadernya pada jabatan-jabatan politik di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat menempatkan kader-kader

terbaik di pemerintahan, Parpol harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen politik. Parpol harus memiliki prosedur rekrutmen politik yang diberlakukan bagi kadernya. Dalam rekrutmen politik inilah Parpol seharusnya menunjukkan kemampuannya berdemokrasi di internal partai.

Kader-kader yang dimiliki partai politik, dapat berperan aktif dalam agenda-agenda Pemilu untuk turut mensukseskan pasangan calon yang diusung oleh partai. Seperti yang dilakukan oleh partai Demokrat, Golkar, dan PKB bahwa optimalisasi kader dilakukan untuk menggaet masyarakat lebih luas. Proses yang dilakukan oleh kader ialah menyampaikan informasi yang telah didapatkan dari partai. Informasi yang disampaikan oleh kader-kader partai kepada masyarakat diharapkan mampu menggiring opini masyarakat agar memberikan dukungan dan berpihak kepada partai.

e) Komunikasi Politik

Melalui komunikasi politik Parpol mengomunikasikan informasi, isu, gagasan, dan program-program partai sehingga dapat diketahui oleh rakyat. Segenap struktur partai supaya dapat memerankan fungsinya melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia secara legal. Muara dari semua peran Parpol itu adalah formulasi dan implementasi kebijakan publik yang merespons kepentingan rakyat. Pemilih yang rasional akan memilih Parpol yang mampu memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang merespons kepentingan rakyat. Jika Parpol tidak mampu melaksanakan peran dan fungsi yang demikian, maka akan ditinggalkan oleh konstituennya yang rasional menurut Rachbini dalam Metera

(2011:48). Karena itu Parpol semestinya mulai meninggalkan cara-cara yang tidak rasional dalam memengaruhi pemilih. Sejalan dengan peningkatan tingkat pendidikan, masyarakat akan berubah dari irasional ke rasional dalam menentukan pilihan.

5. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat : Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan. Asrinaldi (2014: 15) mengatakan LSM adalah kelompok kepentingan institusional yaitu kelompok kepentingan yang bersifat formal kelembagaan, dengan demikian kelompok kepentingan ini memiliki posisi yang sangat kuat di dalam suatu sistem. Secara konsepsional, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersikap suka rela dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri tersebut membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat dan

mengontrol kegiatan pemerintah yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.

Salah satu aktor dalam gerakan sosial politik yang memiliki peran penting sebagai pelaku gerakan sosial politik ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara. Sebagai sosial terorganisir (Organizet Sosial Movement), LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dapat melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya civil society. LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam gerakan demokrasi melalui peranannya dalam pemberdayaan Civil Society yang dilakukan melalui aktifitas seperti penyadaran. Adanya kebebasan politik dan sipil tersebut, individu atau kelompok (masyarakat) berusaha untuk melembagakan hak sipil dan hak politiknya ke dalam suatu institusi kekuatan politik yang merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi di masyarakat. Sementara itu, kekuatan politik diartikan sebagai suatu institusi formal maupun informal dalam sistem politik yang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan dan menentukan bentuk keputusan politik sesuai dengan kepentingannya (Arsinaldi, 2014: 28). Kekuatan politik selalu memiliki kecenderungan untuk terlibat secara politik dalam sistem politik. Oleh karena itu intuisi kekuatan politik sangat diperlukan sebagai kekuatan pengimbang (balancing power) dalam mencapai sistem demokrasi yang ideal demi kepentingan bersama dalam sebuah negara.

Nadlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengikut cukup besar di Indonesia. Melihat dari latar belakang berdirinya Nadlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak dapat dipungkiri

bahwa kedua organisasi tersebut tidak lepas dari dunia politik. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh Nadlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berupa Politik Kebangsaan. Maksud dari hal tersebut ialah, keduanya turut hadir dalam proses politik berupa pemberdayaan dan pendidikan politik masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Nadlatul Ulama (NU) memiliki Ikatan Pemuda NU (IP NU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPP NU) dimana di dalam agenda kegiatannya terdapat pendidikan politik bagi para kadernya. Sedangkan Muhammadiyah memiliki Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) yang di dalamnya membahas politik termasuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sekolah kader sebagai bentuk pendidikan politik bagi kaum pemuda, dan ideopoliter guna menyatukan ideologi serta memahami politik.

Selain bentuk pendidikan, Nadlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki hubungan khusus dengan beberapa partai. Hal tersebut terbukti dari adanya agenda PKB dimana dalam kegiatan pembukaan pendaftaran penjangingan calon serta operasional tim loby melakukan konsultasi dan pertemuan dengan PC NU Kota Malang. Menurut Asif Budairi selaku Sekertaris PCNU Kota Malang mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan PKB dilahirkan ole orang-orang NU, sehingga koordinasi dan komunikasi yang dilakukan adalah bentuk penghormatan seorang anak kepada bapak. Hubungan kedekatan dengan partai politik tidak hanya dimiliki Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah pun demikian. Partai politik yang memiliki hubungan khusus dengan Muhammadiyah adalah PAN. Hubungan tersebut terjalin dikarenakan pendiri PAN adalah Ketua Umum Muhammadiyah yaitu Amin Rais.

Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki kewajiban dan wewenang dalam memberikan pemberdayaan politik kepada masyarakat, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah selalu menyebarkan nilai-nilai toleran dalam dakwah yang dilakukan. Bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah toleransi dalam dunia politik adalah hal yang *urgent*. Perbedaan pandangan serta ideologi adalah hal lumrah dan perlu, karena toleransi menjadi kunci utama untuk menyatukan perbedaan. Sehingga tercipta negara yang damai walau memiliki banyak perbedaan. Hal tersebutlah yang menjadi dibutuhkan sebuah organisasi masyarakat bagi suatu bangsa. Berperan aktif dalam serta menjalankan berlangsungnya pemerintahan dengan membentuk masyarakat yang berpendidikan dan memiliki rasa toleransi yang tinggi.

6. Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Menurut Mac Andrews (2008: 44), tanggung jawab besar yang dimiliki oleh media massa sebagai kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi terlebih agar dapat menyuguhkan teladan budaya yang bijak untuk mengubah perilaku masyarakat, seharusnya diimbangi dengan pelaksanaan setiap fungsi media massa dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip yaitu responsibilitas, freedom of the press, independence atau netralitas, kelayakan berita terkait dengan kebenaran dan keakuratannya, aturan main yang disepakati bersama, dan penuh pertimbangan (decency). Sebagai alat penyebar informasi media RRI, Malang Post, dan MHTv melakukan sosialisasi terkait agenda Pilkada 2018. Pemberitaan diberikan dengan keterlibatan berbagai pihak sebagai bentuk kerjasama. Pihak-pihak yang terlibat

sebagai narasumber diantaranya ialah KPU, Panwaslu, Pasangan Calon bakal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2018 dan Tim Sukses Pasangan Calon bakal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2018, TNI dan Polri, serta Instansi Pemerintahan lainnya yang bersangkutan. Sosialisasi yang diberikan tidak hanya berupa pemberitahuan saja, tetapi juga pendidikan politik. Melalui media massa, pendidikan politik disebarluaskan agar seluruh kalangan dapat menerima informasi dengan baik. Hal tersebut karena, media massa dianggap sebagai alternatif penyeberan informasi paling efektif.

Edmund Burke menyebut media massa sebagai pilar keempat demokrasi (Vivian : 2008). Karena itu, media massa memiliki fungsi sebagai pengawas dan pengontrol pemegang kekuasaan. Namun hal ini juga perlu ditanyakan keefektifannya, karena ditakutkan kebenaran yang terkonstruksi malah berdasarkan siapa yang dapat menyampaikan pandangannya dengan paling baik. Dikarenakan hal tersebut tentunya akan mengarah pada bagaimana netralitas media terhadap data-data dari objek yang nantinya akan diberitakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran media massa meliputi:

a. Pemberitaan

Media massa dalam kegiatannya tidak pernah lepas dari agenda pemberitaan. Pengertian pemberitaan menurut William S. Maulsby dalam Purnama Kusumaningrat (2010:1) adalah sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Secara tidak langsung dalam pengertian ini media massa harus bertindak sesuai dengan kaidah Jurnalistik

pemberitaan. Media harus bersikap netral tanpa ada embel-embel suatu kepentingan politik, atau di susupi oleh para elite politik yang berkuasa. Sebagai Media Massa Lokal RRI, MHTv, dan Malang Post memberikan pemberitaan perihal Pilkada Kota Malang Tahun 2018 diantaranya ialah sebagai berikut:

- i. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- ii. Program serta Visi dan Misi

Pemberitaan terkait pengenalan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait siapa yang akan menjadi Wali Kota berikutnya. Hal tersebut berguna untuk masyarakat agar mengenal dan mengetahui lebih lanjut terkait karakteristik pemimpin yang diinginkan masyarakat. Penyampaian Visi dan Misi disampaikan dalam pemberitaan guna menunjang penilaian masyarakat terhadap Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Visi dan Misi yang diberikan melalui pemberitaan dapat mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Pemberitaan diberikan secara merata agar masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana kriteria yang baik dan sesuai dengan Kepemimpinan yang diinginkan di Kota Malang. Peran media memang menjadikan para politisi sebagai pembuat berita. Melalui media mereka mengenal wajah dan latarbelakang calon yang diekspos oleh media. Sekarang pun sudah mulai terasa peran media dalam menyongsong pesta demokrasi 2018, yang mana masyarakat dibombardir informasi politik melalui berbagai macam media promosi, mulai TV, Radio, surat kabar, dan sebagainya. Rebecca (1974) menemukan bahwa liputan yang dilakukan terus menerus oleh media cukup akurat untuk meningkatkan pengetahuan pemilih terhadap calon. seorang pemilih yang mengetahui banyak

tentang calon besar kemungkinan akan memilihnya dari pada calon yang mereka tidak ketahui. Para pemilih umumnya mengakui lebih banyak tahu tentang calon yang mereka idolakan melalui media. Artinya seorang politisi jika ingin memenangkan pemilu harus berhubungan dengan media.

b. Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Selain sebagai wadah pemberitaan, Media Massa menjadi alat bagi pemerintah untuk mensosialisasikan agenda-agenda Pemilihan Umum. Sosialisasi yang dilakukan melalui media massa dirasa cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan media massa menjadi konsumsi sehari-hari bagi masyarakat berbagai kalangan. Sedangkan pendidikan politik menggunakan media massa dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet kepada generasi selanjutnya dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan. Fungsi pendidikan politik yang paling periling adalah sebagai penyaring (filter) terhadap berbagai pemikiran baru, ideologi baru, dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh RRI, MHTv, dan Malang Post meliputi:

i. Jadwal Pilkada Kota Malang

ii. Tata cara dan Peraturan Pemilihan

Sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, serta Tim Sukses Paslon. Sosialisasi dan pendidikan menggunakan media massa sebagai peyebar informasi diharap dapat diterima oleh seluruh masyarakat Kota Malang tanpa terkecuali.

c. Penggiringan Opini dan Propaganda

Media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Budaya, sosial, politik dipengaruhi oleh media. Media massa di katakan sebagai kebudayaan yang bercerita. Media membentuk opini publik untuk membawanya pada perubahan yang signifikan. Pesan media tidak jadi begitu saja, tetapi dibuat dan diciptakan oleh media massa dengan tujuan tertentu. Menurut Ardianto (2007:58) media massa yaitu saluran sebagai alat atau sarana yang di pergunakan dalam proses komunikasi masa. Opini publik dapat terbentuk jika dibarengi dengan kebebasan media untuk memberikan informasi kepada khalayak. Tanpa media yang bebas, opini publik akan sulit untuk berkembang. Karena itu, pembentukan opini publik hanya dapat terjadi di negara yang menjalankan sistem demokrasi. Pada proses inilah terlihat salah satu atau beberapa orang dalam kelompok yang lebih menonjol (elit kelompok). Mereka lah yang biasanya dipercaya untuk mewakili atau berbicara atas nama kelompok. Karena figur mereka yang dihormati ini pula, maka para elit ini dapat mempengaruhi anggota lain dengan cara membujuk/mempengaruhi untuk mengikuti mereka. Mereka lah yang disebut sebagai pembentuk opini publik (*opinion leader*).

Melalui kanal-kanal media yang dimiliki oleh RRI, MHTv, dan Malang Post, mampu menjadi bentuk penggiringan opini kepada masyarakat Kota Malang agar tertarik untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Partisipasi politik yang diharapkan ialah, bahwa dengan adanya sosialisasi, pendidikan, dan pemberitaan terkait Pilkada masyarakat menjadi lebih faham dan tercerahkan pola pikirnya. Opini yang dibentuk oleh media tidak semata-mata hanyalah terkait pentingnya memberikan hak suara, tetapi juga bagaimana dampak dari adanya partisipasi yang minim serta kegagalan paslon yang baik untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, isu-isu yang menarik perlu diangkat dan diolah agar dapat mempengaruhi masyarakat.

7. Analisis Pengaruh Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Berdasarkan pada tujuan masing-masing lembaga tersebut, teori pendekatan new institutionalism menjadi pendekatan yang cocok untuk menganalisis peran daripada lembaga-lembaga tersebut. Proses analisis peran lembaga pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan analisis process tracing. Analisis ini melihat pengaruh dari aktivitas dan entitas lembaga yang menjadi sebab untuk mempengaruhi masyarakat sehingga menimbulkan akibat yang diinginkan.

Pilkada kota Malang 2018 yang berlangsung pada 27 Juni 2018 telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang, pasangan calon Sutiaji dan Sofyan Edi menjadi pemenang dengan perolehan suara sebesar 44.50%, disusul oleh pasangan Anton dan Syamsul

Mahmud dengan perolehan suara 36.58%, kemudian pasangan Nanda dan Wanedi dengan suara 18.92%. Data yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Malang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 mencapai 65.74% dengan suara sah sebesar 93% dan suara tidak sah 3%.

Tabel 14. Perolehan Suara

No.	Paslon	Perolehan Suara
1.	Yaqud Ananda Gudban dan Ahmad Wanedi (Menawan)	69.973 Suara
2.	Anton dan Syamsul Mahmud (Asik)	135.710 Suara
3.	Sutiaji dan Sofyan Edi (SAE)	165.194 Suara

Sumber: KPUD Kota Malang

Tabel. 16 Jumlah Surat Suara

Kecamatan	Jumlah Surat Suara Sah	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah / Partisipasi
Sukun	89.301	6.195	95.496
Blimbing	80.441	5.897	86.338
Klojen	44.902	3.553	48.455
Lowok Waru	73.029	5.291	78.320
Kedung Kandang	83.204	6.009	89.213

Kecamatan	Jumlah Surat Suara Sah	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah / Partisipasi
Jumlah Akhir	370.877	26.945	397.822

Sumber: KPUD Kota Malang

Berdasarkan data diatas, Jumlahh partisipasi Pilkada Kota Malang sebanyak 394.633 pemilih. Jumlahh tersebut mencapai angka presentase 65.74% dari Jumlahh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 600.318 Jiwa. Capaian yang didapat tentunya adalah hasil dari pengaruh kinerja berbagai pihak pemangku kepentingan yang telah terlibat. Keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tentunya bukan hanya disebabkan oleh salah satu pihak saja. Melihat banyaknya berbagai pihak yang turut aktif berperan serta dalam upaya-upaya sesuai dengan kapasitas lembaga yang dimiliki. hal tersebut berarti membuktikan bahwa adanya peningkatan Jumlahh partisipan, melihat pada taun 2013 Jumlahh partisipasi masyarakat sebesar 64.89%. meningkatnya Jumlahh partisipasi masyarakat Kota Malang pada Pilkada 2018 ini, menjadi bentuk terwujudnya Demokrasi yang lebih baik. Proses kampanye serta meode-metode para pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dengan melihat hasil yang ada.

Tabel 15. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang 2013

Kecamatan	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih	Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih
Kedung Kandang	139.265	89,213	50.052
Sukun	144.325	95.496	48.829
Klojen	76.470	48.455	28.015
Lowokwaru	116.387	78.320	38.067
Blimbing	132,607	86.338	46.269
Jumlah Akhir	609.054	397.822	211.232

Sumber: KPUD Kota Malang

Walau mengalami keberhasilan peningkatan Jumlahh partisipan pada Pilkada 2018 ini, masih dianggap kurang maksimal. Melihat bahwa yang menjadi target Jumlahh partisipasi pada umumnya ialah sebesar 70%. Hal ini membuktikan bahwa peran yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan masih belum cukup mempengaruhi masyarakat Kota Malang. Peningkatan partisipan dari Pilkada 2013 dengan presentase 64.89% ke 66% hanyalah berbanding sekitar 2% saja. Hal tersebut dengan perbandingan golput 213.621 pada tahun 2013 dan 211.232 pada Tahun 2018. Tentu hal ini patut menjadi pertanyaan bagi para pemangku kepentingan mengenai pengaruh yang diberikan kepada masyarakat apakah telah dijalankan semaksimal mungkin.

Berbagai peran yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan dapat dilihat bahwa mampu menarik perhatian masyarakat. *Pertama* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menjalankan peran dengan aktif dan gencar melakukan sosialisasi serta pendidikan politik kepada seluruh masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai menggunakan 3 metode. *Pertama*, melalui komunikasi tatap muka. Kegiatan komunikasi tatap muka dilakukan dalam bentuk seminar, *workshop*, pendidikan pemilih, dan ceramah. Hal ini diwujudkan dalam kegiatannya sosialisasi formal pada Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kota Malang Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol bekerjasama dengan KPU dan Panwaslu, serta kegiatan Sosialisasi Peran Media Digital dalam Mensukseskan Pilkada Kota Malang Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah dan KPU. *Kedua*, melalui komunikasi dan penyampaian melalui media. Penyampaian melalui media dilakukan dalam bentuk tulisan, gambar, audio visual, website, iklan, *talk show*, dan debat kandidat. KPU Kota Malang memiliki beberapa kanal media sosial sendiri seperti Twitter dengan alamat @kpumalangkota, instagram dengan nama kpukotamalang.official, facebook dengan nama KPU Malang Kota, youtube dengan nama Garudeyatv, dan website dengan alamat www.kpud-malangkota.go.id. KPU juga melakukan sosialisasi melalui media massa lain yaitu radio dan tv lokal yang ada di Malang. Selain itu, KPU Kota Malang juga menggunakan alat peraga sosialisasi seperti umbul-umbul, spanduk, dan poster yang terpasang di jalan-jalan kota Malang dan ditempel di kecamatan serta kelurahan yang ada di Kota Malang. *Ketiga*, sosialisasi dilakukan melalui

mobilisasi sosial. Metode mobilisasi sosial dilakukan melalui himbauan peran serta seluruh komponen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok-kelompok masyarakat, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi Pilkada Kota Malang Tahun 2018. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan KPU Kota Malang dengan diwujudkan menggunakan berbagai media kreasi dapat dikatakan mampu menarik perhatian masyarakat baik dari kalangan pemilih pemula, para pemuda kesenian, dan masyarakat umum lainnya.

Kedua, ialah peran Partai Politik. fungsi partai politik sebagai pelaksana pendidikan politik. Menurut Soerono (dalam Naning, 1982: 8 yang dikutip Marasat, 2012: 2) Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Menurut L. Soetanto pendidikan politik adalah pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara (dalam Naning, 1982: 35 yang dikutip oleh Marasat, 2012: 3). Dalam meningkatkan kesadaran politik itu (partisipasi politik) sehingga partai politiklah yang memegang andil besar didalamnya. Seperti kita tahu bahwa hakikat politik adalah kekuasaan, maka dalam hal ini setiap partai politik berupaya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan agar sesuai dengan kebijakan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, walaupun Partai Politik menjadi aktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi

politik masyarakat bukan semata-mata karena pendidikan politik yang dilakukan. Melihat dari penelitian yang telah dilakukan kepada partai politik Demokrat, Golkar, dan PKB sebagai sample purposeful peneliti dapat dikatakan bahwa minimnya pendidikan politik yang dilakukan partai. Hal lain yang dilakukan partai politik untuk menarik dukungan dan simpati dari masyarakat ialah aktivitas-aktivitas kampanye yang dilakukan. Partai politik dalam kampanye yang disampaikannya selain memberikan janji dan program-program yang dirasa mampu menarik perhatian masyarakat juga memberi rangsangan bersifat material. Rangsangan tersebut dapat berupa sembako, alat tulis, dan keperluan pokok lainnya. Hal tersebut dilakukan karena memang diperbolehkan asalkan tidak melanggar aturan dalam PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang dana kampanye. Oleh karena itu, rangsangan bersifat material ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain itu, kepemilikan organisasi sayap partai dengan jumlah kader dan anggota yang besar mampu memberi nilai tambah perolehan suara secara otomatis. Kader ataupun anggota yang dimiliki organisasi sayap partai tentu akan secara otomatis memberikan hak suara dan dukungannya kepada partai yang menaunginya. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, para kader dan anggota akan diberi sosialisasi dan arahan untuk mendukung partai tersebut. Salah satu partai yang memiliki organisasi sayap partai paling banyak ialah partai Golkar. Sehingga, kepemilikan organisasi sayap partai dapat menjadi indikator lain untuk memenangkan Pilkada Kota Malang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2018

a. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Dukungan Pemerintah Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah fasilitasi untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat 3 permendagri Nomor 9 Tahun 2005 pada pasal 5 dijelaskan dukungan tersebut diantaranya berupa:

1. Fasilitas persiapan pelaksanaan pilkada
2. Fasilitas pelaksanaan pilkada
3. Koordinasi Pelaksanaan Pilkada

b. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

KPU Kota Malang dalam melakukan sosialisasi politik menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota digunakan sebagai pedoman sosialisasisebagai dasar hukum dan pedoman.

1. Sasaran Sosialisasi
2. Materi Sosialisasi
3. Metode Sosialisasi

c. Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.” Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat setidaknya dilakukan dalam empat metode, yaitu:

1. Sosialisasi kader
2. Optimalisasi organisasi sayap partai
3. Pendidikan politik
4. Kampanye

d. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat : Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Peran NU dan Muhammadiyah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah:

1. Memiliki hubungan dengan partai politik
2. Pendidikan politik kaum muda
3. Dakwah berunsur politik kebangsaan
4. Sosialisasi agenda Pemilu

e. Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Peran media massa (RRI, Malang Post, MHTv) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2018 memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a. Pemberitaan
 - 1) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - 2) Program serta Visi dan Misi
- b. Sosialisasi
 - 3) Jadwal Pilkada Kota Malang

4) Tata cara dan Peraturan Pemilihan

c. Penggiringan Opini dan Propaganda

B. Saran

1. Partisipasi politik masyarakat perlu ditingkatkan. pemerintah harus mengoptimalkan perannya untuk mengawal pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik serta sosialisasi politik yang dilakukan oleh Bakesbangpol dilakukan sebagai formalitas terselenggaranya sebuah program kerja. Hal tersebut tentu merupakan sebuah metode yang bersifat pragmatis. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dimana penerima informasi hanya segelintir golongan masyarakat. Tentunya, dalam hal tersebut dibutuhkan sebuah metode baru agar informasi mampu memasuki segala ruang generasi muda dan masyarakat umum. Seperti halnya menggunakan media-media atau teknologi sesuai dengan apa yang menjadi daya tarik masyarakat saat ini, sehingga informasi yang disampaikan berimbang. Bakesbangpol perlu melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik dengan sebuah inovasi baru seperti turun langsung ke masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, dan kelompok sosial lainnya.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan tugas dan wewenang serta haruslah mensukseskan agenda Pilkada Kota Malang 2018 secara maksimal. KPU

Kota Malang telah melakukan kegiatan sosialisasi Pilkada Kota Malang 2018 dengan bekerjasama bersama berbagai pihak seperti komunitas-komunitas pemuda, paguyuban masyarakat, dan lembaga-lembaga lain. Dengan upaya sosialisasi yang dilakukan, KPU Kota Malang harusnya juga memaksimalkan sasaran. Sasaran sosialisasi yang kurang maksimal diberikan kepada golongan difabel. Hal tersebut dapat dilihat kurangnya program yang secara nyata terealisasi di media-media yang dimiliki oleh KPU Kota Malang. Sebagai instansi pemerintahan, KPU harus mampu imbang dalam memberikan sosialisasi kepada berbagai pihak. Untuk menyisir kalangan Difabel dapat dimaksimalkan dengan mengadakan sosialisasi melalui komunitas-komunitas difabel yang ada. Selain itu, agenda sosialisasi juga perlu dimaksimalkan di daerah-daerah pelosok Kota Malang. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat awam juga menerima pendidikan politik yang lebih.

3. Partai Demokrat, Golkar, dan PKB adalah salah satu partai yang turut aktif dalam partisipasi Pilkada Kota Malang 2018. Partai politik yang memiliki wewenang untuk menduduki jabatan-jabatan kepemimpinan negara haruslah mengambil andil yang maksimal dalam memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik hendaknya tidak hanya diberikan kepada kader-kader partai saja melainkan juga kepada masyarakat umum. Melihat dari agenda ketiga partai tersebut dalam Pilkada Kota Malang 2018, partai politik tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat umum secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh

mereka adalah berupa bentuk kampanye. Sosialisasi tersebut mengajak masyarakat untuk memberikan hak suaranya kepada pasangan calon yang diusung oleh masing-masing partai. Kedudukan partai politik sebagai pemegang kendali bagi kehidupan perpolitikan suatu bangsa, seharusnya mampu memberikan pendidikan politik yang lebih baik. Pendidikan politik serta sosialisasi dapat dilakukan diluar ada atau tidak adanya agenda Pemilihan Umum. Sehingga, masyarakat faham betul akan pentingnya partisipasi mereka terhadap berlangsungnya demokrasi di Indonesia.

4. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan yang memiliki arah gerak politik kebangsaan. Marwah politik tidak dapat dipisahkan dari kedua organisasi tersebut karena peran sertanya dalam turut membangun bangsa Indonesia. Peran yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam pilkada Kota Malang telah membuktikan bahwa keterkaitan dengan partai politik tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, hendaknya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dapat lebih membuka diri kepada partai politik lain. Walau telah dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah membuka diri bagi partai politik lain, nyatanya keberpihakan tidak dapat ditutupi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Selain itu, dilihat dari nilai-nilai toleransi yang dijunjung tinggi untuk mencapai negara yang damai, hendaknya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dapat saling bekerjasama menciptakan agenda kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama. Hal tersebut akan

mampu menjadi contoh nyata dari nilai-nilai yang diajarkan. Sehingga, dengan adanya anggota yang cukup besar, masyarakat Kota Malang akan menjadi lebih menyatu.

5. Media massa menjadi alternatif penyebaran informasi paling efektif bagi seluruh elemen pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penguasaan media massa dapat menjadi tombak utam suksesnya tujuan masing-masing lembaga tersebut. Karena alasan tersebutlah, media massa harus mampu membatasi diri dari kepentingan satu pihak. Media massa harus lebih memihak kepada kepentingan masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak hanya sekedar sebatas pemberitahuan bersifat umum. Setiap informasi yang disampaikan haruslah lebih mendalam sampai tataran akar rumput. Hal tersebut dibutuhkan agar masyarakat faham betul tentang segala fenomena permasalahan yang terjadi pada Pilkada Kota Malang 2018. Sehingga, masyarakat mampu menentukan pilihan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali kota yang baik dan benar pada Pilkada Kota Malang 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinaldi. 2014. *Kekuatan-kekuatan politik indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Beach, Derek. 2012. *Process Tracing Methods an introduction*. Germany: Department of Political Science University of Aarhus.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Damhuri, Elba. 2018. *Muhammadiyah dan Kebangsaan*. Diakses melalui <http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/11/18/ozkycb440-muhammadiyah-dan-kebangsaan-part1>. Pada (Selasa, 01 Mei 2018).
- Dennis, McQuail. 2005. *Mass Communication Theory*. Jakarta: Erlangga.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fuad, Zamzam Muhammad. 2015. *Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah: Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah*. Universitas Gajah Mada: Jurnal Ketahanan Nasional. No. XXI, Hal. 23-33.
- Haboddin, Muchtar. 2016. *Jejak Pemikiran: Dari Tradisionalis Ke Behavioralis*. Universitas Brawijaya: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 7, No. 1.
- Hall, Peter and Taylor R. C. R. 1996. *Political Science and the Three New Institutionalisms, Political Studies*. Harvard University: Political Science Department. MPIFG Discussion Paper 96/6.

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar)*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- MacAndrews, Colin. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mahardika, Friska. 2012. *Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan: Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Purwokerto (Skripsi)*. Purwokerto (ID: Univertsitas Jendral Soedirman).
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Mukthie Fadjar, Abdul. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change And Economicperfor mance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Novemelia, Ayu Rara. 2016. *Kebijakan Lampung Post Dalam Pembentukan Citra Politik: Studi Kasus Netralitas Media Cetak Terhadap Pemberitaan Calon Bupati Pesawaran Pada Pilkada 2015*. Lampung (ID.: Universitas Lampung).
- Novianasari, Diah Dan Samsuri. 2016. *Peran Media Massa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Para Aktivis Hmp Pkn Di Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. Vol.13, No. 2.
- Nurchasim, Moch, dkk. 2014. *Partisipasi Pemilu Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Jakarta: Widya Graha LIPI.

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah.

Peters, B. Guy. 2004. *Institutional Theory Political Science: The New Institutionalism*. New York: Continuum.

Putri, Masleka Pratama. 2015. *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*. Universitas mulawarman: Jurnal Ilmu Komunikasi. 4 (1). Hal. 30-43

Ramadhan, Moh. Fajar Shodiq dan Tri Hendra Wahyudi. 2016. *Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional*. Universitas Brawijaya: Jurnal Politik Indonesia. Rev. I, Hal.136-153.

Research Centre For Politics and Government (PolGov). 2014. *Survei Perilaku Pemilih dan Political Linkage*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Rush, Michael dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Siahaan, Nico Handani. 2016. *Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Di Parlemen Pada Pemilihan Umum Indonesia*. Jurnal: Politik. Vol. 7, No.1.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Komunikasi Masa*. Bandung: Bina Citra.

_____. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto.1992. *Pengantar Sosialisasi* . Jakarta: Raja Wali Pers.

- Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2015 tentang jaminan dan perlindungan negara.
- Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Varma, SP. 2007. *Teori Ilmu Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

